Sejarah Asia Barat Modern

Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III

PENULIS
BRIGIDA INTAN PRINTINA

SEJARAH ASIA BARAT MODERN
Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III

Penulis
Brigida Intan Printina

Sanata Dharma University Press

SEJARAH ASIA BARAT MODERN
Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III

Penulis
Brigida Intan Printina

Buku Cetak:
ISBN 978-602-5607-93-6
EAN 9-786025-607936

Editor : Khoilul Huda

Cetakan Pertama, 2019
vii; 201 hlm.; 15,5 x 23 cm.

Ilustrasi Sampul: Lintang Pustaka Utama

Tata Letak: Thoms

PENERBIT:

SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS
Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican,
Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 513301, 515253;
Ext.1527/1513; Fax (0274) 562383
e-mail: *publisher@usd.ac.id*

Sanata Dharma University Press (SDUP) berlambangkan daun teratai coklat bersudut lima dengan sebuah obor yang menyala merah, sebuah buku dengan tulisan "Ad Maiorem Dei Gloriam" dengan tulisan Sanata Dharma University Press berwarna putih di dalamnya.
Adapun artinya sebagai berikut.
Teratai lambang kemuliaan dan sudut lima: Pancasila.
Obor: hidup dengan semangat yang menyala-nyala.
Buku yang terbuka: SDUP selalu dan siap berbagi ilmu pengetahuan.
Teratai warna coklat: sikap dewasa dan matang.
"Ad Maiorem Dei Gloriam": demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Tulisan Sanata Dharma University Press berwarna putih: penerbit ini senantiasa membawa terang dan kebaikan bagi dunia ilmu pengetahuan.

appti

Sanata Dharma University Press anggota APPTI
(Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

PRAKATA

Memetakan serpihan-serpihan peristiwa di wilayah Asia Barat pada awal abad ke-20 tidaklah mudah. Dari kacamata Barat wilayah Asia Barat memiliki potensi besar untuk proteksi wilayahnya sehingga ada banyak wilayah dijadikan mandat secara *defacto*. Tidak heran pihak Barat menyebutnya dengan *'Middle East'* atau wilayah di sebelah timur dan tengah Eropa. Beberapa gambaran mengenai berbagai struktur geografis di Asia Barat menandakan kawasan tersebut yang secara politik mudah goyah dan ditandai permusuhan-permusuhan historis, sedangkan negara-negara bangsa di kawasan Asia Barat pada awal abad ke-20 struktur sosial masyarakatnya belum mampu mengatasi perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial yang terlalu cepat.

Melalui buku ini mahasiswa sebagai calon pendidik sejarah diharapkan dapat mengintegrasikan *High Other Thingking Skill* (HOTS), agar mampu memahami konsep peristiwa dan memaknainya secara kontekstual sebagai pengalaman untuk memecahkan persoalan kehidupan. Buku ajar ini juga dilengkapi dengan paradigma pedagogi reflektif yaitu pembelajaran yang mengin-tegrasikan pembelajaran bidang studi dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran bidang studi disesuaikan dengan konteks siswa, sedangkan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan ditumbuh-kembangkan melalui dinamika pengalaman, refleksi, dan aksi. Pembelajaran ini dikawal dengan evaluasi (Subagya, 2010:51).

Tujuan dari pembelajaran PPR terwujud dalam 3 unsur yang ada pada tujuan pembelajaran. Ketiga unsur tersebut adalah *Competence, Conscience*, dan *Compassion*. *Competence* merupakan kemampuan secara kognitif atau intelektual, *Conscience* ialah kemampuan afektif dalam menentukkan pilihan-pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sedangkan *Compassion* adalah kemampuan dalam psikomotorik yang berupa tindakan konkret maupun batin disertai sikap bela rasa bagi sesama (Subagya, 2010: 23-24).

Hal lain yang menjadi perhatian mahasiswa ialah buku ajar Sejarah Asia Barat Modern membantu mengasilkan profil lulusan prodi pendidikan sejarah yang professional dalam pengajaran. Dalam hal ini lulusan harus dapat memahami konsep sejarah Asia Barat Modern dan menganalisa krisis terkait ideologi negara dan analisa konflik-konflik beberapa negara Asia barat serta dampaknya bagi perkembangan dalam negeri dan dunia. Dengan begitu dalam pelaksanaan pembelajaran kelak dan dalam kehidupan sosial para pendidik sejarah mampu mengatasi situasi majemuk yang seringkali menghambat masa depan bangsa dan kehidupan harmonis. Ajaran ini kelak dapat diregenariskan kepada anak didik supaya mampu menghargai bangsa lewat pembelajaran sejarah. Tujuan pembelajaran sejarah Asia Barat Modern ini telaah sesuai dalam kurikulum prodi pendidikan sejarah. Semoga ada banyak hal baru yang didapat setelah mempelajari buku ini melalui mata kuliah Sejarah Asia Barat Modern.

DAFTAR ISI

BAB I

ANALISA KONFLIK ASIA BARAT ABAD MODERN

1.1 Deskripsi Materi

Pemahaman dan Analisis mahasiswa mengenai arti penting Asia Barat bagi bangsa Barat, tokoh sebagai aktor konflik Asia Barat, batas wilayah penyebab konflik Asia Barat, konflik dengan agama Asia Barat, konflik Asia Barat dengan pihak asing, hubungan indonesia dengan Asia Barat.

1.2 Relevansi

Mahasiswa mampu mengenal berbagai peristiwa bersejarah di Asia Barat di Abad Modern (Asia barat) dan mengambil nilainya sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memelihara adat budaya ketimuran.

1.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis Konflik Asia Barat di Abad Modern (Asia barat) dan mampu menemukan nilai-nilai keutamaan terkait karakter bangsa.

Glosarium

1. *Islamic state*, suatu istilah yang merujuk konsep dunia Islam dari sisi representasi Islam tidak hanya dalam dataran demografis saja, akan tetapi sampai dalam tataran kelembagaan formal dengan diapresiasinya Islam sebagai *rule of game* dalam negara.
2. *Moslem state,* suatu istilah yang merujuk konsep dunia Islam yang dilihat dari representasi demografisnya, dan tidak harus tercerminkan dalam reperesentasi kelembagaan formal kenegaraan.

A. Arti Penting Asia Barat bagi Bangsa Barat di Abad XX

Sejak dahulu Asia barat mempunyai arti strategis yang menjadi incaran negara-negara besar (Dipoyudo, 1981: v). Teori besar yang dibuat oleh Karl Haushoffer dan Mc Kinder menempatkan Asia barat sebagai *"heart-land"* (daerah jantung)[1] menjadikan pusaran konflik dalam Perang Dunia I berpusat di Eropa dan pasca kekhalifahan. Siapa menguasai Asia barat, maka ialah yang akan menguasai dunia.

Gambar 1.1 Peta Jazirah Arab atau Asia barat (sumber: westArab.org)

Dalam dekade berikutnya alasan konflik kemudian bergeser kepada persoalan konflik sumber daya alam, terutama minyak. Suplai pasokan minyak dunia dalam dekade 1970-an sangat tergantung kepada minyak di Asia barat. Maka tampak sekali kekuatan dari luar (*intrusive state*) yang mengakibatkan negara-negara di Asia barat saling berkonflik. Dalam konteks ini Amerika Serikat merestui berdirinya Israel sebagai negara yang bisa memberikan jaminan

[1]Hal ini dikarenakan posisinya pada pertemuan Eropa, Asia dan Afrika, kawasan Asia barat menguasai jalan-jalan masuk ketiga benua itu. Asia barat berbatasan dengan Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspi, Teluk Parsi dan Samudera Hindia. Di kawasan Asia barat juga terdapat jalur-jalur air yang strategis seperti Selat Bosporus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab el Mandeb dan Selat Hormuz. Dengan demikian, baik melalui daratan maupun perairan kawasan ini memandang ke banyak penjuru, bahkan keunikan geostrateginya diakui oleh negara-negara besar di dunia

kepentingan Amerika Serikat di Asia barat (Spanier,1994: 34). Asia barat sebagai ladang gerakan fundamentalis dianggap sebagai penyebab utama mengapa konflik di Asia barat masih hadir.

Terdapat kondisi objektif yang belum banyak dibahas tentang hubungan konflik dengan posisi geo-politik di Asia barat. Hal ini menarik untuk dikaji sehingga bisa diukur sejauh mana kontribusi letak geografi politik terhadap intensitas konflik. Dengan diketahui alasan relasinya diharapkan akan memiliki kontribusi yang positif untuk mendesain geografi politik menjadi posisi yang kondusif bagi perdamaian. Sehingga wilayah yang memiliki potensi yang sangat beragam ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran dan perdamaian di dunia. Hal ini bisa dijadikan tolok ukur yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia yang memiliki adat yang mirip dengan Asia barat.

Kajian tentang geografi politik sudah banyak dilakukan oleh para ahli salah satunya Montesqiu yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin (Duverger,1995: 45).

Kajian geografi politik kemudian banyak diteliti oleh generasi dari Eropa yakni Karl Haushoffer yang terkenal dengan Heart-land theory, yang berasumsi bahwa setiap negara atau masyarakat cenderung akan mencari daerah yang memiliki arti yang sangat strategis yang juga dikenal "Daerah Jantung". Karl Haushoffer menekankan bahwa "*siapa saja yang menguasai daerah jantung maka ia akan menguasai daerah berikutnya bahkan pada akhirnya dunia*". Pandangan ini menjadi sangat monumental bagi kaum elite di Jerman untuk mengembangkan konsep leibensraum (teori ruang baru). (Alaydair, 1989: 56)

Agak berbeda sedikit dengan pandangan Karl Haushoffer, intelektual geografi politik Mc Kinder dari Inggris cenderung *menempatkan lingkungan dalam konteks laut.* Teori ini kemudian dikenal dengan *Rim-land Theory*, yang memiliki preposisi bahwa barang siapa bisa membentuk sebuah jaringan antar wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia (Alaydair, 1989: 56). Sejarah telah mencatat Inggris menjadi negara besar karena kuatnya armada lautnya. Teori ini kemudian juga dikembangkan oleh para elite politik di Uni Soviet ketika itu untuk mencari akses air (dalam hal ini laut) yang kemudian dikenal Teori Air Hangat. Teori ini

cukup memberikan kontribusi yang signifikan bagi lahirnya konflik di Asia Tenggara khususnya di kawasan Indo-Cina dan di kawasan Eropa Timur khususnya di kawasan Baltik.

Roger Geraudy melakukan studi yang kaitannya dengan *geografi politik untuk mengukur proses pendudukan Israel terhadap Palestina*. Lain halnya dengan Theodore Herzl, aktivis Zionisme yang mampu melakukan *strategi kolonialisme klasik dan demografis* di kawasan Asia barat khususnya Palestina dengan memanfaatkan situs keagamaan yang diramu dengan idiom-idiom politik, sehingga Zionisme yang sebelumnya berbasis keagamaan menjadi Zionisme yang berbasis politik (Geraudy, 1994: 47) Pemanfaatan letak geografis berasal dari bukit Zion ini mampu memanipulasi sentimen politik, yang pada akhirnya memicu ledakan di Asia barat.

Kajian yang mengulas tentang hubungan konflik dan geografis juga telah dilakukan oleh Drysdale yang menyatakan bahwa terdapatnya *hubungan yang signifikan antara peta geografis yang artifisial (buatan) dengan konflik yang terjadi*. (Alaydair, 1989) Garis-garis berbatasan yang tumpang tindih mengakibatkan irisan-irisan politik dalam masyarakat yang selalu berseberangan. Inilah yang kemudian menyebabkan tinggi konflik berkepanjangan di beberapa negara bekas jajahan karena banyaknya perbatasan artisifial yang menabrak garis-garis komunitas masyarakat.

Kajian ini kemudian diperkaya dengan analisis Wolter S Jones yang menyebut perbatasan artifisial ini melahirkan masalah dalam proses integrasi atau yang dikenal dengan *gejala separatisme dan iredentisme*. Jika separatisme lebih sebagai upaya pemisahan satu kelompok masyarakat minoritas yang dipaksa dipersatukan karena persoalan perbatasan artifisial dari kelompok besar yang terdapat heterogenitas ras dan kepentingan. Sedangkan jika gejala Iredentisme adalah gejala penggabungan suatu kelompok minoritas pada pasca penjajahan dipaksa bergabung dengan kelompok yang lebih besar tapi berbeda ras dan kepentingan untuk bergabung dengan komunitasnya sendiri (Jones, 1997: 37).

B. Analisis Tokoh sebagai Aktor Konflik Arab-Asia Barat

Negara-negara Asia barat yang menganut sistem politik warisan (monarki) atau kudeta militer.[2] Menurut Carl J Friedrich politik merupakan

[2]Kumpulan teori-teori politik dan kajian analisis politik

suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan. Politik juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan berpolitik tak pernah lepas dari kehidupan sosial suatu negara. Masyarakat di Asia barat dengan didominasi oleh bangsa arab mengakibatkan kultur pemerintahan yang ada di negara tersebut sebagian besar adalah diktator. Salah satu faktor historis karena di wilayah tersebut yang dahulu bersistem kerajaan.

Sebagian besar negara yang berkonflik memiliki pemimpin yang cenderung diktator sehingga warga negara merasa tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Hal inilah yang membuat ada dorongan kelompok untuk menyampaikan aspirasinya. Jika melalui cara yang formal dan legal tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintahnya maka cara radikal dengan melakukan unjuk rasa merupakan opsi terakhir yang menurut sebagian warga negara akan mendapatkan tanggapan yang pasti dari negara, seperti yang dilakukan di Mesir dan Irak.

Di Mesir setelah kolonisasi Inggris ada raja terkenal bernama Sultan Fuad. Sultan Fuad menjadi raja Mesir, dan ini merupakan suksesinya perdana menteri. Politik menjadi konflik tiga arah antara nasionalis, raja, dan Inggris. Fuad menunjuk perdana menteri yang akan membuat konstitusi negara baru. Akhirnya, sebuah konstitusi disusun dan pemilihan parlemen diadakan. Menurut konstitusi, Islam adalah agama negara, tetapi semua orang Mesir (termasuk Kristen dan minoritas Yahudi) harus sama di hadapan hukum. Konstitusi diberikan kepada raja yang memiliki kekuatan yang cukup. Raja bisa membubarkan parlemen dan memveto tindakannya. Raja dapat mengangkat dan memberhentikan menteri serta dapat mengeluarkan dekrit tanpa adanya parlemen. Raja adalah komandan dikepalai eksekutif negara. Sedangkan menteri bertanggung jawab kepada parlemen, tapi karena mereka menjabat di atas kekuasaan raja, mereka merasa sulit mengabdi kepada dua tuan. Dua dari lima senator ditunjuk oleh raja; tiga dari lima terpilih. Wajah Fuad bahkan muncul di perangko Mesir dan koin (Ochsenwald, 2013: 421).

Konflik berkepanjangan dalam tiga dekade juga dialami bangsa Irak oleh karena faktor aktor konflik. Sadam Husein merupakan pemimpin paling diktaktor negara Irak karena dapat melakukan Perang Teluk hingga tiga periode. Sadam Husein adalah presiden Irak yang banyak memberi pengaruh

terhadap Irak, pada 1972 Saddam menasionalisasi banyak perusahaan minyak yang dipegang oleh pihak asing. Tindakan itu bertujuan menghapus monopoli Barat atas Irak sekaligus mengembalikan kekayaan Irak kepada Rezim yang berkuasa. Saddam menciptakan sebuah sistem pertahanan dalam negeri yang mampu menangkal setiap usaha kudeta dari golongan mayoritas Syiah ataupun Kurdi. Sistem pertahanan itu menitikberatkan pada pembangunan militer. Hal itulah yang membuat Irak di bawah pemerintah Saddam terkenal dengan sebutan "*Republic of Fear*" (Sukarwo, 2009: 145).

C. Analisis Batas Wilayah Penyebab Konflik Asia Barat

Dalam tingkat perdebatan (tidak perang), konflik perbatasan berbentuk konflik antar negara (salah satu) yang tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengajukan gugatan(Surwandono, 2011: 59). Berbasis perbatasan memiliki arti substansial dan didukung kekuatan untuk mendapatkannya, misalnya konflik Mesir Israel, konflik Irak-Kuwait. Bisa pula berbasis ideologi keagamaan, dimana terdapat kelompok-kelompok militan yang satu sama lain sudah saling merasa dipinggirkan, baik oleh negara atau kelompok yang lain, diantaranya konflik Iran-Irak, Palestina-Israel, Hams-Israel, Jihad Islam-Israel, Hizbullog-Israel. Berbasis *Natural Resources*, dimana terdapat sumber alam yang signifikan seperti air dan minyak, misalnya Konflik Sudan-Mesir, Irak-Kuwait, Amerika Serikat-Irak, Iran-Irak (Sukarwo, 2009: 145).

Dari sisi tekstur geografis pantai, terdapat kecenderungan tingkat konflik menunjukkan gejala yang intensif. Hal ini bisa dilihat dinamika konflik dari negara Arab Saudi dengan dinamika konflik pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) yang kemudian berkembang juga kelompok Ikhwan, ada pula kelompok al-Qaeda yang sangat sering memicu polemik pemikiran. Arab Saudi sebagai negara yang besar juga senantiasa memberikan ruang konflik. Arab Saudi merasa sangat khawatir terhadap pengaruh pemikiran Syi'ah sebagai kekuatan ideologi yang berseberangan dengan Sunni, yang sebenarnya secara wilayah tidak berbatasan langsung.

Yaman, yang langsung berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman di sebelah Barat berbatasan dengan laut Merah serta Ethiopia di Afrika memiliki konflik dalam tingkat *perdebatan* juga sangat tampak, Yaman selatan banyak diwarnai pemikiran sosialis, sedangkan utara banyak diwarnai pemikiran konservatif sebagaimanadi Arab Saudi, yang mana pada

akhirnya menyebabkan perang etnis, antara kelompok di Yaman Selatan dan YamanUtara.

Mesir sebagai daerah pantai juga sangat intensif dalam dinamika konflik, baik dari sisi pemikiran sampai melibatkan dalam berbagai perang di Arab. Dari sisi pemikiran Mesir merupakan negara yang pernah mempraktekkan berbagai ragam pemikiran, dari berbasis pemikiran keislaman, sosialis, dan kapitalis. Mesir juga dipahami sebagai gudang lahirnya gerakan pemikiran besar, baik dari sisi keislaman seperti Hasan al-Banna, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan Hanafi, ataupun pemikiran nasionalis gaya Gamal Abdul Nasser. Mesir juga banyak melibatkan diri dalam tingkat konflik *games*, maupun *wars*. Mesir bahkan terlibat dalam perang Arab Israel lebih dari 2 di 1956 dan 1967.

Sedangkan di negara berbasis gurun gejala konflik dalam tingkat *debates* dan *wars* ada kecenderungan kurang intensif. Hampir tidak ditemukan konflik yang berarti seperti perang langsung secara terbuka, kalaupun terjadi perang hanya terlibat dalam perang kolektif dengan Israel yang lebih mengedepankan ikatan emosional Arab saja. Namun jika negara berbasis gurun tersebut memiliki sedikit akses pantai, maka ada kecenderungan negara tersebut akan intensif melakukan konflik. Hal ini bisa dilihat di Irak yang pola konfliknya dalam 3 dekade terakhir terlibat dalam konflik secara konfrontatif, yakni Perang Teluk I (Iran-Irak), Perang teluk II (Irak-Kuwait) dan Perang Teluk III (Irak-Amerika Serikat). (Microsof Encarta Encyclopedia,2004).

Dari sisi kepadatan penduduk tampaknya ada gejala yang menarik. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ternyata memiliki peluang yang besar untuk mengapresiasi konflik. Kepadatan yang dimaksud dapat dilihat dari sisi kuantitas, juga dilihat dari sisi multikulturalis. Israel dan Palestina merupakan kawasan yang sangat rawan konflik, dan mau tidak mau harus berkonflik karena terkepung oleh lingkaran negara yang tidak ramah dengan Israel ataupun palestina yang setiap saat harus menghadapi peminggiran demografi oleh Israel. Dengan kepadatan yang tinggi Israel harus memperluas wilayah dengan melakukan kebijakan pendudukan dan ekspansi.

D. Analisis Konflik dengan Agama Asia Barat

Konflik sebagai hasil interaksi antar sesama umat Islam dalam batas tertentu cenderung mewarnai konflik di Asia barat, hal ini dalam batas

tertentu bisa difahami karena populasi umat Islam di Asia barat sampai angka 93% (Microsoft Encarta Encyclo-pedia, 2004). Namun, kita juga harus melibat potret secara seksama bahwa memang ada persoalan yang dinamis antar idiologi dan kepentingan bagi kaum konservatif di Asia Barat. Konflik antara Irak-Iran, Kuwait-Irak, antar faksi di Palestina, antar kelompok keagamaan di Arab-Saudi maupun Mesir merupakan potret konflik yang cenderung bereskalasi ke arah tingkat perang.

Konflik Sunni-Syiah tidak hanya dalam batas *debate* semata, namun lebih jauh sampai ke tingkat perang, bahkan sampai melibatkan konflik di kawasan Arab maupun diluar Arab. Efek dari perang Irak-Iran difahami sebagai konflik bawaan yang telah diwariskan umat Islam semenjak abad ke 8 Masehi yang sampai abad 21 belum terselesaikan dengan baik. Meskipun konflik Iran-Irak telah berakhir di 1988, namun bukan berarti konflik berbasis Sunni-Syi'ah telah berakhir sama sekali. Meskipun dalam batas tertentu telah mengalami pengurangan yang signifikan dengan diterima presiden Khatami sebagai ketua OKI (Satloff,1995).

Konflik diberbagai wilayah Islam sebagai representasi faksi dalam pemikiran Islam juga terus terjadi dengan intensif. Mesir merupakan sebuah mozaik bagaimana banyaknya pemikiran keislaman yang berkembang di abad ke-20 namun menimbulkan gejala yang tidak sehat, berupa kafir-mengkafirkan. Inilah yang kemudian mengilhami Ikhwanul Muslimin membangun model pemikiran jalan tengah meski di tengah jalan pemikiran jalan tengah Ikhwanul Muslimin dipaksa untuk dieliminasi karena dianggap sebagai embrio gerakan esktrim. Konflik pemikiran Islam di Palestina antara kubu nasionalis dan fundamentalis pernah terjadi, yang sebenaranya lebih disebabkan karena pilihan dilematis yang harus diterima ketika sebagian umat Islam melakukan konsesi perjanjian dengan Israel (Qordhawy, 1997).

Sedangkan konflik Islam dengan Yahudi sebelum menjadi konflik sudah menahun, semenjak jaman Nabi Muhammad SAW. Konflik dengan Yahudi sudah mereda tatkala umat Yahudi terdiaspora ke mana, menyebar ke seluruh dunia untuk mencari tempat bermukim. Konflik menjadi mengemuka tatkala Theodore Herzl mendeklarasikan program pulang kembali ke tanah air mereka dalam konteks untuk menetap, bukan hanya ziarah saja. Meskipun konflik ini hanya terjadi di satu kawasan yakni di Palestina, namun posisi Palestina dalam pandangan Islam dan Arab merupakan tempat yang sangat

monumental. Sehingga konfliknya bereskalasi sampai membesar, sehingga melahirkan konflik yang sangat kompleks yang dikenal dengan konflik Arab-Israel (Satloff,1995).

Dalam kurun 1980-an, sebenarnya intensitas Perang Arab Israel menunjukkan pola penurunan semenjak Mesir melakukan perjanjian Cam David, namun di satu sisi Israel menunjukkan gejala sebaliknya. Peristiwa yang sangat mengerikan, yakni terjadinya pembantaian kaum muslimin Arab di Sabra dan Satila di 1988. Yang bersamaan itu lahirlah gerakan perlawanan Islam yang masif untuk melakukan serangkaian perlawanan. Sebagai contoh muncul Gerakan intifadha adalah gerakan yang lahir sebagai reaksi terhadap tindakan represif Israel (Satloff,1995).

Karena tindakan represif Israel tidak terhenti maka gerakan Intifadha yang sebelumnya direpresentasikan sebagai gerakan melawan Israel dengan ketapel dan lemparan batu. Pada tahun 1994-an mulai muncul modus baru perlawanan terhadap Israel dengan tindakan “bom Shahid”. Bagi Israel tindakan bom bunuh diri ini diyakini sebagai tindakan kontra represif yang kemudian mengakibatkan regim yang berkuasapun semakin mengental dengan politik kekerasannya. Benyamin Netanyahu yang diyakini sebagai perdana menteri yang sangat keras kepada pejuang Palestina ternyata masih dianggap kurang keras, sehingga muncullah sosok Ariel Sharon yang sangat keras.

Konflik ini kemudian tidak hanya melibatkan Yahudi yang berada Asia barat saja, namun juga melibatkan kekuatan Yahudi yang berada di Amerika Serikat dalam bentuk ikatan lobi yang tergabung dalam AIPAC. Demikian pula tindakan diskriminatif Yahudi juga tidak hanya berlaku di Palestina, namun juga di daerah-daerah di mana lobi Yahudi sangat berpengaruh. Demikian sebaliknya, sentimen anti Yahudi pun berkembang di seantero dunia Islam. Penolakan kepada produk dan pejabat Yahudi sedemikian merebak di mana-mana.

Gambar 1.2: Proses Perdamaian di Oslo, Kanan perwakilan Israel Yitzhak Rabin, Tengah Presiden AS Bill Clinton, Kiri perwakilan Palestina Yasser Arafat (sumber: westArab.org)

Tingkat konflik antara Islam dan Nasrani relatif tidak banyak tercermin di Asia barat. Kalaupun ada konflik, hanya di beberapa wilayah Lebanon saja. Kekuatan politik Nasrani kurang begitu berkembang di Asia Barat, karena posisi tidak lebih dari 2% saja di hampir semua negara, kecuali di Lebanon yang mencapai 15%.

Ada satu tempat di Irak, yakni di sekitar Karbala yang diyakini terdapat makam Imam Ali dan tempat pembantaian terhadap cucu Rasul yakni Imam Hussein. Jika daerah ini sampai dirusak oleh pihak lain, maka akan dengan sangat mudah menimbulkan sentimen untuk timbulnya konflik. Iran sebagai representasi negara Syi'ah sangat menghormati dan menaruh perhatian yang sangat kuat terhadap berbagai wilayah di Irak.

Sedangkan untuk kawasan situs yang lain bisa ditemukan tempat yang sangat sakral bagi umat Islam yakni Makkah dengan bangunan Ka'bahnya. Tempat ini relatif tidak menjadi ajang konflik, kalaupun ada hanya sebatas demontrasi yang dilakukan oleh jamaah haji dari Iran. Ka'bah dan Makkah pernah menjadi tempat konflik yang sangat berarti tatkala terjadi konflik antara Mua'wiyyah bin Abi Sofyan dengan Zubair bin Awwam yang mempergunakan Ka'bah sebagai benteng pertahanan ataupun konflik yang dilakukan oleh raja Abraham ketika menyerang Ka'bah. Semenjak kasus ini, situs sakral di Ka'bah relatif tidak menjadi ruang konflik, dan pemerintah Arab Saudi sangat berkepentingan untuk menjadikan daerah Makkah sebagai daerah yang steril dari aktivitas politik.

E. Konflik Asia Barat dengan Pihak Asing

Wilayah Arab khususnya (Arab Utara) Asia barat pada abad ke 18 diperebutkan oleh negara-negara imperialis. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandiria kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis.

Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris Terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di Timur. Sebaliknya apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga menguasai seluruh Asia barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India.

Selang beberapa tahun (3 tahun) Turki dengan bujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Tahun 1801, Inggris mengirimkan tentaranya ke Mesir untuk menyerang dari jurusan barat, sedangkan Turki mengirimkan dua pasukannya, yang satu pasukan darat untuk menyerang Mesir dari Timur dan yang lainnya pasukan laut untuk memberi pertolongan kepada armada Inggris. India juga mengirimkan pasukannya. Dalam pertempuran di Abu Qir, tentara Prancis mengalami kekalahan. Alexandria kemudian dapat diduduki oleh tentara Inggris. Akhirnya Prancis terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Inggris, yang menuntut Prancis mundur dari Mesir(Roesnadi, 1979: 248).

Pada tahun 2007, negara Prancis merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-8 dunia menurut data IMF (International Monetary Fund). Bank Dunia juga memasukkan Prancis seabgai Negara terbesar ke-7 di dunia yang mempunyai Produk Domestik Bruto tertinggi. Tidak hanya itu, Prancis merupakan negara yang sangat berperan secara geopolitik di Asia barat. Di tahun yang sama juga terjadi gencatan senjata Israel dan Palestina yang semakin memburuk tanpa adanya proses negosiasi, Prancis di bawah pemerintahan Francois Hollande berinisiatif sebagai mediator pada konflik Israel Palestina dalam *Middle East Peace Initiative*(Satloff,1995).

F. Hubungan Indonesia dengan Asia Barat

Dukungan Indonesia terhadap negara-negara Asia barat selalu bergulir hingga masa kini. Masyarakat Indonesia selalu mendukung masyarakat Palestina. Begitu pula dengan Mesir, meskipun merupaakn negara

sesame pendiri Non Blok. Kedua negara bersama memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama khususnya Gerakan Non Blok (Steenbrink, 1984: 4).

Di sisi lain hubungan bilateral Indonesia Asia barat lebih banyak terjalin dengan negara Mesir. Bagi Indonesia, Mesir diistimewakan karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan pembaharu Islam di Indonesia (Muhammadiyah, misalnya) adalah gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir.

Di sisi lain Indonesia ingin berperan aktif dalam memecahkan krisis Teluk. Namun hingga berakhir Perang Teluk, Indonesia tidak mengambil perang berarti, karena hanya terbatas melakukan berbagai seruan damai, namun tidak pernah terdokumentasi keterlibatan langsung dalam menangani masalah itu. Para pemerhati dan pelaksana kebijakan luar negeri Indonesia berpendapat, keterlibatannya dalam mengatasi masalah di Teluk Parsi akan menghadapi kesulitan, karena Indonesia adalah "pihak luar" dalam konflik di kawasan Asia barat hanya akan ada dilakukan jika ada permintaan dari negara-negara yang bertikai.

Al-'Urwat al-Wutsqa diterbitkan di Paris tahun 1884 oleh Jamaludin Al-Afghani diterbitkan di Paris tahun 1884 oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Al-Afghani (1838-1897) dan Abduh (1849-1905) dikenal sebagai toko utama gerakan pembaharuan Islam seluruh dunia. Di Indonesia, gerakan tersbut juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan pemeluk Islam. Lahirnya orgnasiasi Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, yang menghimpun kaum muslim "modernis", tidak terlepas dari adanya pengaruh gerakan Al-Afghani dan Abduh (Roesnadi, 1979: 248).

Sejarah kerjasama lainnya antara Indonesia dan Mesir juga terlihat saat Mesir mengakui kedaulatan Indonesia, secara de-facto dan de-jure, pada tahun 1947, yang menjadikan Mesir negara pertama mengakui Indonesia. Hal tersebut juga banyak ditentukan oleh faktor keyakinan mayoritas pemeluk Indonesia yang beragama Islam. Sedangkan salah satu pelaku yang memainkan peranan penting dalam proses pengakuan Mesir adalah para pelajar Indonesia di Mesir, khususnya yang tergabung dalam Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia (Sihbudi, 2007: 14).

Secara umum, hubungan Indonesia-Mesir selama kurun waktu 1947-1961 berjalan cukup baik. Karena baik Indonesia maupun Mesir menjalankan

hubungan luar negeri dengan prinsip yang sama. Kedua negara juga memiliki persamaan persepsi terhadap masalah kolonialisme/imperialism. Hal ini menjadi sebab utama pentingnya peranan kedua negara dalam rangka pementukan gerakan Non-blok.

G. Penutup

Ada berbagai teori untuk mendalami perkembangan negara-negara Arab di abad modern. Montesqiu beranggapan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin (Duverger,1995: 45). Teori ini diperkuat oleh berbagai bukti bahwa banyak kepentingan Barat pada awal abad 20 yang semakin meningkat khususnya untuk mendirikan pertahanan terhadap lawan dalam perdang dunia. Karl Haushoffer menekankan bahwa "siapa saja yang menguasai daerah jantung maka ia akan menguasai daerah berikutnya bahkan pada akhirnya dunia". Pandangan ini menjadi sangat monumental bagi kaum elite di Jerman untuk mengembangkan konsep leibensraum (teori ruang baru). (Alaydair, 1989: 56).

Bangsa Eropa memiliki satu pemikiran bahwa dengan menguasai jalur perdagangan maka wilayah akan dikuasai sekaligus menguasai dunia. intelektual geografi politik Mc Kinder dari Inggris cenderung menempatkan lingkungan dalam konteks laut. Teori ini kemudian dikenal dengan Rim-land Theory, yang memiliki preposisi bahwa barang siapa bisa membentuk sebuah jaringan antar wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia (Alaydair, 1989: 56).

Dengan berbagai pandangan dapat dipahami bahwa perkembangan Asia Barat Modern dari nasionalisme hingga konflik yang melanda tidak lepas dari kepentingan Barat, sama halnya dengan perkembangan bangsa kita saat ini. Maka ada banyak hal yang bisa dipelajari sebagai landasan masa depan bangsa.

Midun, coba ceritakan tentang konflik Timur Tengah

Siap Pak..
Konflik Timur
Tengah sangat menarik
karena terkait isu, geopolitik, ideoogi/agama
dan aktor pak

Kaitannya dengan geo politik misalnya kawasan Iraq yang dekat dengan Teluk Persia, diperebutkan berbagai wilayah, kawasan Terusan Suez, ingin dimiliki Barat untuk kepentingannya. Kawasan yang SDAnya baik, seperti Iran awalnya dikuasai negara Barat yang juga untuk kepentingannya...

Selain itu Konflik agama juga bisa kita lihat antara Arab Israel dan Israel Palestina. Hal ini berdampak bagi dunia hingga sekarang ini

Lalu bagaimana kita mampu mengatasi semua masaah ini, karena harusnya kita turut dalam perdamaian dunia???

Wah bagaimana yaa...
Ini dapat menjadi refleksi kita bersama Pak Fattah karena kehidupan tidak ada yang sempurna maka kita coba belajar dari keadaan Timur Tengah, agar negara kita Indonesia tidak hanya sibuk dengan konflik internal negara namun mau berjuang untuk kepentingan negara

Jadi menurutmu..
Kita harus berkaca
dan perbaiki negara
ini dulu baru bisa bergerak
dalam dunia

Iya Pak, karena jika kita menunjukkan kekompakan kita membangun negara kita juga dapat menjadi contoh bagi negara yang berkonflik. Ayo pak Midun kita mulai dengan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari untuk mencapai nasionalisme seperti yang dicitacitakan negara Arab

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

Pengalaman dalam tugas Kelompok berdasarkan materi sebagai berikut:

1. Turki Pasca Imperium
2. Lahirnya Nasionalisme Turki
3. Konstitusi dan Nasionalisme di Arab Saudi
4. Perjuangan dan Pergolakan di Yaman
5. Lahirnya Nasionalisme Mesir dan Kepentingan Barat
6. Kemerdekaan Suriah dan Libanon 1941
7. Pendudukan Iran dan Perjuangan Kemerdekaan Iran
8. Pendudukan Irak dan Nasionalisme Irak
9. Konflik Arab-Israel
10. Konflik Israel-Palestina
11. Konflik Israel-Palestina
12. Perang Teluk I
13. Perang Teluk II
14. Perang Teluk III

A. **Membuat Karya Ilmiah**
   1) **Teknik Penulisan**
      - Mahasiswa membuat analisis singkat dengan bahasa sendiri sesuai dengan topic yang ada dalam buku. Sumber tulisan yang digunakan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, minimal 5 sumber buku/ jurnal, tidak boleh mengambil dari web atau blog
      - Diketik dalam kertas ukuran A4, dengan *layout*, 4 cm sisi kiri dan sisi atas, 3 cm sisi kanan dan sisi bawah, jenis huruf *Times New Roman*, ukuran huruf 12 pt, spasi 1.5.
      - Minimal analisis
      - Makalah disertai dengan cover mengikuti format cover karya ilmiah yang baku di Prodi Pendidikan Sejarah.

B. **PPT dan media (Video, dsb)**
   - PPT berisikan poin-poin dari isi makalah yang telah dibuat
   - PPT berisi materi, analisa, dan contoh kasus lewat gambar atau video
   - PPT berisi kuis untuk dijawab bersama, bentuk kuis disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompok

C. **Menggali pengalaman**

   Setelah mendengarkan persentasi analisis topic dari teman, kegiatan dilanjutkan dengan menggali pengalaman diantaranya:
   1) Mengidentifikasi kasus yang sama di belahan dunia termasuk Indonesia sebagai sebab akibat keruntuhan dan kemajuan bangsa
   2) Mengambil nilai positif sebuah strategi negara-negara Asia barat untuk penyelesaian masalah dalam negeri dan luar negeri

KEGIATAN REFLEKSI

1. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkadang negara kita juga terjadi gejolak atau konflik internal yang belum dapat terselesaikan. Kaitkan analisa konflik di Asia barat dengan keadaan yang dialami bangsa ini!
2. Nilai apa saja yang dapat kita ambil dari berbagai konflik yang ada baik di Asia barat maupun di Indonesia!

____

____

____

____

____

____

<u>Kegiatan Menggali Aksi dan komitmen</u>

Serukanlah sikap perdamaian dan rasa nasionalisme…!!

Buktikan dengan foto dalam kotak ini!!!

EVALUASI

TTS ANALISIS KONFLIK TIMTENG
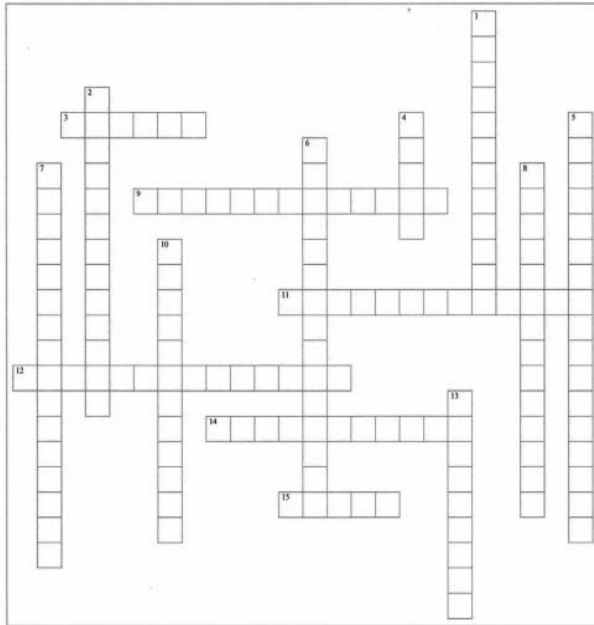
Across

3. Kelompok yang mengembangkan ideologi maayoritas di Israel dan memicu perang dengan Arab dan Palestina
9. siapa saja yang menguasai .... maka ia akan menguasai daerah berikutnya bahkan pada akhirnya dunia
11. Pemimpin Iraq yang ditaktor dan memimpin 3x Perang Teluk
12. Kekuatan dari luar melakukan penetrasi yang mengakibatkan negara-negara di Timur Tengah saling berkonflik
14. konsep dunia Islam yang dilihat dari representasi demografisnya, dan tidak harus tercerminkan dalam reperesentasi kelembagaan formal kenegaraan
15. Ideologi atau aliran Iran

Down

1. Seorang analis yang menyatakan perbatasan artifisial melahirkan masalah dalam proses integrasi atau yang dikenal dengan gejala separatisme dan iredentisme
2. Siapa bisa membentuk sebuah jaringan antar wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia (nama teori)
4. Ideologi atau lairan Arab Saudi
5. Perdana menteri yang sangat keras kepada pejuang Palestina
6. Setiap negara atau masyarakat cenderung akan mencari daerah yang memiliki arti yang sangat strategis
7. Gerakan yang lahir sebagai reaksi terhadap tindakan represif Israel
8. Timur Tengah ditenggarai oleh kekuatan Barat dalam hal ini AS dan Inggris (istilah negara Iraq, Afghanistan,Iran)
10. konsep dunia Islam dari sisi representasi Islam sampai dalam dataran kelembagaan formal
13. Istilah daerah jantung

Tugas Terstruktur:

Analisislah secara sistematis kajian menurut para ahli mengenai sebab-sebab konflik di wilayah Asia Barat!

BAB II

NASIONALISME TURKI PASCA IMPERIUM

2.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai arti penting geografis Turki, Faktor Pendorong lahirnya Nasionalisme Turki, Pengaruh Barat dan Upaya Awal Untuk Memodernisasi Turki, Pemikiran Mustafa Kemal Ataturk, Modernisasi Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Attaturk, Bentuk-bentuk Nasionalisme.

2.2 Relevansi

Setiap individu dapat mendalami perjuangan nasionalisme Turki sebagai bangsa yang teguh bertransformasi demi kemajuan. Secara khusus sebagai titik tolak bangsa Indonesia agar bercermin dari strategi bangsa Turki yang mampu membangun bangsa dan membangun nasionalisme sebagai keutamaan serta cita-cita bersama.

2.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis Turki Pasca Imperium hingga lahirnya Nasionalisme Turki dan mampu menemukan nilai-nilai keutamaan terkait karakter bangsa.

Glosarium

1. *Jazirah Arab* adalah sebuah jazirah (semenanjung besar) di Asia Barat Daya pada persimpangan Afrika dan Asia.
2. *Sekularisme* adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.
3. *Westernisasi* adalah sebuah proses di mana masyarakat berada dalam pengaruh atau mengadopsi budaya Barat dalam berbagai bidang dan nilai-nilai kehidupan

A. Arti Penting Geografis Turki

Turki memiliki latar belakang sejarah yang panjang karena Turki pernah menjadi ajang perebutan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan, seperti Kerajaan Romawi Timur atau Bizantium, Dinasti Seljuk, Dinasti Ottoman hingga akhirnya menjadi Turki yang modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk. Transisi perpindahan kekuasaan tersebut yang mengakibatkan Turki memiliki kekayaan khasanah berbagai peradaban.

Periode Islam di Turki dimulai pada masa kekuasaan Dinasti Seljuk dan Dinasti Ottoman. Dinasti Turki Utsman didirikan oleh Bani Utsman. Pemerintahan pada masa Kekaisaran Utsmani kekuasaannya berlangsung kurang lebih selama enam abad. Awal periode keemasan Dinasti Ottoman ialah ketika pasukan Turki Ottoman berhasil menaklukan ibukota Bizantium yaitu Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan ibukota Konstantinopel ini mengukuhkan status Kekaisaran Turki Utsmani sebagai kekuatan besar khususnya di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada masa inilah pemerintah Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat.[1] Bahkan sepeninggal Khulafa'ur Rasyidin[2], Turki menjadi Khilafah Islamiyah di bawah kekuasaan Dinasti Utsmaniyah. Wilayah kekuasaan Dinasti Utsmaniyah pada masa kejayaan meliputi Jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara. Namun, akibat dari perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing pada akhirnya meruntuhkan Kekaisaran Turki Utsman(Cizre, 2008: 102).

Selama periode kekuasaan Kekaisaran Utsmani, sultan yang memimpin berjumlah 36 orang sultan. Sultan yang pertama kali memimpin pada periode Kekaisaran Utsmani adalah Sultan Usman. Awal mula sebelum Kekaisaran Utsmani menguasai wilayah Turki, Usman I menjadi pemimpin di wilayah Eskisehir.[3] Selanjutnya Usman I memperluas wilayahnya sampai

---

[1] Pengaruh Islam ini diwarisi oleh dinasti-dinasti sebelumnya. Setelah wafatanya Muhammad SAW dilanjutkan oleh Khulafa'ur Rasyidin. Selanjutnya Islam terus berkembang luas pada masa Dinasti Umayah, Dinasti Abbasiyah, baru setelah itu periode Dinasti Utsmaniyah

2 Khulafa'ur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab,Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintah yang islami.

[3] Wilayah Eskisehir awal mulanya merupakan hadiah pemberian Kesultanan Seljuk

ke batas wilayah Kerajaan Bizantium yang kemudian memindahkan ibukota kesultanan ke kota Bursa,[4] dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan awal politik kesultanan tersebut(Anwar, 1989: 124).

Sepeninggal Usman I, kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah kemudian merambah sampai ke bagian Timur Mediterania dan Balkan. Pada masa ini Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode penaklukkan dan perluasan wilayah dengan memperluas wilayahnya sampai ke Benua Eropa dan Afrika Utara.

B. Faktor Pendorong lahirnya Nasionalisme Turki

Gambar 2.1 Peta kekuasaan Kekaisaran Ottoman (Wiki.com)

Kekuasaan Kekhalifahan Ottoman meliputi daerah sekitar laut Tengah dan bagian utara negara-negara Arab. Wilayah itu semakin menyempit seiring dengan kemunduran Ottoman. Mustafa Kemal kemudian menetapkan wilayah bangsa Turki berada di negara Turki sekarang**.**

Kemunduran Turki Utsmani sejak abad ke-17 dan kekalahannya dari bangsa Barat mendorong para penguasa dan kaum intelektual untuk bermawas diri dan melakukan usaha-usaha rekonstruksi dengan model

kepada Ertugrul, ayah Usman I, karena jasa Ertugrul yang membantu Dinasti Seljuk pada peperangan melawan kekaisaran Romawi. Selanjutnya sepeninggalan Ertugrul pada tahun 1281, Osman I menjadi pemimpin wilayah tersebut lalu pada tahun 1299 mendirikan Kesultanan Utsmaniyah.

[4] Bursa merupakan kota yang terposisi di wilayah Turki bagian barat.

baru. Usaha-usaha ini diilhami oleh kemajuaan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara Eropa Barat setelah terjadinya Revolusi Industri yang melahirkan sains dan tekonologi modern.

Turki pada masa sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius, pada abad ke-19 sudah terdapat tiga golongan pembaharuan, pertama golongan Barat yang ingin mengambil peradaban Barat sebagai dasar pembaharuannya, golongan kedua menjadikan Islam sebagai dasar pembaharuan, dan yang ketiga tidak mendasari pembaharuannya kepada dua unsur I atas, akan tetapi nasionalis Turkilah yang menajdi dasar pembaharuannya. Maka dari berbagai pergolakan itu memunculkan sebab-sebab timbulnya nasionalisme Turki sebagai berikut (Anwar, 1989: 124):

1. Kekuasaan Turki Usmani yang semakin merosot.
2. Adanya pengaruh dari Revolusi Prancis dengan semboyannya *liberte, egalite*, dan *fraternite.*
3. Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.
4. Kegiatan bangsa Barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki.

C. Pengaruh Barat dan Upaya Awal untuk Memodernisasi Turki

Pada masa awal meletusnya Revolusi Prancis sampai penghujung 1830-an Turki mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang, sebagian besar aspeknya berkaitan dengan perubahan hubungan antara Kerajaan Usmani dan Eropa. Semenjak itu Turki mulai mengalami pembaharuan – pembaharuan oleh para penguasa antara lain:

1. Reformasi *“ Nizam- I Cedid”*

Penguasa pertama yang memprakarsai pembaharuan di Turki ialah Sultan Salim III (1789-1807). Diketahui secara luas bahwa ia telah menunjukan perhatiannya pada dunia di luar Istana dan Eropa. Ia juga bekorespondensi dengan Louis XVI di Prancis dalam modelnya dan ia mengumpulkan orang – orang disekitarnya dari berbagai gagasan yang bersifat Eropa dengannya. Ketika ia naik tahta, ia juga harus memusatkan perhatiannya pada perang dengan Rusia selama tiga tahun. Tahun 1792

situasi militer Turki tidak mendukung keadaan Turki dan akhirnya Rusia dan kerajaan Usmani harus menerima Inggris dan Prusia sebagai juru penengah, yang menghasilkan perjanjian Jassy yang pada dasarnya yaitu konfirmasi Perjanjian Kucuk Kaynarca yaitu beberapa perolehan teritorial tambahan bagi Rusia di pantai Laut Hitam (Zurcher, 2003: 18).

Tak lama setelah perjanjian tersebut Sultan Selim II membuat program reformasi yaitu *Nizam-i Cedid* (orde baru) yang memiliki tujuan meningkatkan kekuatan negara untuk melawan musuh eksternal terutama Rusia dan musuh Internal. Salim berusaha memperkuat aparatur negara khususnya korps militer dan sistem perpajakan. Namun reformasi ini ditentang oleh kelompok militer Jannisary. Pada mei 1807 pasukan Janissary juga melakukan pemberontakan agar program reformasi tersebut dilengserkan (Zurcher, 2003: 23)

2. Tanzimat

Tanzimat adalah pembaharuan Turki yang ada pada masa kepemimpinan sultan Abd al-Majid (1839-1861) yang diperkenalkan kedalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkan dekalarasi Gulkhane, Khatt-i Syerif Gulkhane pada 3 Nopember 1839. *Tanzimat* berakhir saat kepemimpinan Al abd Hamid II pada tahun 1880 (Mughini, 1997: 125). Dengan adanya *Tanzimat,* para negarawan Usmani bermaksud untuk menata kembali administrasi Turki dan untuk menegakkan hukum di Turki. Melindungi segenap keselamatan jiwa, kehormatan dan harta benda seluruh rakyat Turki dan menjamin persamaan hak antara muslim dengan non muslim dibawah naungan hukum(Cizre, 2008: 102).

Tokoh lain dalam era ini adalah Mustafa Rasyid Pasya, perkenalannya dengan dunia barat pada tahun 1834 saat ia menjadi duta besar di Paris dan juga di Italia. Ia melihat kemajuan peradaban di Eropa dan sekembalinya dari London ia mengambil inisiatif dalam suatu perubahan yang dikenal dengan *Tanzimat.* Tokoh lain yaitu Mehmed Sadik Rifat Pasya. Untuk mncapai Turki yang maju gagasanya ialah pertama, Turki menjadi peradaban modern apabila menciptakan suasana damai dan menjalin hubungan baik dengan Eropa. Kedua, Turki menjadi negara yang makmur apabila meninggalkan pemerintahan yang absolut. Meskipun Usmani telah berjuang mereformasi namun perlahan Imperium Turki kehilangan kekuasaannya.

3. Usmani Muda

Tazimat melahirkan tiga golongan masyarakat kritis. Pertama golongan Tradisional, kedua golongan intelektual dan golongan ketiga yang berkeinginan menghapus Sultan sebagai sebuah kekuatan politik(Mughini, 1997: 132). Kelompok intelektual dikenal dengan Usmani muda, kelompok ini terkenal padaakhir periode *Tanzimat*. Mereka adalah kelompok pertama yang menggabungkan ide ini dengan Islam. Mereka tidak menentang monarki, mereka hanya ingin mereformasi untuk menyelamatkan kerajaan (Karaspahi, 2009: 47). Panangan politik mereka banyak dipengaruhi oleh paham sekuler dan revolusioner tthadap ajaran islam tradisional. Tokoh yang terkenal Namik Kemal dan Midhat Pasya.

Menurut Harun nasution, kegagalan kelompok ini karena belum mapannya golongan menengah yang terdiri dari kaum terpeajar ala barat dan berekonomi kuat yang mendukung mereka. Ide konstitusinya terlalu tinggi dan belum terjangkau apalagi dipahami oleh masyarakat Turki. Maka dari itu ketika Usmani Muda ditangkap pemerintah, rakyat terlihat pasif dan tidak bereaksi (Karaspahi, 2009: 138).

4. Turki Muda

Turki Muda di bagi menjadi dua kelompok kepemimpinan, yang pertama dipimpin Ahmad Reza yang menghendaki sultan yang kuat pemusatan pada unsur muslim Turki. Yang kedua dipimpin Sabahedin yang menekan desentralisasi pemerintah usmani dan menghendaki sebuah masyarakat federasi dengan pemberian otonom bagi warga kristen dan kaum minoritas (Lapidus, 2000: 79). Kelompok ini kelompok pertama yan merancang indutrialitas dengan disahkannya undang-undang industri *Law for Encoragement of Industry,* tahun 1909 dan diperbarui tahun 1915. Dibidang pendidikan wanita memperoleh pendidikan lebih tinggi. Pada era Tanzimat wanita memperoleh pendidikan tingkat dasar pada era ini wanita memperoleh pendidikan tingkat menengah. Tahun 1917 disahkan undang-undang keluarga (*family law*) yang merupakan selangkah lebih maju bagi kaum wanita memperoleh haknya.

Kelompok Turki mungkin memang gagal dalam memberikan pemerintahan yang konstitusional. Meskipun demikian mereka juga berhasil melemahkan pemerintahan pusat di Istambul (Mughini, 1997: 140).

D. Pemikiran Mustafa Kemal Ataturk

Periode modern dimulai pada tahun 1923 M setelah Kekaisaran Turki Utsmani mulai mengalami keruntuhan pada Perang Dunia I. Periode revolusi di Turki pertama kali dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk.[5]

Gambar 2.1 Mustafa Kemal Ataturk
Sumber: Wikipedia.org

Mustafa Kemal adalah seorang pemimpin nasionalis Turki, pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Salonika (sekarang Thessalonika) di tempat yang saat itu adalah Kekaisaran Ottoman. Ayahnya adalah seorang pejabat kecil dan kemudian menjadi pedagang kayu.

[5] Mustafa Kemal atau yang lebih dikenal dengan Ataturk, dilahirkan pada tahun 1881 di Salonica (kini Yunani). Ayahnya bernama Ali Reza Efendi, seorang pegawai pabean, sedangkan ibunya bernama Zubeyde Hanum, seorang Ibu rumah tangga. Pada tahun 1951 Kemal Ataturk muncul sebagai pahlawan militer di Dardanelles-Gallipoli yang kemudian pada akhirnya melalui proses kehidupan yang panjang mengantarkan Ataturk menjadi presiden pertama Republik Turki. Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk Berakhir pada tahun 1938 ketika Ia meninggal dunia akibat radang hati yang disebabkan oleh kecanduan minuman keras dan meninggal pada usia 57 tahun (Burak Sansal, Ataturk and the Birth of modern Turkey")

Ketika Mustafa berusia 12 tahun, dia dikirim ke sekolah militer dan kemudian ke akademi militer di Istanbul, lulus pada tahun 1905. Pada tahun 1911, dia bertugas melawan orang-orang Italia di Libya dan kemudian di Perang Balkan (1912 - 1913). Dia membuat reputasinya militer menolak invasi Sekutu di Dardanelles pada tahun 1915. Pada bulan Mei 1919, Mustafa memulai sebuah revolusi nasionalis di Anatolia, mengorganisir perlawanan terhadap pemukiman damai yang diberlakukan di Turki oleh Sekutu yang menang. Hal ini terutama difokuskan pada upaya melawan Yunani untuk merebut Smirna dan daerah pedalamannya.

Kemenangan atas orang-orang Yunani memungkinkan dia untuk memastikan revisi kesepakatan damai dalam Perjanjian Lausanne. Pada tahun 1921, Mustafa mendirikan pemerintahan sementara di Ankara. Tahun berikutnya Kesultanan Ottoman secara resmi dihapuskan dan, pada tahun 1923, Turki menjadi sebuah republik sekuler dengan Mustafa sebagai presidennya. Dia membentuk rezim partai tunggal yang berlangsung hampir tanpa henti sampai tahun 1945.

Pembaharuan dan Nasionalisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal tidak begitu saja diterima oleh rakyat Turki. Ia memiliki pandangan politik yang matang untuk membangun Turki. Pandangan itu diperoleh dari pendidikan militer semi Eropa saat Kemal diutus sebagai komando militer. Pandangan politik yang dijadikan sebagai landasan reformasi dan modernisasi Turki kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip kemalisme. Prinsip-prinsip itu sebagai berikut(Nasution, 1982: 136).:

1. Republikanisme

Hal ini tidak diartikan sebagai penggantian Sultan oleh Republik, akan tetapi penghapusan keseluruhan sistem politik Usmani. Pemerintahan yang baru didasarkan pada kedaulatan rakyat. Republikanisme merupakan dasar ideologi yang fundamental bagi negara Turki modern dan merupakan wujud dari perjuangan Kemal atas perlawanannya terhadap kelompok yang mendukung kekuasaan absolut sultan.

2. Sekularisme

Sekularisme merupakan produk *Renansiace* zaman Eropa yang diadopsi oleh Kemal untuk melepaskan hegemoni agama atas segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan prinsip ini, kemal mengehendaki

pemisahan urusan dunia dan urusan agama. Menurutnya, sekularisme barat telah berhasil memajukan mereka, sehingga Turki dipandang perlu untuk mengikuti jejaknya. Aspek utama dari proses sekularisasinya adalah penghapusan khalifah/sultan (Brockelman, 1974: 150).

3. Populisme

Populisme menjadikan martabat rakyat diakui, karena pemerintahan merupakan milik rakyat, bukan penguasa. Dengan begitu, semua rakyat tanpa melihat latar belakangnya, mempunyai hak yang sama untuk menduduki sebuah jabatan. Pada prinsipnya pemerintahan merupakan dari dan oleh rakyat.

4. Nasionalisme

Dengan prinsip ini, Mustafa mempersempit cakupan pembaharuan Turki yang luas wilayahnya mencakup wilayah kerajaan Turki menjadi Turki sebatas geografisnya, yaitu sebagian wilayah kekuasaan kerajaan Usmani yang didalamnya terdapat mayoritas bangsa Turki. Kemal mengeluarkan Islam dari *frame* nasionalismenya dan mengedepankan Turki sebagai suatu bangsa yang lebih condong pada kriteria kebudayaan dan bahasa.

5. Statisme

Secara terminologinya, merupakan satu paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. Namun prinsip ini oleh Kemal ditunjukan sebagai dasar ekonomi Republik Turki yang praktiknya menunjukan sistem intervensi negara terhadap semua aspek kehidupan demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya ialah untuk memperbaiki kesulitan ekonomi Turki setelah perang kemerdekaan yang menguras banyak biaya.

6. Reformisme

Menurut pandangan Kemal, modernisasi dan transformasi Turki menjadi sebuah negara maju dengan mengambil kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa. Di sisi lain, reformisme dimaksudkan untuk memerangi kebodohan dan ketahayulan masyarakat Turki oleh pengaruh agama.

E. Modernisasi Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk

Setelah terbentuknya Republik Turki, membuka jalan yang lebar bagi Mustafa Kemal untuk melakukan pembaruan-pembaruan yang diinginkannya. Dasar pemikiran pembaruan Mustafa Kemal antara lain westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme (Nasution, 1982: 149). Usaha yang pertama dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah mengambil seluruh peradaban Barat untuk diwujudkan di negara Turki (Nasution, 1982: 147). Usahanya itu pernah diungkapkan dalam salah satu pidatonya yang mengatakan bahwa kemajuan hidup di dunia peradaban Modern menghendaki dari suatu masyarakat supaya mengadakan perubahan dalam diri sendiri. Di Masyarakat Turki harus diubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala kegiatan yang reaksioner harus dihancurkan (Nasution, 1982: 148).

Sebagai tindak lanjut dari westernisasi, maka di Turki harus dilakukan sekularisasi seperti yang pernah dilakukan di Barat. Sekularisasi tersebut merupakan upaya pemisahan agama dari politik, yang didalamnya terkandung pembebasan institusi-institusi negara, struktur hukum dan sistem pendidikan dari pengaruh agama tegasnya pengisolasian agama semaksimal mungkin dari kehidupan sosial dan turkisasi Islam (Prezet: 173). Dalam perkembangannya, sekularisasi diresmikan sebagai salah satu landasan ideologi modernisasi Turki pada tahun 1937 dan sekaligus menjadikan Turki sebagai negara sekuler.

Mustafa Kemal meluncurkan sebuah program reformasi sosial dan politik revolusioner untuk memodernisasi Turki. Reformasi ini mencakup emansipasi wanita, penghapusan semua institusi Islam dan pengenalan kode hukum, pakaian, kalender dan alfabet Barat, menggantikan aksara Arab dengan bahasa Latin. Di luar negeri dia mengejar kebijakan netralitas, membangun hubungan persahabatan dengan tetangga Turki. Pada tahun 1935, ketika nama keluarga diperkenalkan di Turki, dia diberi nama Mustafa, yang berarti ‘Bapak orang-orang Turki’. Dia meninggal pada tanggal 10 November 1938.

Tokoh-tokoh lain yang mendukung modernisasi Mustafa ialah Midhat Pasha, Rasjid Pasha, dan Ali Pasha. Pada tahun 1906, dibawah pimpinan Mustafa Kemal berdirilah perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan dan pada tahun l908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda(Prezet: 170).

Berikut adalah tujuan dari Gerakan Turki Muda;

1. menyelamatkan Turki dari keruntuhan total;
2. menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat;
3. mengadakan perbaikan sosial, ekonomi dan budaya;
4. mengadakan pembaharuan organisasi pemerintahan.

Keinginan Mustafa Kemal dalam mewujudkan modernisasi Turki sebagai negara sekuler dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghapus lembaga kesultanan pada bulan November 1922. Ketika itu, untuk tidak terjadinya dualisme dalam pemerintahan yaitu Raja Turki disatu pihak dan Pemerintah Negara di pihak lain, maka jabatan khalifah harus dihapuskan. Walaupun penghapusan khalifah melalu perdebatan yang sengit di Majelis Nasional Agung, akhirnya Sultan Abdul Hamid di paksa meninggalkan Turki (Nasution, 1982: 150).

Pada tahun 1924, Mahkamah Syari'ah dan undang-undang Syari'at Islam dihapus dan diganti dengan *Western Legal Code,* yaitu undang-undang sipil Swiss, hukum pidana model Itali dan undang-undang perdagangan model Jerman, sedangkan masalah-masalah perorangan dimasukkan ke dalam undang-undang perdata Eropa (Brockelman, 1974: 150).

Dalam bidang pendidikan pada tahun 1924 disahkan UU tentang penyatuan pendidikan berisikan:

1. Menghapus segala bentuk pengawasan atas sekolah-sekolah oleh lembaga Islam, tugas pengawasan diserahkan kepada kementerian pendidikan
2. Sedikit demi sedikit pelajaran agama dikurangi dari kurikulum pendidikan sampai akhirnya dihapus total pada tahun 1935 (Syadzali, 1990: 226).
3. Selain itu dilakukan pula penutupan madrasah-madrasah, penghapusan pelajaran bahasa Arab yang terdapat dalam kurikulum sekolah dan ditukar dengan Latin (al-Hasan,al-nadawi, 1978: 56).

F. Bentuk-bentuk Nasionalisme

Diawali dengan munculnya gerakan Turki Muda, yang dipimpin oleh Kemal Pasha, Rashid Pasha, Fuad, Mamik Kemal, dan Ali Pasha. Lahir sebagai reaksi terhadap Sultan Hamid II yang absolut. Sifat gerakannya sangat revolusioner. Ketika Turki kalah dalam perang di Balkan maka

gerakan Turki Muda mengadakan kudeta tahun 1913, yang dipimpin oleh Anwar Bey. Pemerintah dipegang oleh Anwar Bey, sedangkan Sultan hanya sebagai lambang yang hanya mengurusi keagamaan (Prezet: 172).

Dalam Perang Dunia I Turki memihak pada Jerman karena berselisih dengan Rusia yang menjalankan Politik Air Hangat. Terjadilah perang di Dardanella antara Turki dengan Sekutu. Dardanella dapat dipertahankan oleh Turki, di bawah komando Kemal Pasha, yang disebut Pahlawan Gallipoli. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Kemal Pasha menjadi Presiden Republik Turki. Melancarkan beberapa program di antaranya (Mughini, 1997: 140):

1. menyusun UUD baru;
2. melaksanakan ekonomi Etatisme, yaitu produksi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak diatur pemerintah dan swasta tetap diberi peranan;
3. huruf Arab diganti oleh huruf Latin;
4. melaksanakan pemerintahan sekuler (tempat ibadah hanya sebagai pusat kegiatan agama);
5. pengadilan agama dilarang dan diganti dengan sistem pengadilan modern.
6. dilarang poligami;
7. pakaian tradisional diganti dengan pakaian barat;
8. setiap orang diwajibkan memiliki nama keluarga

Salah satu perubahan yang paling mendasar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah dihilangkannya peranan agama dalam kehidupan kenegaraaan dan kehidupan keseharian. Pemakaian huruf Arab digantikan dengan huruf Latin, bahkan bunyi adzan pun diubah ke dalam bahasa setempat. Perubahan-perubahan tersebut memang mempengaruhi Turki, namun perubahan itu juga menyakiti umat Islam yang ingin mempertahankan agamanya menjadi prinsip hidup (Syadzali, 1990: 226).

Setelah Kemal Ataturk meninggal pada 1938, digantikan oleh Ismet Inonu. Pada waktu itu timbul perlawanan dari kaum intelektual Islam. Mereka menentang moderenisasi ala Barat. Dalam PD II, Turki tidak melibatkan diri. Namun, menjelang usainya perang Turki bergabung dengan Amerika Serikat. Uni Soviet menuntut sebagian wilayah Turki sebelah barat dan meminta izin Turki untuk mendirikan pangkalan militernya di sepanjang teluk. Untuk

mengatasinya Turki meminta bantuan militer Amerika Serikat dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat mendapat izin mendirikan pangkalan militer. Setelah Perang Dunia II selesai, para pemimpin Turki berusaha memodifikasi konsep pembaharuan Kemal Pasha dengan cara menggali nilai-nilai Islam sambil tetap menentang imperialisme Barat (Mughini, 1997: 140).

Pada 1950 diadakan pemilihan anggota parlemen. Partai Demokrat berhasil mengalahkan Partai Republik yang didirikan Kemal Ataturk. Dengan kemenangan ini Celal Bayar duduk sebagai presiden dan Adnan Menderes sebagai perdana menteri. Sepuluh tahun kemudian timbul kekacauan politik di dalam negeri yang menyebabkan kelompok militer turun tangan dan mengambil alih kendali kekuatan. Kebijaksanaan Bayar dianggap terlalu jauh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh Ataturk. Adnan Menderes diganjar hukuman gantung dan Presiden Bayar dihukum seumur hidup, namun akhirnya dibebaskan.

Tahun 1961 Turki memberlakukan konstitusi baru untuk pertama kali Turki mengadakan pemilihan umum yang bebas. Sekalipun tidak berhasil mendapat suara mayoritas, Partai Republik berhasil memenangkan pemilihan ini. Tahun 1963 Yunani mengklaim Siprus sebagai wilayahnya. Akibatnya timbul perselisihan dengan Turki. Perang dapat dihindari setelah PBB turun tangan. Namun, setahun kemudian Yunani mengirimkan tentaranya ke Siprus dan mendirikan pemerintahan sendiri, sehingga menyebabkan pertempuran dengan tentara Turki. Tahun 1978 embargo ini dicabut. Menjelang tahun 1980 timbul lagi kerusuhan politik di dalam negeri yang menyebabkan kalangan militer mengambil alih lagi kekuatan politik. Konstitusi baru diberlakukan lagi tahun 1982. Setahun kemudian Turki mengadakan pemilu yang akhirnya dimenangkan oleh Partai *Mother Land* (Syadzali, 1990: 226).

G. PENUTUP

Pembaharuan dan nasionalisme negara Turki menjadi penanda bahwa ada ketegasan dan keberanian dari para pembaharunya salah satunya Mustafa Kemal Ataturk. Atas pendudukan sekutu atas Turki, reaksi segera muncul dari para pembaharu dimana perang kemerdekaan Turki tahun 1921-1922 menandai berakhirnya kekuasaan asing baik secara de-facto maupun de-jure. Adapun kekuatan yang menandainya ialah suatu perundingan yang dilakukan di kota Lausanne (24 Juli 1923).

Berikut merupakan isi perjanjian Lausanne:

1. Thracia Timur (daerah sekitar Konstantinopel) dikembalikan kepada Turki.
2. Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bansga Turki: Arabia merdeka, Lybia diserahkan ke Italia; Mesir, Palestina, Trans-Jirdania, Irak, Cyprus diserahkan ke Inggris; sedangkan Syria, Libanon. dserahkan ke Inggris
3. Bosporus, Marmora dan Dardanella terbuka untuk semua kapal asing
4. Semua hak-hak ekstra-teritorial dari bangsa asing dihapus
5. Turki tidak perlu mengurangi angkatan perangnya
6. Turki tidak usah membayar kerugian

Pembaharuan merupakan hal yang sulit dan beresiko. Negara Indonesia pernah mengalami hal yang sama di awal pemerintahan, maka tugas setiap orang untuk belajar dari pengalaman dan bercermin untuk berusaha melakukan yang terbaik bagi diri, sesame, bangsa dan negara.

KEGIATAN MENGGALI AKSI

AKSI KELOMPOK

1) Tentukanlah topic dalam diskusi mengenai perjuangan kemerdekaan Turki
2) Buatlah sebuah meme atau quote dengan menggunakan berbagai aplikasi baik dari *play store* atau *searching google* semenarik mungkin

PENGUMPULAN HASIL

1) Meme atau Quote disharkan di Media Sosial dan hasilnya (notifikasi/comment)dapat discreenshoot dan dikirim ke Exelsa
2) dikirim dengan format.jpg/.PNG ke Exelsa yang sudah di beri laman tersendiri

KEGIATAN REFLEKSI

Menurutmu apakah kunci keberhasian itu?

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
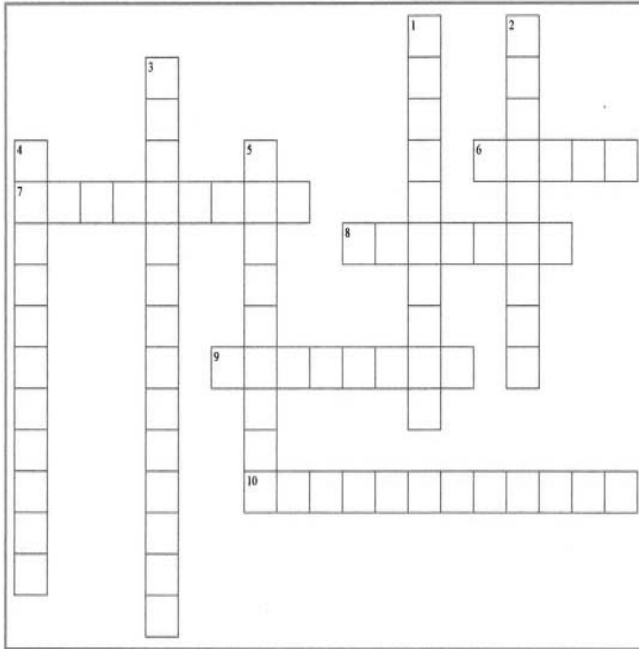
Across

6. Kota yang terletak di wilayah Turki bagian barat.
7. Wilayah yang awal mulanya merupakan hadiah pemberian Kesultanan Seljuk kepada Ertugrul, ayah Usman I
8. Ideologi Mustafa Kemal
9. Suatu faham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya
10. Pejuang nasionalis Turki

Down

1. sebuah negara maju dengan mengambil kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara yang telah lebih dulu maju
2. Semua rakyat tanpa melihat latar belakangnya, mempunyai hak yang sama untuk menduduki sebuah jabatan
3. Ibu Kota Bizantium tahun 1453
4. Produk Renansiace zaman Eropa yang diadopsi oleh Kemal untuk melepaskan hegemoni agama atas segala aspek kehidupan bermasyarakat
5. Nama Turki sebelum menjadi negara pada masa Perang Salib

<u>Tugas Terstruktur:</u>

Analisislah apa yang membuat Turki merubah tradisi dalam pemerintah

BAB III

AKAR NASIONALISME DI NEGARA-NEGARA ARAB

3.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai faktor Pendorong Lahirnya Nasionalisme, bentuk-bentuk Nasionalisme Arab, dan Para Pelopor Modernisme Arab

3.2 Relevansi

Setiap pribadi mampu bertanggung jawab penuh terhadap bangsa dan negara dengan berupaya menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan bangsa-bangsa Arab yang berjuang menyatukan gagasan dan persepsi dalam membangun suatu negara yang terbebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

3.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis Konstitusi dan Nasionalisme di Negara-Negara Arab serta mampu menghargai jati diri bangsa sebagai sebuah identitas nasional.

Glosarium

1. *Konservatif* adalah bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku
2. *Moderat* adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah: pandangannya cukup, ia mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.
3. *Islah* dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; mengajurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berprilaku sebagai orang suci (baik).
4. *Tirani* adalah kata ini dikaitkan dengan penguasa tunggal yang memerintah secara brutal dan menempatkan diri dan golongannya di atas kepentingan rakyat banyak.
5. *Tiran* adalah seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan Tirani.

A. Faktor Pendorong Lahirnya Nasionalisme

Asal mula dan pertumbuhan kesadaran nasional Arab tidak lepas dari masa pra-Islam. Riwayat bangsa Arab di masa pra-Islam sebagian besar merupakan suatu catatan dari perjuangan mereka yang tiada henti-hentinya untuk mempertahankan kehidupan melalui penyesuaian diri dengan alam dan masyarakat. Bahasa sebagai faktor untuk membentuk dan memelihara kesadaran golongan jelas sekali karena cenderung untuk memajukan perasaan serupa dan suatu kesadaran bahwa mereka itu segolongan (Nuseibeh,1969: 10). Arab pra-Islam bukanlah suatu kesatuan politik, namun membangun kesadaran sosial dan kebudayaan yang mirip kepada kesadaraan kebangsaan terutama sekali karena persamaan bahasa. Syair-syair, peribahasa, tradisi, cerita-cerita yang dinyatakan dalam kesustraan lisan dan yang diteruskan melalui tradisi lisan banyak pengaruhnya kepada perkembangan kesadaran nasionalisme Arab (Nuseibeh,1969: 11).

Gambar 3.1: Napoleon Bonaparte (Sumber: magnoliabox.com)

Struktur suatu kebangsaan Arab sudah berkembang dengan baik di dalam dua zaman sebelumnya yang telah kita bahas. Ketika Napoleon menyerbu Mesir, sebagai pembuka pintu dan tanda permulaan zaman

baru, negara-negara Arab membangun kesadaran nasional seperti hal nya di Eropa. Kedatangan Napoleon mulai menimbulkan serentetan peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan ini dalam keseluruhannya merupakan nasionalisme Arab modern. Kebangkitan modern di dunia Arab bermula dengan didudukinya Mesir oleh Prancis (Syadzali,1990: 225).

Sebelum itu Negara-negara Arab hampir semuanya tidak menyadari bahwa kemajuan pesat yang telah dialami oleh barat di abad-abad berikutnya, semenjak perjumpaan mereka terakhir dengan Barat semasa perang salib. Paham-paham, proses-proses dan teknik-teknik Barat yang membangkitkan jiwa dan juga penemuan kembali karya-karya klasik Arab sehingga menimbulkan gerakan dan reaksi negara-negara Arab (Asia barat sebutan orang Eropa (Nuseibeh,1969: 9).

B. Bentuk-bentuk Nasionalisme Arab

Nasionalisme merupakan suatu rasa yang ada dalam jiwa setia manusia secara individu maupun perseorangan dan semangat membara untuk membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme Arab dalam hal ini adalah semua orang yang berbahasa dan berkebudayaan Arab, berkesetiaan dan berperasaan Arab dan secara pribadi menjadi penduduk Arab(Syadzali,1990: 226).

Dari sudut pandang geografi negara-negara Arab terbentang dari Jabal Thursina di utara hingga Lautan Hindia dan aliran sungai Vildi di selatan. Selanjutnya kawasan Iran dan Teluk Arab di timur hingga Lautan Atlantik di bagian barat. Wilayah ini mencakup Irak, Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, Uni Emirat Arab, Bharain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Oman, Palestina, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko (Nuseibeh,1969: 10).

Negara-negara tersebut menganggap diri mereka adalah bangsa Arab dan dalam usahanya untuk membangun kembali dasar-dasar kehidupan mereka setelah mengalami kemunduran berabad-abad lamanya maka mereka memeluk nasionalisme Arab(Syadzali,1990: 226).

Nasionalisme Arab merupakan kesadaran yang tinggi dari bangsa Arab untuk mengangkat citra bangsanya guna mencapai kesempurnaan kehidupan mereka untuk sepanjang masa. Pada dasarnya Nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan. Gerakan ini berpangkal pada pemikiran yang

berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab, tidak peduli apapun agamanya pada hakikatnya merupakan suatu bangsa dan berkebudayaan yang sama (Al-Qordhawi,1997: 46).

Hazim Zaki Nusaibah mengemukakan bahwa Nasionalisme Arab bertujuan untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab di bawah suatu organisasi politik. Nasionalisme Arab adalah gerakan sekuler, yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor bahasa, faktor tradisi-tradisi sejarah dan faktor kesamaan kepentingannya.

Fase-fase perkembangan nasionalisme Arab, diawali dengan kedatangan bangsa Barat di dunia Arab yaitu masuknya Napoleon pada tahun 1798 ke Mesir dengan membawa paham demokrasi, persamaan dan ide kebangsaan. Hal ini membuka pikiran Arab dari pemikirab konservatif dan tradisionil para raja dan para pemuka Islam sehingga mau tidak mau mereka harus berusaha meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali (Al-Qordhawi,1997: 50).

C. Para Pelopor Modernisme Arab

Beberapa cirri khas para pemikir negara-negara Arab sudah terlihat sejak awal tahun 1800-an. Mereka merupakan kaum konservatif yang mempertahankan sifat asli dan tradisi keislaman yang ada di jazirah Arab, bahkan mereka membentuk suatu persekutuan dengan mempertahankan budaya Arab (Philip,2010: 46).

Setelah tahun 1800-an para pemikir Arab mulai datang dari wilayah yang berbatasan dengan negara-negara Arab. Tentu saja para pemikir ini sudah terkena pengaruh budaya dari Barat. Merdeka di antaranya ialah Tahtawi dari Mesir, Al-Afghani dari Turki, Farabi dari Syria dan beberapa pelopor modernisme Arab lainnya. Selain itu, kemerdekaan negara-negara Arab juga tidak lepas dari pengaruh Barat salah satunya peristiwa Revolusi Prancis. Penyerbuan Napoleon sangat berpengaruh terhadap modernisasi Mesir tahun 1798. Negara Mesir pun terbuka terhadap pengaruh Barat, dimana sistem pemerintahan Mamluk diganti dengan lembaga-lembaga Barat (Hitti,2010: 47).

Berbeda halnya dengan modernisasi di Syria, Rezim Ottoman di Syria berakhir tahun 1918. Modernisasi bergerak jauh lebih cepat karena telah dimulai seperempat abad sebelumnya. Salah satu pelopor nasionalisme Syria ialah Farabi. Ia mengemukakan bahwa *"Jika pada suatu ketika filsafat tak ikut serta dalam pemerintahan, meskipun didalamnya terdapat*

segala sifat lainnya untuk memerintah, maka negara idaman akan tetap tanpa penguasa, kepala negara bukanlah manusia sejati, dan negara akan menghadapi kehancuran, dan jikalau tidak ada manusia yang arif seperti kepala negara misalnya, niscaya tak lama kemudian negara akan hancur" (Hitti,2010: 48).

Di Turki reformasi berlangsung setelah 31 tahun pemerintahan Midhat Pasha, yang dipelopori oleh Sultan Abdul Hamit, yang didukung kaum nasionalis Turki untuk mengembangkan pemerintahan secara konstitusional. Kemerdekaan sejatinya kebutuhan setiap orang untuk bebas baik memeluk agama, mengoreksi pemerintahan, dan terbebas dari tirani

Dampak gagasan para pemikir Arab dan diberlaukannya sistem konstitusional bagi sebagian kalangan di antaranya (Hitti,2010: 50):

1. Pemimpin politik nasional tak diberi kesempatan mendapat pengalaman yang diperlukan jika pada saatnya harus memikul tanggungjawab.
2. Pemerintah perwalian (oposisi/ parlemen) memelihara sikap tidak percaya terhadap pemerintahan yang sah. Berakibat pada sikap masyarakat yang anti kesetiaan dan bekerjasama
3. Sikap pemerintahan perwalian mengaburkan pandangan rakyat tentang azas yang dipelihara sebelumnya, jadi masyarakat tidak seutuhnya
4. Selama kekuasaan masih dipengaruhi sistem dan ketergantungan pemerintahan kolonial masyarakat tidak dapat menguji kecakapannya untuk menguasahakan perobahan dalam pemerintahan secara tertib (demokrasi) (Hitti,2010: 50):

a. Abdul Hamid (Sultan Abdul Hamid II)

Dalam tesisnya Deden Anjar menegaskan bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan pembaharu Turki yang mempelopori munculnya lahirnya pergerakan Turki Muda. Turki Muda adalah sebuah gerakan oposisi yang berkembang di periode Tanzimat pada masa pemerintahan. Turki Muda mulai berkembang di Paris oleh orang-orang reformis yang melarikan diri dan bertemu sekelompok kecil pelarian Ustmani konstitusionalis yang termasuk didalamnya Ahmet Riza, putra seorang anggota parlemen Ustmani dan mantan direktur pendidikan di Bursa. Ahmed Riza kemudian diangkat sebagai pemimpin kelompok Turki Muda. (Hitti,2010: 50):

Gambar 3.2: Sultan Abdul Hamid II pembaharu Turki
(Sumber: wikipedia.com)

Pergerakan serupa tumbuh dan berkembang di dalam negeri. Dengan nama yang sama pergerakan tersebut melakukan upaya kudeta pada tahun 1896, namun tidak berhasil sehingga banyak dari mereka yang ditangkap dan dikirim ke pengasingan dalam negeri. Pergerakan konstitusional yang digerakan oleh orang-orang Turki Muda dikerajaan mengalami kemunduran menyebabkan poros pergerakan konstitusional beralih ke Eropa dibawah pimpinan Ahmet Riza (Al-Qordhawi,1997: 46).

Kemerdekaan berpikir, berekspresi, dan berasosiasi yang dihasilkan oleh revolusi konstitusional tidak hanya mengakibatkan timbulnya demonstrasi politik. Peranan kaum nasionalis dalam pemerintahan membuat kaum nasionalis semakin populer dan mendapatkan banyak simpatisan. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan setelah restorasi oleh Sultan Abdul Hamid II tahun 1908 diikuti oleh dua Fraksi dari pergerakan Turki Muda, fraksi liberal dan fraksi nasionalis (Amal,2016: 39).

Kemenangan fraksi kaum nasionalis menjadikan sebagian kursi parlemen diduduki oleh kaum nasionalis dan mempersempit kekuasaan istana. Menempatkan beberapa birokrat kaum nasionalis di parlemen terbukti sukses mendominasi pemerintahan. Kaum nasionalis berhasil menguasai

situasi politik internal Turki Ustmani sejak 1913. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Turki Muda mengarahkan pada sekularisasi di kerajaan Ustmani. Dengan tidak adanya kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Parlemen kepada Sultan, maka secara tidak langsung Sultan telah menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada Perdana Menteri dan parlemen yang telah dibentuknya. Meskipun sistem kesultanan masih berlaku saat itu, namun realitanya fungsi Sultan sudah tidak berjalan dengan baik dan didominasi oleh parlemen(Al-Qordhawi,1997: 46).

b. Al-Tahtawi

Al-Tahtawi di lahirkan pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian Selatan dan Meninggal di Kairo pada tanggal 27 Mei 1873. Negara Mesir juga memiliki tokoh yang menuangkan gagasan modernism ia adalah Rafaah Rafi al-Tahtawi. Dia merupakan salah satu pemikir Arab yang dikirim ke Prancis untuk dilatih dan dididik. Ia mempelajari sistem politik di Prancis, menerjemahkan konstitusi Charles X dengan amandemenya yang digunakan selama pemerintahan Louis Philippe dalam bahasa Arab, ia juga menerjemahkan *code civil* Prancis yang didukung pemerintah Prancis untuk diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tahtawi memilah tradisi politik Prancis agar dapat diterima bangsanya (misalnya tentang azas pembatasan konstitusi yang tidak ada di Mesir, ia berusaha mereformasinya dengan menggunakan azas demokratis). Tahtawi berhasil mengeluarkan azas seperti kemerdekaan beragama, hak untuk melawan tirani dan anti penguasaan yang mutlak. Dampaknya juga terasa karena ia harus berhadapan dengan para pemikir konservatif yang berseberangan (anti Barat). Ia juga berhati-hati agar bangsanya tak terguncang (Hitti,2010: 50).

Ia berasal dari keluarga ekonomi lemah. Harta kekayaan orang tuanya termasuk dalam kekayaan Mesir yang diambil alih oleh Muhammad Ali pada masa kekuasaannya. Di masa kecilnya Al-Tahtawi terpaksa belajar dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika ia berumur 16 tahun, ia memperoleh kesempatan belajar di Al-Azhar Kairo. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar, Al-Tahtawi mengajar di sana selama 2 tahun, kemudian diangkat menjadi imam tentara pada tahun 1824. Dua tahun kemudian ia diangkat menjadi imam mahasiswa-mahasiswa yang dikirim Muhammad Ali ke paris(Amal,2016: 40).

Gambar 3.3: Sultan Abdul Hamid II pembaharu Turki
(Sumber: wikipedia.com)

Dalam masa tugasnya di Paris, ia memanfaatkan waktunya untuk belajar dan menimba pengalaman sebanyak-banyaknya dengan membaca buku-buku sejarah, teknik, ilmu bumi, dan politik karangan Montesquieu, Voltaire, Rousseau Racine. Ia memperoleh banyak kesan selama lima tahun berada di paris sehingga kesan tersebut dituangkan dalam sebuah buku Talkhish Al-Ihriz fi Talkhish Bariz. Buku tersebut selain mengisahkan pengalamanannya selama di Paris, juga mengungkapkan seputar kehidupan dan kemajuan eropa yang dilihatnya di Paris (Nuseibeh,1969: 10).

Selama belajar di Prancis, Al Thahthawi melengkapi wawasan ilmiahnya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ia sempat menerjemahkan 12 buku dan risalah. Sekembali ke Mesir, ia diserahkan jabatan sebagai guru bahasa Prancis dan berbagai Jabaatan Kepala Sekolah, serta jadi Pimpinan Badan Penterjemah UU Prancis. Pengalaman selama di Prancis dan pengalaman kerja tersebut turut membentuk wawasan kependidikan al Thahthawi. Dari pengalaman di Prancis, kemudian ia susun dalam buku sosial politik berjudul Tatchlisih Al Ibriz Ila Talkhis Baris(Amal,2016: 39).

Al-Tahtawi, seorang teoritisi nasionalisme Arab yang paling berpengaruh, Najiyullah menegaskan, "Patriotisme adalah sumber kemajuan dan kekuatan, suatu sarana untuk mengatasi gap antar wilayah Islam dan Eropa." Ia menegaskan bahwa antara ide Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Dua ide tersebut kemudian menjelma menjadi dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan (ukhuwah) Islamiah dan persaudaraan (ukhuwah) wathaniah(Hitti,2010: 50): .

Pemikiran Al Thahthawi mengenai pendidikan tampaknya ada dua masalah pokok yang dinilai penting. Pertama, mengenai pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Pendidikan universal adalah pendidikan harus diberikan kepada segenap golongan masyarakat dan diberikan untuk segala tingkatan usia tanpa membedakan jenis kelaminnya. Al-Thahthawi berpendapat bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mudah dibina dan sekaligus dapat menghindarkan diri masing-masing dari pengaruh negatif. Kedua, pemikiran Al Thahthawi mengenai pendidikan bangsa. Menurut Al-Thahthawi pendidikan bukan hanya terbatas pada kegiatan untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme (Hubb al Wathon) (Husain,1993: 46).

c. Muhammad Rashid Rida

Muhammad Rashid bin Ali Rida bin Muhammad Shams al-Din bin Muhammad Baha al-Din bin Munla Ali Khalifah atau biasa disebut Rida merupakan pelopor pembaharu dari Syria. Ia dilahirkan di Qalamun yaitu sebuah kampung berhampiran Tripoli, Syria pada Jamad al-Awwal 1282/ September 1865 (Adam 1968: 177). Selain itu, ia mendapat pendidikan awal di Kuttab, Qalamun. Pada tahun 1879, ayahnya menghantarnya ke Madrasah Wataniyyah yang didirikan oleh Sheikh Husain Jisr (1845-1909). Rida menggali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang tajam sehingga ia dapat melebihi kemampuan gurunya (Nuseibeh,1969: 12).

Gambar 3.4: Muhammad Rashid Rida
(Sumber: wikipedia.com)

Menjelang akhir abad ke-19 M, berlaku gerakan islah di Mesir yang dipelopori oleh Jamal-al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka menerbitkan majalah al-Urwat al-Wuthqa, untuk menyebarkan gagasan islah yang menjadi gagasan majalah tersebut. Majalah tersebut menyentuh perasaan Rashid Rida sehingga menimbulkan keinginan untuk berjumpa dengan Jamal-al-Din al-Afghani. Oleh karena itu, pada tahun 1893, Rashid Rida menulis surat kepada Jamal-al-Din al-Afghani untuk menjadi murid dan menyertai perjuangannya. Namun begitu, hasrat Rashid Rida tidak berjalan mulus karena pada tahun 1897, tokoh sanjungannya itu meninggal karena kecelakaan kereta (Badawi 1976: 98; Eeman 2002: 915).

Perjuangan Rashid Rida dalam gagasan Pan-Islamisme dan institusi khilafah adalah untuk mempertahankan dan membebaskan umat Islam dari penjajahan Barat. Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Rashid Rida adalah berasaskan sistem khilafah. Sistem ini diperkuatkan lagi dengan prinsip persaudaraan Islam yang menghapuskan ikatan kelompok dan menyusun kesatuan seluruh umat Islam memandangkan umat Islam bersatu di bawah sistem moral, pendidikan dan undang-undang yang sama. Pada mulanya, Ia menyokong polisi yang diperkenalkan oleh Sultan Abdul Hamid. Namun, pendiriannya berubah selepas Sultan Abdul Hamid disingkirkan oleh Turki Muda (Nuseibeh,1969: 10).

d. Abdul Rahman Kawakibi

Abdul Rahman al-Kawakibi memiliki nama lengkap yaitu Abd al-Rahmān ibn Ahmad Bahā‟‟i ibn Mas`ūd al-Kawākibi. Ayahnya bernama Sayid Ahmad Baha‟‟i Ibn Muhammad Ibn Mas‟‟ud al-Kawakibi (1244-1299 H/1829-1882 M) adalah Mufti Antokia. Ia pindah ke Halb, kampung Parsi dan menikah dengan seorang gadis negeri itu sehingga menghasilkan kekeluargaan al-Kawakibi. Keluarga Ali Ibn Abi Thalib di sini bernama Shafiuddin al-Ardabili, karena tinggal di kota Ardabil salah satu kota Azerbaijan, sehingga ia termasuk sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW (Husain,1993: 46).

Gambar 3.5: Abdul Rahman Kawakibi
(Sumber: wikipedia.com)

Dalam konferensi fiktif Ummulal-Qura, seorang delegasi dari Palestina sejak sidang sesi kedua menyatakan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam semua lini kehidupan merupakan akibat dari kemunduran sistem politik pemerintahan yang berkuasa. Sistem politik yang awalnya "demokratis" pada era Khulafah Arrasyidin, bergeser menjadi sistem dinasti (kerajaan) yang pada masa-masa awalnya masih menghargai kaidah-kaidah pokok agama, namun kemudian menjadi kekuasaan yang sama sekali absolut dan pada ahirnya melahirkan pemerintahan yang tiran (Azra,2016: 35).

Untuk menghindari terciptanya pemerintahan yang tiran, Al-Kawakibi mendukung adanya pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini Al-Kawakibi menyatakan bahwa sebuah pemerintahan akan dapat terjerumus kepada tiranisme "apabila pemegang kekuasaan eksekutif tidak mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang kekuasaan legislatif, dan pemegang kekuasaan legislatif tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat, yaitu rakyat yang tahu cara mengawasi dan mampu melakukan evaluasi" (Azra,2016: 36).

e. Gammal Abdul Nasser

Berdirinya negara Mesir tidak lepas dari peran para tokoh pendirinya yang mencanangan garakan nasionalisme dan ukhuwwah secara total. Gamal

Abdul Nasser adalah salah satu *the founding fathers* (selain Tafuik Kamil, Muhammad Ali, Muhammad Naguib) yang bertekat bulat untuk membangun negara tersebut sebagai negara heterogen baik dari segi bangsa, agama, budaya, maupun bahasa. Diantara para tokoh ini, Nasser memilki pengaruh terbesar di negara tersebut. Bahkan hingga ke negara lain termasuk Arab, Asia hingga Afrika (Lapidus, 1999: 121)

Gamal Abdul Nasser lahir di Iskandariah pada tanggal 15 Januari 1918, dan meninggal tahun 1970 akibat serangan jantung. Nasser berasal dari keluarga biasa, ayahnya adalah seorang petani dan merangkap sebagai pegawai rendahan di kantor pos setempat. Masa kecilnya termasuk anak yang beruntung dibading remaja pada umumnya yang hanya mengenyam pendidikan rendah. Nasser dapat menempuh pendidikan tinggi pada Akademi Militer (Nurrudin, 2015: 58).

Gambar 3.6: Gamal Abdul Nazer
(Sumber: wikipedia.com)

Pembaharuan oleh Nasser, terinspirasi oleh kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulunya. Sejak bangsa Mesir Kuno seperti Kaisar Pharao (Ramsec Akbar) hingga pemerintahan Islam (dinasti Fatimiyah yang sempat menggemparkan dunia). Maka gagasan nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai cikal bakal dalam mewujudkan cita-cita luhur yaitu "sebagai kenangan dan realisasi kejayaan masa lalu" (Nurrudin, 2015: 58).

Pada masa pemerintahan Mesir yang pertama di bawah kepemimpinan Muhammad Naguib, Nasser menjabat sebagai panglima militer. Pasca kejatuhan Naguib, pemerintahan pun digantikan oleh Nasser sebagai presiden Kedua Republik Mesir. Ada banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Nasser diantaranya masalah pertahanan, kemanan, sosial, politik, hingga ekonomi khusunya terkait masalah internal maupun eksternal negara Mesir. Dalam bidang ekonomi dan politik Nesser membentuk Republik Persatuan Arab (RPA), menggagas terwujudnya Konferensi Asia Afrika di Bandung dan merancang sistem ekonomi sosialis Islam.

Dalam KAA di Bandung Nasser bersama Soekarno bermaksud menggagas perdamaian di dunia, terutama Asia dan Afrika serta memperjuangkan negara-negara di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Nasser juga menggagas perang Arab-Israel dengan ideologi ekonomi sosialis Islam. Nurrudin (2015: 60) menjelaskan bahwa ideologi sosialisme Arab adalah kesatuan bangsa Arab dalam satu wadah tatanan ekonomi sosialis. Baginya, ekonomi sosialis dipandang lebih dekat dengan semangat ajaran Islam, karena mendorong smenagat kesejahteraan sosial. Gagasannya banyak diterima bansga Arab saat itu, karena dianggap mampu menolong umat dari kesengsaraan akibat penjajahan.

D. PENUTUP

Dari sudut pandang geografi negara-negara Arab terbentang dari Jabal Thursina di utara hingga Lautan Hindia dan aliran sungai Vildi di selatan. Selanjutnya kawasan Iran dan Teluk Arab di timur hingga Lautan Atlantik di bagian barat. Wilayah ini mencakup Irak, Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, Uni Emirat Arab, Bharain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Oman, Palestina, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko (Nuseibeh,1969: 10). Kedatangan Napoleon mulai menimbulkan serentetan peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan ini dalam keseluruhannya merupakan nasionalisme Arab modern. Kebangkitan modern di dunia Arab bermula dengan didudukinya Mesir oleh Prancis (Syadzali,1990: 225).

Pada dasarnya Nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan. Gerakan ini kerpangkal pada pemikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab, tidak peduli apapun agamanya pada hakikatnya

merupakan suatu bangsa dan berkebudayaan yang sama (Al-Qordhawi,1997: 46). Nasionalisme Arab adalah gerakan sekuler, yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor bahasa, faktor tradisi-tradisi sejarah dan faktor kesamaan kepentingannya. Maka ada beberapa tokoh penting yang menggagas nasionalisme di Arab diantaranya Abdul Hamid (Sultan Abdul Hamid II) dari Turki, Al-Tahtawi dari Mesir, Muhammad Rashid Rida dari Suriah, Abdul Rahman Kawakibi dari Arab, Gammal Abdul Nasser dari Mesir, Mustafa Kemal Ataturk dari Turki.

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan bagaimana latar belakang dan hasil perkembangan bangsa-bangsa Arab saat ini berdasarkan sejarahnya.

PENGUMPULAN HASIL

Persentasi di kelas

KEGIATAN REFLEKSI

Bagaimana caranya menjaga potensi yang kita miliki?

____

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI

1
2 3
4 5
6
7
8
9
10
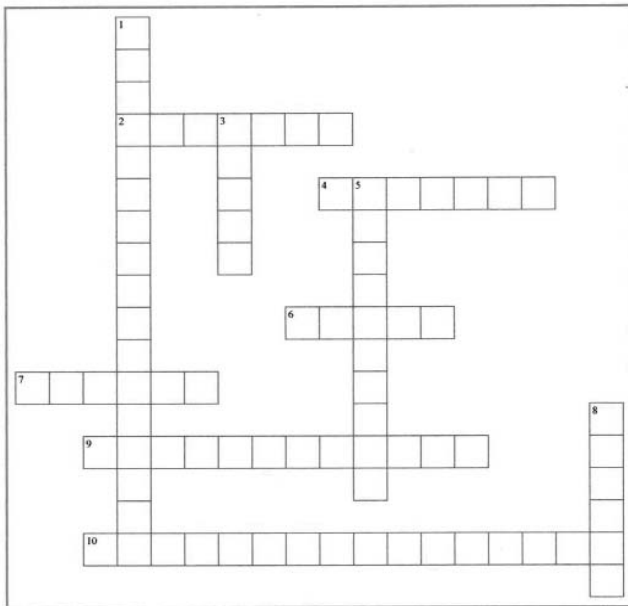
Across

2. Sekelompok partai politik sebagai pihak penentang kebijakan pemerintah pusat
4. Pelopor modernisme dari Mesir
6. Sungai yang ada di selatan jazirah Arab
7. Pelopor nasionalisme dari Syria
9. Suatu paham mengimplementasikan rasa cinta tanah air kepada sebuah negara dengan segenap hati.
10. Peristiwa di Barat sebagai penanda awal modernisasi dan nasionalisasi negara-negara Arab

Down

1. Pelopor gerakan nasionalisme di Timur Tengah, asal negara Barat.
3. Bentuk tradisi lisan yang ada di Arab dan menjadi salah satu budaya Islam.
5. Penggagas konstitusi dari Turki
8. Salah satu faktor untuk membentuk dan memelihara kesadaran kesatuan masyarakat.

<u>Tugas Terstruktur:</u>

Berikan satu persamaan prinsip para penggagas nasionalisme Arab dengan Indonesia!

BAB IV

PERJUANGAN DAN PERGOLAKAN DI YAMAN

4.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai kawasan Strategis Yaman, krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan, Arab Spring di Yaman.

4.2 Relevansi

Setiap individu diharapkan bersikap selektif terhadap berbagai bentuk pemahaman yang dapat memicu disintegerasi bangsa, karena permasalahan internal merupakan awal dari runtuhnya suatu bangsa. Dalam hal ini mampu menganalisis Yaman sebagai tolok ukurnya.

4.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis perjuangan dan pergolakan di Yaman serta mampu menghargai jati diri bangsa sebagai sebuah identitas nasional.

Glosarium

1. *Gerilyawan royalis* adalah Pasukan pendukung pemerintahan monarki.
2. *Patron* adalah pelindung
3. *Perang Saudara* adalah perang internal yang terjadi antara dua kubu yang ada pada satu negara.

A. Kawasan Strategis Yaman

Dalam tulisannya berjudul. *Tragility and Extremism in Yemen, A Case Study of The Stabilizing Fragile* Michael Makovsky, dkk (2011) menyatakan Yaman terletak di sudut barat daya semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman. Laut Merah di bagian barat dan Teluk Aden di selatan memisahkan Yaman dengan Tanduk Afrika. *Babel Mandeb,* selat dengan lebar 18 mil yang menghubungkan dua lautan ini, merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia dan dianggap sebagai "*checkpoint* transit minyak dunia" oleh Departemen Energi AS. Sekitar 3,3 juta barel minyak dari Teluk Persia melewati selat ini setiap hari dalam perjalanan ke Eropa dan Amerika Utara.
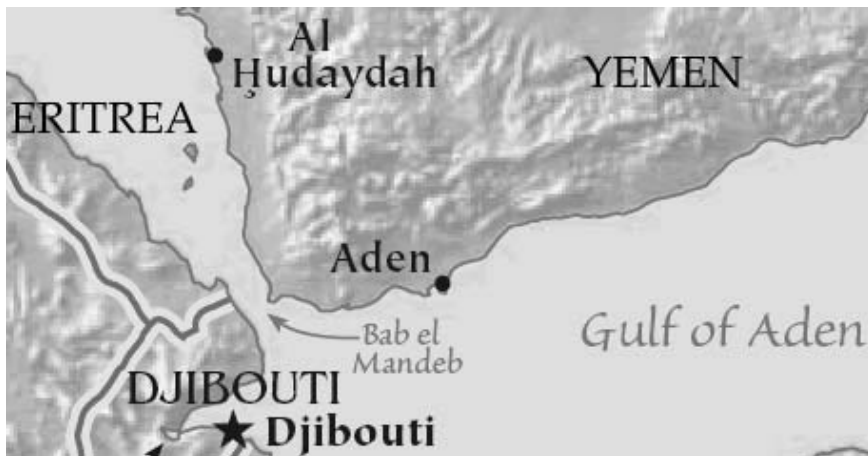
Gambar 4.1. Selat Bab el Mandeb yang memisahkan dua benua (Asia-Afrika)
(Sumber: pinterest.com)

Yaman terbagi menjadi 2 bagian yakni Yaman Utara dan Yaman Selatan, akan tetapi kedua bagian tersebut sering terjadi konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990 dan Presiden Ali Abdullah Saleh terpilih menjadi presiden pertama "Yaman Bersatu".

Dengan 23 juta penduduk, Yaman merupakan negara kedua terdapat di Semenanjung Arab setelah Arab Saudi. Sementara perebutan sumber

daya telah menjadi penyebab yang lebih besar terjadinya konflik diantara penduduk Yaman, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara Asia barat lainnya, ada perpecahan *sektarian* geografis yang lembut di dalam negeri itu. Sebagian besar penduduk Yaman bagian atas, termasuk sebagian dari ibu kota, menampilkan populasi mayoritas *Zaydis,* sebuah sekte Syiah yang membentuk sekitar 40% dari keseluruhan penduduk di negeri itu. Yaman Utara yang merupakan jantung bagi orang-orang Zaidi dimana merupakan tempat pemberontakan besar terhadap rezim, tetapi hal yang mendasarinya adalah lebih banyak terkait politik dan ekonomi dari pada sectarian. Yaman bagian bawah dan padang pasir terpencil di Timur sebagian besar berpenduduk dengan aliran Sunni yang membentuk antara setengah sampai dua-pertiga dari total penduduk Yaman(Burrowes,1987: 16).

Komposisi agama di Yaman
Lainnya 2%
Syi'ah (Zaidi) 43%
Sunni (syafi'i) 55%
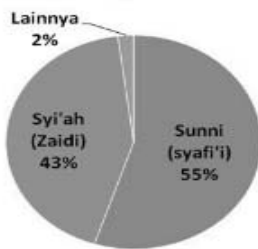
Komposisi Etnik di Yaman
Afro-Arab 5%
Lainnya 3%
Arab 92%
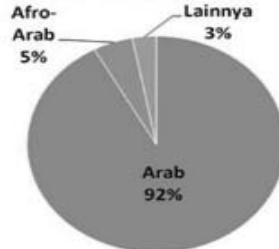
Diagram pembagian penduduk Yaman berdasarkan agama dan etnik

Sumber: Majalah Syamina

B. Krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan

1. Perang Sipil Yaman Utara, 1962-1970

Yahya[1] terbunuh dalam kudeta tahun 1948 dan dengan cepat digantikan oleh putranya Ahmad[2]. Dalam beberapa bulan perang saudara besar-besaran pecah antara "Republikan" yang dipimpin oleh Abudllah

[1] Imam Zaidi yang menguasai daratan Yaman Utara. Pada tahun 1918, Yahya mengubah Yaman Utara menjadi negara Yaman independen modern pertama dengan pemerintahan teokrasi.

[2] Disebut "iblis" karena banyak melakukan korupsi dan represi yang ekstrim. Ia membangkitkan dari para syekh, suku, pemimpin militer, nasionalis Arab dan reformis, hingga pihal militer berusaha menggulingkannya tahun 1955. Hal ini menciptakan krisis suksesi pada saat kematiannya pada tahun 1962.

Asallal dan "royalis" yang dipimpin oleh putra Ahmad, Muhammad al-Badr. Ahmad mencoba merebut kekuasaan ayahnya tahun 1959. Secara umum, komitmen kaum republikan untuk memodernisasi negara tersebut mendapat dukungan dari Yaman bagian bawah dan kota-kota besar, sementara gerilyawan royalis didukung terutama oleh suku Zaidi di Yaman bagian atas(Carapico,1998: 37).

2. Republik Arab Yaman, 1962-1970

Kaum republikan akhirnya menang setelah delapan tahun pertempuran yang menewaskan sedikitnya 100.000 orang Yaman Utara. Yaman Utara secara resmi menjadi "Republik Arab Yaman", rezim lama khususnya karakter Zaidi ditinggalkan dan konstitusi baru dilakukan berdasarkan syariah. Namun, akhir perang tidak membawa perdamaian (Burrowes,1987: 15).

Abdul Rahman al-Iryani, yang menggulingkan Sallal pada tahun 1967 menjadi presiden sipil pertama dan satu-satunya di Yaman. Ia menjalankan perang singkat melawan Yaman Selatan pada tahun 1972 sebelum digulingkan pada tahun 1974. Presiden Ali Abdullah Saleh naik ke tampuk kekuasaan dengan kudeta pada tahun 1978, dan segera terlibat dalam perang singkat yang kedua melawan Yaman Selatan. Di dalam negeri, ia menerapkan strategi memecah belah dan memerintah berdasarkan pada pendahulunya. Ia memadamkan dua upaya kudeta di tiga tahun masa kepresidenannya. Pada tahun 1990, Rep Arab Yaman berubah nama menjadi "Republik Yaman" seperti saat ini penggabungan Yaman Selatan (Halliday,1989: 37).

Gambar 4.2. Abdul Rahman al-Iryani
(Sumber: Revolvy.com)

3. Yaman Selatan: Dari Outpost Inggris sampai Republik Rakyat, 1839-1990.

Pada tahun 1839, Persekutuan India Timur Inggris (*the British East Inda Company*) menaklukan pelabuhan Aden untuk digunakan sebagai tempat mengisi batu bara dalam perjalanan ke India. Awalnya, Inggris berharap menghindari wilayah suku-suku disekitarnya. Namun, kekhawatiran dengan kehadiran Utsmaniyah yang berkembang di Yaman bagian atas memicu Gubernur-Jenderal India Inggris menandatangani perjanjian konsultasi dan perlindungan dengan berbagai suku di Yaman selatan yang dimulai pada tahun 1873 (Peterson,1982: 12).

Pada tahun 1886, India Inggris telah menandatangani 90 perjanjian dengan beberapa suku individu di Yaman bagian bawah dan gurun timur jauh, membentuk "Protektorat Aden" untuk mengukir sebuah lingkaran pengaruh di Yaman Selatan, meskipun tanpa menciptakan sebuah entitas politik koheren. Sementara itu, pelabuhan Aden diperintah secara langsung dari kongsi dagang Inggris di India (Halliday,1989: 37).

Menjelang PD 1, London dan Istanbul menetapkan perbedaan posisi mereka pada tahun 1914 dengan membuat apa yang disebut sebagai jalur Ungu untuk membatasi lingkup pengaruh masing-masing di selatan Semenanjung Arabia. Seperti yang sering terjadi di wilayah tersebut, kekuatan-kekuatan luar memutuskan perbatasan di Yaman dengan sewenang-wenang, tanpa berkonsultasi dengan orang-orang Yaman, meskipun fakta bahwa garis tersebut membelah wilayah kesukuan yang telah ada. Jalur ini mendekati batas umum yang ada antara dua Yaman sampai penyatuannya pada tahun 1990 (Wenner,1991: 45).

Inggris lebih lanjut mengotak-ngotakan Yaman Selatan dengan membagi protektorat itu menjadi dua bagian Timur dan Barat pada tahun 1917, memindahkan kendali unit-unit ini dari India ke Kantor Luar Negeri Inggris di London dan kemudian membuat koloni mahkota Aden (*Aden Crown Colony*) yang terpisah pada tahun 1937. Sementara Aden menjadi pusat perdagangan global yang makmur (terutama untuk pengisian minyak), Inggris menciptakan protektorat Aden Timur sebagai pemerintahan lebih kecil yang terpisah, untuk wilayah Hadhramout setelah menemukan cadangan minyak berpotensi signifikan di padang pasir timurnya. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah Hadhramout, mengingat medan yang sulit dan lokasi terpencil (Burrowes,1987: 20).

Inggris mempertahankan sedikit porsi kendali atas wilayah ini dan wilayah kesukuan lainnya dengan menggabungkan bantuan keuangan untuk kampanye pemboman udara. Hal ini terutama berlaku di Protektorat Aden Barat, yang meliputi sebagian besar dari Yaman bagian bawah dan telah menanggung beban serangan dari Yaman bagian atas. Bahkan Inggris membayar suku-suku di Proktektorat Aden Barat untuk melawan Yaman Utara dalam perang perbatasan yang tidak dideklarasikan pada tahun 1950-an. Sebagaimana disebutkan oleh Perdana Menteri Harold Macmillan. "akan lebih baik untuk meninggalkan syekh-syekh dan penguasa lokal dalam kondisi persaingan, dimana mereka dapat dimanfaatkan satu dengan yang lain, daripada membentuk mereka menjadi satu kesatuan". Upaya "pasifikasi" Inggris seperti ini menyebabkan adanya otoritas dan memperdalam sifat otonom provinsi-provinsi bagian timur Yaman (Carapico,1998: 39).

Setelah PD 2, Inggris berharap untuk membuat sebuah pos utama di Asia barat dengan menyatukan Koloni Aden dengan beberapa protektorat yang ada disekitarnya. Sebagai bagian dari rencana ini, Inggris mendirikan markas untuk Pasukan Inggris Semenanjung Arab yang baru dibentuk, di Aden pada tahun 1958. Pada tahun 1962 ketika seluruh pasukan Yaman Utara hanya berjumlah 12.000 orang dan 40.000 tentara Inggris ditempatkan di Aden. Namun, Inggris tidak banyak berbuat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi Aden yang miskin atau menyalurkan penerimaan pajak secara efektif, sehingga hal itu mengucilkan sebagian besar rakyat(Burrowes,1987: 23).

Dalam upaya untuk mengimbangi meningkatnya agitasi anti-Inggris dan mengkonsolidasikan cengkeramannya atas wilayah tersebut, London menyajikan suatu penyatuan yang disimbolkan lewat koin bergambar daun yang menandai perubahan Protektorat Aden Barat menjadi Federasi Arab Selatan (termasuk koloni Aden) pada awal 1963. Federasi baru ini bahkan memiliki kekuatan 4.000 tentara yang dipimpin oleh orang Inggris. Dan yang terpenting, Protektorat Aden Timur tidak bergabung dengan federasi baru ini, tetapi tetap menjadi sebuah Protektorat Arab Selatan pada tahun 1963(Peterson,1982: 12).

4. Darurat Eden, 1963-1967

Federasi bentukan Inggris ini gagal untuk memadamkan ketidakstabilan. Sebagai dampaknya pasukan Nasser di Yaman Utara, serikat pekerja di Aden

dan para pemimpin suku di seluruh wilayah selatan mulai melancarkan pemogokan, kerusuhan dan serangan anti-Inggris. Inggris mengumumkan kesadaran darurat di seluruh wilayah itu pada akhir 1963 ("Darurat Aden") karena pasukannya menghadapi berbagai konflik. Dari tahun 1963 sampai tahun 1967, tentara Inggris milisi Marxis dan suku pedesaan yang miskin semua berperang satu sama lain dalam bentrokan yang sangat brutal di jalan-jalan kota dan melintasi benteng pegunungan di Federasi Arab Selatan yang baru dibentuk(Halliday,1989: 37).

Mesir membantu Yaman dengan mempersenjatai dan membayar kelompok Marxis dan para pemimpin suku untuk membentuk koalisi pemberontak seperti "Serigala Merah Radfan" yang memberikan banyak korban pada pasukan Inggris di daerah pedalaman dan kota-kota. Situasi di Inggris menjadi tidak dapat dipertahankan secara strategis karena jatuhnya banyak korban jiwa dan pers di London mengecam "perang yang berlarut-larut tanpa akhir yang terlihat". Pada tahun 1966, Inggris mengumumkan akan meninggalkan Yaman secara keseluruhan pada tahun 1968, tetapi kemudian mengundurkan diri dengan segera pada tahun 1967(Halliday,1989: 40).

5. Republik Demokratik Rakyat Yaman, 1970-1990

Kepergian Inggris sebagai dampak tindakannya menciptakan kekosongan kekuasaan di Aden. Dampak positif lainnya ialah penyatuan Yaman Selatan. Dua kelompok Marxis terkemuka Front Pembebasan Nasional (NLF) dan Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan (FLOSY) berperang satu sama lain untuk menguasai wilayah yang baru dibebaskan tersebut. Akhirnya NLF menang dan secara nominal memegang kendali, namun berbagai faksi NLF kemudian berperang satu sama lain sampai tahun 1870. Pada saat itu, faksi Marxis NLF yang paling radikal merebut kekuasaan dari faksi berkuasa yang lebih moderat dan mendeklarasikan Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY) (Peterson,1982: 12).

NLF berubah menjadi Partai Sosialis Yaman (YSP) yang berkuasa dan menetapkan membangun negara dalam suatu wilayah yang terbagi antara bekas zona penyangga Inggris atas suku-suku autarkis dan sebuah pelabuhan industri makmur yang dipimpin oleh elit perkotaan. Menurut konstitusi PDRY yang baru, proyek ini berpusat pada "pembebasan masyarakat dari kemunduran tribalisme" di Yaman Selatan dan Utara(Wenner,1991: 45).

Meskipun, kaum Marxis yang bertanggung jawab di Aden telah bekerja dengan keras untuk memecahkan tradisi suku, namun proyek mereka kandas saat berhadapan dengan sejarah politik di kawasan itu. Pada saat yang sama, YSP melanjutkan praktek Inggris dalam mengobarkan ketidakstabilan di Yaman Utara. Di atas semua ini, pertarungan politik di antara para pemimpin YSP adalah begitu kudeta terjadi pada tahun 1978 dan 1980 yang bahkan Fidel Castro meminta PDRY: "Kapan kalian akan berhenti saling membunuh?" (Wenner,1991: 46).

6. Penyatuan Yaman (Perang Sipil)

Penggabungan dua Yaman pada tahun 1990 merupakan perkawinan kenyamanan yang terbaik antara dua negara yang secara substansial berbeda. Yaman Utara secara resmi adalah sebuah rezim republik konservatif yang berkuasa atas masyarakat yang sangat bersifat kesukuan, sementara Yaman Selatan adalah sebuah negara Marxis yang secara fanatik berusaha untuk mengubah masyarakatnya sejalan dengan garis sosialis. Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, hubungan antar Yaman sering bermusuhan, dengan perang perbatasan meletus pada tahun 1972 dan 1979. Sana'a menghabiskan periode ini unuk membangun hubungan dengan Arab dan dunia Barat. Sana'a adalah anggota pertama dari Liga Arab yang melanjutkan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat setelah Perang Enam Hari, sementara Aden menjadi klien utama Asia barat bagi Uni Soviet (dan yang paling radikal). Pada tahun 1986, sebanyak 5.000 penasihat Soviet ditempatkan di Yaman Selatan, dan Aden menjadi basis strategis bagi pasukan angkatan laut dan udara Soviet (seperti halnya yang terjadi pad apasukan Inggris di dekade sebelumnya). Negara ini juga memelihara hubungan yang kuat dengan kau komunis Cina dan Kuba, dan mendukung pemberontak Marxis dengan kekerasan di negara tetangga Oman di awal 1970-an. Bahkan monarki yang sangat konservatif Arab Saudi mendukung rezim sosialis PDRY yang mendukung Yaman Utara dan mencegah munculnya negara kesatuan di perbatasan barat dayanya (Peterson,1982: 15).

Yaman Selatan melemah secara politik dan militer oleh perang saudara yang brutal antara faksi –faksi sosialis yang saling bersaing pada tahun 1986, yang mengakibatkan kematian 10.000 orang (Wenner,1991: 45).

Harapan untuk pemulihan telah didukung oleh operasi eksplorasi dan produksi minyak secara ekstensif oleh Soviet di provinsi-provinsi bagian

timur pada akhir tahun 1980, tetapi setelah itu tiba-tiba Yaman Selatan kehilangan Soviet sebagai penyelamat ketika Moskow harus berurusan dengan disintegrasi dalam diri mereka sendiri. Akibatnya, Yaman Selatan menyetujui penyerapan oleh Yaman Utara setelah menjadi jelas bahwa Soviet tidak akan mampu memberi dukungan lebih lama lagi (al-Suwaidi,1995: 20).

Mengingat pecahnya secara tiba-tiba Uni Soviet pada tahun 1991, negosiasi penyatuan awal yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an cepat dilacak. Secara signifikan, proses penyatuan serampangan ini mengharuskan setidaknya demokratisasi yang terbatas, karena hal ini tampaknya menjadi cara yang paling pragmatis untuk rekonsiliasi ekonomi dan politik yang berbeda antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Meskipun Yaman Selatan hanya menyumbang seperlima dari penduduk Yaman bersatu, partai yang berkuasa di Yaman Utara (GPC) sepakat untuk berbagi kekuasaan yang relatif sama dengan YSP selama masa transisi sebelum pemilihan umum dapat digelar. Namun, sifat tergesa-gesa dari yang belum terselesaikan misalnya: pemilu tertunda, unit-unit militer gagal untuk berintegrasi, ekonomi yang goyang dan kontrol atas pendapatan ekspor energi yang dibiarkan mengambang (Burrowes,1987: 18).

Perang sipilpun pecah pada bulan April 1994. Mantan presiden (Ali Salem al-Beidh) dan perdana menteri (Haidar Abu Bakar al Attas) Yaman Selatan mendeklarasikan Republik Demokratik Yaman (DRY) yang independen untuk menggantikan bekas PDRY, dan menghidupkan kembali Aden sebagai ibukota mereka. Arab Saudi mendukung DRY untuk membalik mundur kemunculan Yaman bersatu. Selain itu, negara-negara satelit bekas Soviet menyediakan bagi mantan klien mereka di Aden dengan artileri, tank dan jet tempur bekas Soviet. Namun, tidak ada pemerintah asing yang mengakui DRY, dan Aden jatuh ke pasukan utara pada Juli 1994 (al-Suwaidi,1995: 21).

Meskipun singkat, konsekuensi perang itu cukup signifikan. Sebagai akibat dari kemenangan yang cepat oleh pihak Utara, Saleh memperketat cengkeraman rezim pada sumber daya alam yang kaya negara itu yang sebagian besar terletak di bekas Yaman Selatn menyingkirkan sebagian besar orang-orang Selatan dari jaringan patronnya dan menempatkan orang-orang Utara sebagai penanggungjawab ekonomi dan keamanan di Selatan. Hal ini membuat semua menjadi lebih mudah dengan adanya fakta

bahwa infrastruktur minyak bekas Yaman Selatan telah beroperasi lagi pada awal 1990-an. Selama peran itu, layanan keamanan Saleh membantu memperdalam kesenjangan utara-selatan dengan merekrut apa yang disebut sebaga "tentara popular" dari putra-putra suku, jihadis yang berpindah-pindah tempat, dan mantan mujahidin sebagai milisi proxy untuk membantu mencegah bangkitnya orang-orang sosialis Yaman Selatan. Akibatnya, saat ini legitimasi rezim di sebagian besar wilayah selatan terancam, dan kekerasan yang terinspirasi separatism dan pembalasan terhadap pemerintah merupakan tema yang selalu berulang di provinsi-provinsi wilayah selatan (al-Suwaidi,1995: 21).

C. Arab Spring di Yaman

Arab Spring (Musim Semi Arab) adalah rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab meski tidak semuanya dilakukan oleh orang Arab. Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko dan Oman; dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab (Carapico,1998: 40).
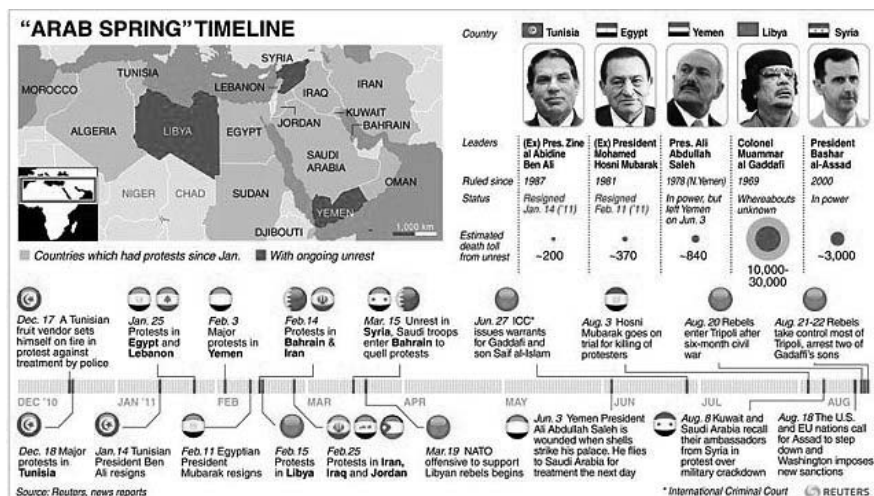
Gambar 4.3. Time Line Arab Spring
(Sumber: RevolutionaryProgram.com)

Rangkaian peristiwa pada Arab Spring ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia tanggal 18 Desember 2010 menyusul peristiwa pembakaran diri oleh Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi oleh polisi dan pelayanan kesehatan. Dengan kesukesan protes di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir dan Yaman, kemudian ke negara-negara lain(Burrowes,1987: 18).

Rentetan protes ini menggunakan beberapa teknik di antaranya adalah pemberontakan sipil dan kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial seperti *Facebook, Twiter, You Tube* dan *Skype* untuk mengorganisasir, berkomunikasi dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa tang ditanggapi secara keras oleh pihak berwajib, maupun milisi dan pengu njuk rasa yang didengungkan di dunia Arab itu adalah *Ash-sha'b yurid Isqat an-nizam* ("Rakyat ingin menumbangkan rezim ini") (Wenner,1991: 47).

Revolusi Yaman sebagai bagian dari Arab Spring terjadi setelah Revolusi Tunisia dan bersamaan dengan Revolusi Mesir dan beberapa protes massa lain di kawasan Asia barat dan Afrika pada tahun 2011. Pada fase awal, protes di Yaman terkait dengan tidak adanya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, korupsi dan usulan pemerintah untuk memodifikasi konstitusi Yaman. Tuntutan para pendemo kemudian berkembang dengan menyerukan agar Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri. Penyeberangan secara massal dari militer maupun dari pemerintah Saleh secara efektif menjadikan banyak wilayah negara berada di luar kendali pemerintah, dan para pendemo bertekad untuk menentang otoritasnya(Wenner,1991: 48).

Demonstrasi yang besar degan lebih dari 16.000 pendemo dilaksanakan di Sana'a, ibu kota Yaman, pada 27 Januari 2011. Pada tanggal 2 Februari, Saleh mengumumkan bahwa ia tidak akan mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2013 dan dia tidak akan mewariskan kekuasannya pada putranya. Pada tanggal 3 Februari, 20.000 massa memprotes pemerintah di Sana'a (Wenner,1991: 48).

Yaman pun terancam menjadi negara gagal (*failed states*) yang berdasarkan *The Failed States Index* menempati posisi kedelapan. Puncaknya adalah tuntutan demonstran di Yaman bahwa mereka menginginkan turunnya presiden Ali Abdullah Saleh.[3]

[3] Ali Abdullah Saleh didukung oleh Partai GPC, didirikan tahun 1982. Partai GPC

Ali Abdullah Saleh kemudian menandatangani perjanjian yang diprakarsai oleh Dewan Kerjasama Teluk (*the Gulf Cooperation Council* – GCC). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Saleh akan melakukan transfer kekuasaan kepada wakilnya Abdurrabu Manshur Al-Hadi(Peterson,1982: 15).

Dimulai akhir April 2011, Saleh awalnya menyetujui sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council*, GCC), kemudian mundur lagi beberapa jam sebelum jadwal penandatanganan, sampai tiga kali. Setelah ketiga kalinya, pada 22 Mei 2011, GCC mengumumkan penangguhan upaya-upaya untuk memediasi di Yaman. Pada 23 Mei 2011, sehari setelah Saleh menolak untuk menandatangani perjanjian transisi tersebut, Syeikh Sadiq al-Ahmar ketua federasi suku Hasyid, salah satu dari suku-suku yang paling kuat di negara itu, mengumumkan dukungannya pada oposisi dan para pendukungnya yang bersenjata memulai konflik dengan pasukan keamanan loyalis di ibukota Sana'a (Halliday,1989: 37).

Pada hari berikutnya, Wakil Presiden Abdul Rab Mansul al Hadi mengambil alih sebagai pejabat presiden, sementara Saleh terbang ke Saudi Arabia untuk perawatan. Massa merayakan pemindahan kekuasaan Saleh tersebut, tetapi pejabat-pejabat Yaman bersikeras bahwa ketiadaan Saleh hanya sementara dan dia akan segera kembali ke Yaman untuk melanjutkan tugas nya (Burrowes,1987: 20).

Sebuah pemilihan presiden telah dilaksanakan di Yaman pada 21 Februari 2012. Sebuah artikel mengklaim bahwa pemilu tersebut diikuti 65 persen dari pemilihannya, Hadi memenangkan suara 99,8%. Kemudian ia diambil sumpahnya di parlemen Yaman pada 25 Februari 2012. Saleh kembali pada hari yang sama untuk menghadiri pelantikan presiden Hadi. Setelah beberapa bulan demonstrasi, Saleh mengundurkan diri dari presiden dan secara formal memindahkan kekuasaann pada penggantinya, yang mengakhiri 33 tahun pemerintahannya (Peterson,1982: 23).

---

terdiri dari kalangan kaum elite sosial seperti syaikh, pemimpin intelektual, para pebisnis.

D. PENUTUP

Dalam perkembangannya ada beberapa hal yang membuat Yaman terpecah menjadi dua diantaranya:

Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990 dan Presiden Ali Abdullah Saleh terpilih menjadi presiden pertama "Yaman Bersatu". Ada perpecahan sektarian geografis, Yaman utara beridelogi syiah sedangkan Yaman Selatan berideologi Sunni.

Beberapa konflik yang terjadi khususnya berkaitan dengan Yaman utara dan Yaman selatan ialah: (1) Perang sipil Yaman Utara tahun 1962-1970, yang disebabkan oleh perang saudara pengganti pemerintahan kemudian membesar menjadi masalah antara gerilyawan royalis dari Yaman utara sedangkan pendukung Yaman selatan dari kaum republikan. (2) Perang kepentingan Barat pada tahun 1950-an yang dipelopori Inggris untuk kepentingan di Yaman Selatan, dimana Inggris membayar para suku di Protektoranya khususnya Aden Barat untuk melawan Yaman Utara.

Negara kita (Yaman) sesungguhnya punya potensi lalu mengapa kita tidak dapat menikmatinya...

kita hanya sibuk dengan konflik idelogi hingga tidak sadar kepentingan asing mengancam kita

Suatu ketika Bung Ali (Rezim yang takluk pasca Arab Spring)

Satu ideologi saja pusing apalagi 2 ideologi dalam satu Negarah akhirnya 1 badan 2 kepala...

Indonesiaku punya Pancasila, konsep ini mewakili berbagai perbedaan yngng ada Yaman bisa pakai konsep itu, agar masyarakat Indoesia lebih percaya diri

Secercah mimpi Bung Karno

KEGIATAN MENGGALI AKSI

AKSI KELOMPOK

Membuat Poster **anti RADIKALISME & DISINTEGRASI** dapat menggunakan aplikasi

PENGUMPULAN HASIL

Dicetak A3

KEGIATAN REFLEKSI

Bagaimana tenang menghadapi masalah kecil dan terbiasa menyelesaikan masalah besar?

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI
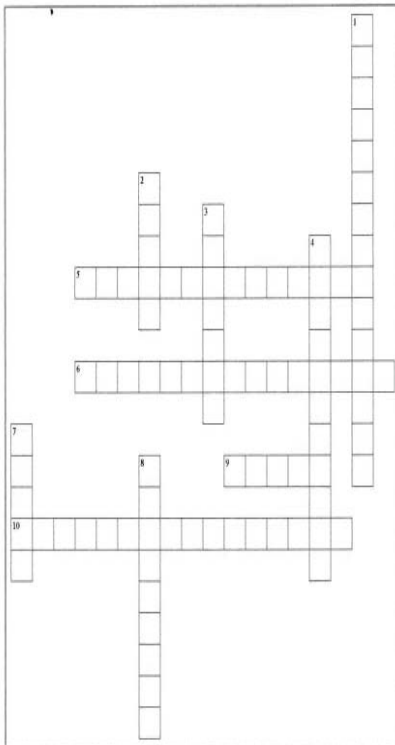
Across

5. Pemimpin kelompok "royalis" di Yaman.
6. Pemimpin kelompok"Republikan" di Yaman.
9. Negara yang terletak di sudut barat daya semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman
10. Presiden Yaman Utara yang menerapkan strategi memecah belah dan memerintah berdasarkan pada pendahulunya.

Down

1. Bentuk pengaruh India-Inggris pasca penandatanganan90 perjanjian dengan beberapa suku individu di Yaman bagian bawah dan gurun timur jauh.
2. Ideologi mayoritas populasi di Yaman utara.
3. konstitusi baru "Republik Arab Yaman", dilakukan berdasarkan?
4. Selat dengan lebar 18 mil yang menghubungkan dua lautan ini, merupakan jalur pelayaran minya tersibuk keempat di dunia, dan dianggap sebagai "checkpoint transit minyak dunia" oleh Departemen Energi AS
7. Imam Zaidi yang menguasai daratan Yaman Utara
8. Perbatasan di bagian barat dan teluk Aden di selatan memisahkan Yaman dengan Tanduk Afrika

<u>Tugas Terstruktur:</u>

Krisis apa saja yang dialami Yaman dan belajar dari pengalaman apa saja yang harus dilalui sebagai tonggak kehidupan baru sebagai bangsa pejuang?

BAB V

PENGARUH NASIONALISME MESIR BAGI NEGARA-NEGARA ARAB DAN KEPENTINGAN BARAT

5.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai kawasan strategis Mesir bagi bangsa-bangsa Arab, perjuangan kemerdekaan Mesir, konstitusi 1923 dan 1930, dan perjanjian Anglo-Mesir 1936

5.2 Relevansi

Setiap individu mampu mengkaji masa lalu sebagai suatu pembelajaran dimana bangsa Mesir lahir dari bangsa yang terjajah selaras dengan bangsa Indonesia yang berjuang karena terjajah. Setiap pribadi juga ditekankan agar mampu belajar dan mengambil nilai-nilai perjuangan kemerdekaan di masa lalu untuk diteruskan di masa kini lewat karya dan cipta anak bangsa.

5.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami lahirnya nasionalisme Mesir dan Kepentingan Barat serta mampu menghargai jati diri sebagai sebuah identitas nasional.

Glosarium

1. *Gerilyawan royalis* adalah Pasukan pendukung pemerintahan monarki.
2. *Monarki Konstitusional* adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai.
3. *Sekuler* adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

A. Kawasan Strategis Mesir bagi bangsa-bangsa Arab

Wilayah Mesir sangat strategis bagi bangsa-bangsa Arab. Hal tersebut disebabkan karena peradaban Mesir berkembang sekitar 5000 hingga 3100 SM. Meskipun hanya dalam waktu tiga tahun mulai dari tahun 1798-1801 M, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Beberapa lembaga dibangun salah satunya *Institut de Egypte* juga boleh dikunjungi oleh masyarakat Mesir yang menimba ilmu. Dari institut inilah terjadi persentuhan budaya atau peradaban dan agama. Dimana secara langsung, masyarakat Mesir khususnya kaum Islam pertama kalinya dapat berkontak langsung dengan orang Eropa. *Institut d Egypte* juga memiliki peralatan modern yang canggih seperti mikroskop, teleskop atau alat percobaan lainnya serta ketekunan dan kesungguhan kerja orang Prancis, yang merupakan hal yang asing dan menakjubkan bagi masyarakat Mesir kala itu (Hitti, 2010: 924).

Wilayah Arab khususnya (Arab Utara) Asia barat pada abad ke 18 diperebutkan oleh negara-negara imperialis. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandiria kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis(Hitti, 2010: 925).

Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris Terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di Timur. Sebaliknya apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga menguasai seluruh Asia barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India(Hitti, 2010: 925).

Selang beberapa tahun (3 tahun) Turki dengan bujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Tahun 1801, Inggris mengirimkan tentaranya ke Mesir untuk menyerang dari jurusan barat, sedangkan Turki mengirimkan dua pasukannya, yang satu pasukan darat untuk menyerang Mesir dari Timur dan yang lainnya pasukan laut untuk memberi pertolongan kepada armada Inggris. India juga mengirimkan pasukannya. Dalam pertempuran di Abu Qir, tentara Prancis mengalami kekalahan. Alexandria kemudian dapat diduduki oleh tentara Inggris. Akhirnya Prancis terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan Inggris, yang menuntut Prancis mundur dari Mesir. (Esposito, 1999: 233)

Mesir diperebutkan oleh berbagai negara di Eropa (Esposito, 1999: 234), terkait dengan letaknya yang strategis. Hal ini amat krusial karena

terkait dengan faktor-faktor seperti stabilitas negara; perkembangan awal; infrastruktur, seperti Terusan Suez; dan kekuatan sentimen nasional di antara rakyatnya. Perjuangan panjang untuk kemerdekaan penuh dan tekanan dari Inggris masih tetap bertahan hingga 1939. Pengaruh politik dalam negeri berkutat pada segititiga kekuasaan antara nasionalis Mesir, dinasti Mehmet Ali dan Inggris. Aspek perkembangan masyarakat yang paling krusial yang terkena dampak ialah pertumbuhan penduduk, seperti yang terlihat misalnya kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang merata. Mesir mempertahankan wilayahnya sebagai pusat kebudayaan dunia dan seniman Mesir layaknya seorang para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan para pejuang nasional juga memperjuangkan kemerdekaan bagi pemilik tanah, profesionalitas kelas menengah dan melakukan pengawasan terhadap politisi yang memerintah (Ochsenwald, 2013: 421).

Negara-negara Eropa memberikan pengaruh pada Mesir, terutama pada masa penguasaan Inggris. Mesir secara resmi jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1882 dari pendudukan Turki Usmani. Pada tahun 1841-1914 wilayah Mesir memang merupakan bagian dari imperium Turki Usman, namun banyak terjadi konflik antara Turki dengan negara Eropa (terutama Inggris). Pasca pendudukan Inggris, Mesir menjadi negara monarki konstitusional dengan kebijakan yang didominasi Inggris.

Tiga negara yang paling terkenal di Asia barat setelah jatuhnya kekaisaran Ottoman (Turki Ustman) di Perang Dunia I adalah negara Turki non Arab, Iran, dan Mesir. Selama periode perang internal, tahun 1919 hingga 1939, negara-negara ini memiliki populasi yang besar, dengan sumber daya ekonomi yang cukup, dan pemerintah yang efektif. Di samping itu, ketiga negara mendapat kemerdekaannya, meskipun Inggris banyak melakukan kontrol militer dan menanamkan pengaruh politik di Mesir. Sedangkan pemerintah Turki dan Iran melakukan langkah-langkah radikal yang bertujuan meng-Eropanisasi, memodernisasi, dan sekularisasi, yang mendapat pengaruh paling utama ialah Mesir dalam perjuangannya melawan Inggris (Ochsenwald, 2013: 420).

Periode modern (awal abad ke-20) di Mesir merupakan zaman kebangkitan Islam. Periode modern dimulai ketika Napoleon Bonaparte memperluas pengaruhnya di wilayah Asia barat (sebutan orang-orang Eropa). Pada periode pertengahan (Masa Kekhalifahan, Perang Salib 1453)

bangsa-bangsa Arab mengalami kemunduran baik bidang pendidikan, pengetahuan, sosial maupun bidang-bidang terkait dengan politik budaya dan teknologi. Periode modern ini dikenal dengan zaman pembaharuan (Amin, 2009: 45).

Pada masa masyarakat Arab ingin belajar dari Barat lantaran kemajuan bangsa Barat dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan peradabannya. Hubungan Arab dengan Barat pada masa klasik sangat berbeda dengan masa modern. (Sani, 1998: 27).

Dengan demikian, muncullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Para pemuka agama kembali mengeluarkan pemikirannya agar membuat masyarakatnya kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Artinya untuk memperbaharui kehidupan serta mendorong masyarakat untuk mengusir dominasi kekuatan asing di negeri-negeri Arab (Mufrodi, 2010: 155).

B. Perjuangan Kemerdekaan Mesir

Pada tahun 1918, dua hari setelah mengakiri peperangan dengan Eropa, Saad Zaghlul Pasha, seorang nasionalis yang menjadi menteri pendidikan, ditekan oleh pihak komisioner tinggi Inggris, untuk mengakui kemerdekaan Mesir. Zaghlul meminta ijin melanjutkan hubungan delegasi dengan London untuk mendiskusikan program kemerdekaan itu. Inggris menolak secara resmi, karena menduga Zaghlul bukanlah perwakilan resmi pemerintah Mesir, tetapi mereka juga menolak untuk mengijinkan kabinet di Mesir mengirim utusan(Ochsenwald, 2013: 420).

Pada bulan Maret 1919 Zaghlul dan anggota partai Wafd (Partai Liberal) terkemuka lainnya ditangkap oleh militer Inggris (Mesir masih berada di bawah darurat militer) dan dideportasi ke Malta. Reaksi Mesir spontan memberontak. Pemberontakan dan kekerasan menyebar ke seluruh distrik dalam beberapa hari termasuk wilayah Islam dan Kristen; serikat buruh, para pekerja dan kapitalis; hingga penduduk perkotaan dan petani, baik wanita dan pria. Kaum revolusioner Mesir mencari kemerdekaan untuk menentukan masa depan negaranya yang dapat menentukan nasib ke arah nasionalisme. Pasukan militer Inggris bergegas ke Mesir dan menghancurkan pemberontak(Hitti, 2010: 924).

Inggris segera melakukan tindakan dengan mengangkat Jendral Edmund Allenby menjadi komisaris tinggi di Mesir, dan Lord Milner

ditunjuk sebagai kepala komisi untuk melakukan penyelidikan yang sifatnya protektorat. Zaghlul dan sesamanya, anggota dari Partai Wafd di Malta dibebaskan untuk menyelesaikan tuntutan mereka sebelum konferensi perdamaian di Prancis, tapi pada akhirnya tuntutan mereka diabaikan(Ochsenwald, 2013: 421).

Zaghlul dan delegasinya mengumpulkan seluruh organisasi dari berbagai negara dengan perasaan nasionalisme yang kuat untuk melepaskan diri dari pengaruh Inggris. Sebuah memorandum yang berisi prinsip-prinsip tentang perjanjian aliansi antara Mesir dan Inggris dikeluarkan pada bulan Agustus 1920. Hal ini menandakan Mesir merupakan negara monarki konstitusional yang berdaulat dengan lembaga perwakilan. Inggris berusaha untuk mempertahankan Mesir agar Mesir tetap mengirimkan bantuan ke perbatasannya pada Inggris. Mesir memiliki perwakilan diplomatik di luar negeri tetapi tetap berkoordinasi politik dengan orang-orang dari Inggris. Mesir tetap menunjuk penasihat hukum dan keuangan dari Inggris, menghapuskan perpajakan, dan mengizinkan Inggris untuk mempertahankan kekuatan militernya di Mesir. Pada akhirnya Mesir berjanji untuk memanggil majelis konstituante untuk meratifikasi perjanjian dengan suatu konstitusi. Ini merupakan salah satu gagasan Zaghlul. Ia berpendapat bahwa memorandum harus disetujui oleh rakyat Mesir sebelum ia bisa pergi dan mengakhiri kerjasama dengan Inggris (Ochsenwald, 2013: 421).

Allenby sebagai PM Inggris saat itu, menghargai perjanjian yang disahkan oleh Zaghlul. Pada saat kabinet Inggris berdiri, Allenby tidak setuju untuk mengakui kemerdekaan Mesir. Allenby perlu meyakinkan Inggris untuk menerima komitmen memorandum yang dibuat pada tahun 1920 (Ochsenwald, 2013: 422).

Pada tanggal 28 Februari 1922, Allenby memberikan deklarasi Inggris secara sepihak mengakhiri protektorat dan menjadikan Mesir ke peringkat negara berdaulat yang independen. Bagaimanapun Inggris memiliki gerakan kontrol keamanan komunikasi, pertahanan Mesir, perlindungan kepentingan asing dan kelompok minoritas, serta urusan Sudan Anglo-Mesir. Nasionalis Mesir kesal bahwa kemerdekaan negara mereka dinyatakan oleh negara lain dan dibatasi oleh perjanjian sebelumnya(Ochsenwald, 2013: 422).

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922 dari Inggris, Mesir pernah mengalami beberapa bentuk sistem politik. Hal ini tercermin dari adanya beberapa perubahan konstitusi. Tahun 1923 Mesir diundang dalam

sebuah konstitusi untuk mengatur sistem politik pada waktu itu. Bentuk negara adalah Monarki Konstitusional. Negara dikepalai oleh Raja dan Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem ini kemudian berubah setelah adanya kudeta militer tahun 1952(Mufrodi, 2010: 155).

Para Perwira bebas yang mengadakan kudeta itu membentuk Dewan Komando Revolusioner: Tugas utama dewan adalah menggantikan struktur politik lama dengan struktur politik baru yang memungkinkan suatu perubahan sosial. Maka pada tahun 1953, Dewan menyatukan pemerintahan dalam masa transisi selama tiga tahun. Untuk mengatur kehidupan politik pada masa itu, diundangkan Konstitusi. Konstitusi ini mengalami perubahan beberapa tahun kemudian. Yang berlaku sekarang adalah Konstitusi 1971(Mufrodi, 2010: 155).

C. Konstitusi 1923 dan 1930

Pemerintah Monarki Mesir banyak mengambil contoh dari pemerintahan monarki konstitusional Inggris. Pemerintah Inggris memang sengaja mewujudkan adanya kesamaan dalam rangka mempermudah penguasaan di wilayah Mesir. Pada masa pemerintahan Raja Fuad[1] Mesir didominasi oleh kepentingan Inggris. Meskipun sebagai negara monarki yang dibatasi oleh konstitusi, raja memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat. Seringkali rakyat merasa bahwa sistem pemerintahan monarki inilah sumber dari kesengsaraan dan penderitaan(Ochsenwald, 2013: 422).

Sultan Fuad menjadi raja Mesir, dan ini merupakan suksesinya perdana menteri. Politik menjadi konflik tiga arah antara nasionalis, raja, dan Inggris. Fuad menunjuk perdana menteri yang akan membuat konstitusi negara baru. Akhirnya, sebuah konstitusi disusun, dan pemilihan parlemen diadakan. Menurut konstitusi, Islam adalah agama negara, tetapi semua orang Mesir (termasuk Kristen dan minoritas Yahudi) harus sama di hadapan hukum.

[1] Raja Fuad adalah Raja Mesir yang memerintah pada tahun 1917-1936. Masa pemerintahan Raja Fuad, sektor kehidupan di Mesir didominasi oleh pemerintah Inggris. Meskipun Mesir diberi kemerdekaan tanggal 28 Februari 1922 dari Inggris, kondisi Mesir masih berada di bawah baying-bayang penguasaan Inggris. Lihat Mohamed Mustofa Ata, Judul asli tidak dicantumkan, Alih bahasa oleh M Yehia Eweis, *Egypt Between Two Revolution.* Cairo: Imprimerie Misr S.A.E, 1955, hlm 70-71.

Konstitusi diberikan kepada raja yang memiliki kekuatan yang cukup. Dia bisa membubarkan parlemen dan memveto tindakannya. Dia dapat mengangkat dan memberhentikan menteri serta dapat mengeluarkan dekrit tanpa adanya parlemen. Dia adalah komandan eksekutif negara. Sedangkan menteri bertanggung jawab kepada parlemen, tapi karena mereka menjabat di atas kekuasaan raja, mereka merasa sulit mengabdi kepada dua tuan. Dua dari lima senator ditunjuk oleh raja; tiga dari lima dipilih. Wajah Fuad bahkan muncul di perangko Mesir dan koin(Ochsenwald, 2013: 420).

Meskipun konstitusi dibuat oleh Inggris. Semua pasukan dan penasihat ialah orang-orang Inggris yang bertugas di Mesir dan dipilih sebagai panglima bagi tentara Mesir, Mesir sepenuhnya menjadi ragu bahwa mereka telah mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya.

Sistem pemerintahan monarki Mesir hanya akan membuat kebencian masyarakat semakin meningkat. Pemerintah hanya memihak pada raja, bangsawan, tuan tanah, dan kerabat-kerabat yang disenangi oleh raja. Kepentingan rakyat diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan raja. Selain kesenangan rakyat, pada awal kemerdekaan Mesir dari Inggris 1922 masih terjadi ketidakstabilan politik. Meskipun, demikian, sebenarnya Revolusi 1919 cukup membawa angin segar bagi Mesir. (Ochsenwald, 2013: 421)

Mesir diberikan hak kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang harus dijalani Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris menetapkan empat masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah (1) masalah Sudan, (2) keamanan Mesir dari intervensi asing, (3) pengawasan Terusan Suez, dan (4) penjaminan kepentingan asing dan minoritas(Ochsenwald, 2013: 422).

Pemerintahan Inggris tetap memiliki dominasi di Mesir tentu dengan alasan, bahwa Mesir dan Afrika Selatan merupakan pos terpenting untuk kerajaan Inggris (Andono,1956: 12). Mesir sebagai wilayah yang strategis banyak diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing baik dari Eropa maupun Asia. Wilayah Mesir pernah pula menjadi jajahan Turki.

Kemerdekaan Mesir tahun 1922 terwujud karena adanya kerjasama antara para pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja. Pada tahun 1923 Undang-Undang Dasar Mesir sebagai negara baru disahkan, namun Inggris masih mengawasi gerak dan

perkembangan Mesir. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan Inggris yang masih menetapkan gubernurnya di Mesir(Ochsenwald, 2013: 421).

Pada akhirnya konstitusi 1923 dibatalkan, dan sebuah konstitusi dengan undang-undang pemilu baru dipertahankan Wafdists yaitu partai oposisi pemerintah.Selain Partai Wafd, ada pula kelompok-kelompok lain yang menginginkan kemerdekaan sendiri. Golongan bangsawan kerajaan Mesir juga menyerukan tentang kemerdekaan. Banyak kalangan yang menyerukan kebebasan, semua mempunyai misi yang sama, yakni kemerdekaan bagi bangsa Mesir (Hoesin, 1953: 32).

Parlemen ditunda, Nahhas sebagai ketua parlemen menghasut kerusuhan, dan Inggris mengirim kapal perang. Sidqi sebagai nasionalis Mesir, memprotes intervensi asing untuk memulihkan ketertiban. Dalam kudeta Juni 1930 Sidqi muncul sebagai orang kuat. Sidqi mengepalai sebuah partai politik baru, Partai Rakyat. Dalam koalisi dengan berdikari, partai Rakyat mengalahkan partai Wafd, yang memboikot pemilu. Sidqi mampu membalikkan kediktatorannya melalui kelalaian pemerintah Inggris, yang melakukan manuver politik partai Wafd ke posisi pertahanan. Kemenangan Sidqi membawa perubahan diantaranya mengirim kembali muridnya untuk studi, para politisi menjadi patuh, dan pemilik tanah dengan senang hati mendukung aturan baru, karena mereka tidak tahan dengan arogansi dari para nasionalis Wafd yang banyak berpaling. Perjanjian dengan Inggris tidak lagi dilakukan; perdana menteri yang mencoba pun selalu gagal. Selanjutnya, Sidqi memahami bahwa pemerintah Inggris tidak akan ikut campur dalam urusan politik di negeri Mesir selama kepentingan kekaisaran Inggris tidak membahayakan (Andono,1956: 12).

Fuad tidak berniat lagi menerima penawaran potensial dari tempat sebelumnya. Sidqi jatuh dari kekuasaan pada bulan September 1933, dan prosesi perdana menteri tidak efektif. Kekuatan condong kepada raja yang mengumpulkan kekayaan besar (Hoesin, 1953: 32).

D. Perjanjian Anglo-Mesir 1936

Krisis eksternal muncul pada tahun 1935 ketika fasis Italia, yang sudah memerintah di Libya di sebelah barat Mesir, menginvasi Ethiopia, di selatan Sudan. Inggris gencar melakukan pembentukan militer di Mesir. Tekanan berat pada tahun 1935 menyebabkan raja Mesir untuk menerbitkan kembali konstitusi tahun 1923. Pada tahun 1936 Raja Fuad meninggal, dan diganti

anaknya, Raja muda Farouk (1936-1952), naik tahta. Dalam pemilu baru partai Wafd memenangkan 166 kursi dari 232 di deputi Camper memperoleh mayoritas suara di senat. Dengan dukungan yang solid, Nahhas menjadi perdana menteri dari kabinet Wafd, karena memiliki penduduk terbanyak di wilayahnya. Nahhas, ketua delegasi semua pihak yang bernegosiasi, mengumumkan Perjanjian Anglo-Mesir yang baru pada tanggal 26 Agustus, 1936(Hoesin, 1953: 32).

Sebuah usaha baru yang telah dicapai melampaui politik internal Mesir, perjanjian dengan Sudan menjadi batu sandungan bagi angkatan bersenjata Inggris. Kemudian pada tahun 1936 dibentuk pula aliansi Inggris Mesir dalam pendudukan militer atas Terusan Suez selama 20 tahun. Seiring berjalannya waktu, kedudukan Inggris semakin kuat di Mesir. Jamahan kekuasaan Inggris semakin terasa di seluruh sektor pertahanan(Ochsenwald, 2013: 421).

Mesir memiliki kekayaan antara lain pelabuhan, lapangan udara, dan instalasi penting. Pasukan Inggris menguasai seluruh daerah strategis di sepanjang Sungai Nil (Tayib,Sadaruwan, 1981: 7). Adanya keterikatan Mesir dengan Inggris kian mengeras lantaran Mesir memutuskan hubungan dengan Jerman. Mesir dengan bersikeras menyatakan perang terhadap Jerman menyebabkan suasana semakin memanas pasca pecahnya Perang Dunia II.

Penyelesaian konflik Mesir dan Sudan diakhiri dengan mengizinkan imigrasi Mesir tak terbatas ke Sudan dan penggunaan pasukan Mesir di Sudan (Perjanjian sebenarnya diatur dalam Konvensi Montreux 1937, yang dilaksanakan di Mesir). Campur tangan pengadilan dihapuskan (tapi ini dihentikan pada tahun 1949). Pemerintah asing akan tunduk pada hukum Mesir terutama perpajakan dan keuangan sehingga peningkatan pajak dan sumber lainnya yang naik menjadi dua kali lipat berakhir di 1930-an (Tayib,Sadaruwan, 1981: 7).

Perjanjian 1936 itu sangat populer di Mesir. Parlemen meratifikasinya dan belum pernah terjadi sebelumnya hal ini terjadi ketika pasukan Inggris bersorak di jalan-jalan Kairo. Sebuah tanda status baru Mesir itu masuk ke Liga Bangsa-Bangsa dalam popularitas 1937(Tayib,Sadaruwan, 1981: 7).

Kepemimpinan Raja Farouk dalam pemerintahan Mesir awalnya banyak memperoleh dukungan dari generasi muda, yakni para mahasiswa yang bersekolah di Universitas Al Azhar. Para mahasiswa memberikan

dukungan dan simpatinya kepada Raja Farouk. Hal tersebut terbukti dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang berlangsung satu hari sebelum Raja Farouk menikah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 1938, para mahasiswa melakukan arak-arakan di Kairo dengan meneriakkan yel-yel yang memuja Raja Farouk. Mereka mengungkapkan rasa kagum, simpati, dan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintahan Raja Farouk di Mesir(Tayib,Sadaruwan, 1981: 7).

Masyarakat Mesir hidup dalam sebuah tekanan yang menyebabkan ketidaknyamanan, meskipun hidup di tanah sendiri. Tekanan yang pertama justru berasal dari pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk, sedangkan yang kedua berasal dari pengaruh Inggris yang telah mengakar di Mesir. Masyarakat Mesir, terutama generasi muda mengalami keterbelakangan yang merupakan akibat dari tekanan tersebut. Keterbelakangan yang dialami oleh generasi muda Mesir menyebabkan mereka sulit memahami konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan Eropa modern. Bersamaan dengan solusi masalah tersebut, rektor Universitas Al-Azhar[2] melalui pidatonya mengungkapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Mesir harus segera belajar mengenai batasan-batasan geografi dan poros nasionalisme. Nasionalisme datang ke Mesir bersama-sama dengan peradaban baru dan membentuk dasar-dasar hubungan internal dan eksternal.

Memang, ada beberapa kalangan yang mendukung sepenuhnya kepemimpinan Raja Farouk di Mesir. Kalangan tersebut berasal dari masyarakat yang menginginkan perubahan pada pemerintahan Mesir, berbeda dengan masa pemerintahan Raja Fuad. Kepemimpinan Raja Farouk pada sekitar tahun 1936 sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai pihak. Partai Wafd yang merupakan salah satu partai memiliki banyak pendukung di Mesir sedikit menentang kepemimpinan Raja Farouk.

---

[2] Universitas Al Azhar merupakan pusat pengkajian Islam tertua di dunia, masih memerankan peranan dalam mengembangkan kesarjanaan Islam dan memelihara warisan Islam. Keberadaan Universitas Al Azhar cukup diperhitungkan dalam dunia politik Mesir. Penguasa manapun yang hendak bertahan di Mesir harus selalu memperhitungkan Universitas Al Azhar. LihatRifyal Ka'bah, *Islam dan Serangan Pemikiran: Sebuah Gejala al-Ghazwul Fikri.* Jakarta: Granada Nadia, 1994, hlm. 41.

Partai Wafd pernah melakukan bentrok dengan istana dan Universitas Al- Azhar di bawah pimpinan Mustafa Nahas Pasha,[3] bersikeras bahwa Raja Farouk tidak dapat melaksanakan kekuasaan penuh sebelum berumur dua puluh satu (yang baru akan dicapai tahun 1941), sedangkan raja mengklaim haknya ketika mencapai delapan belas tahun (Heikal, 1984: 13). Rektor Universitas Al-Azhar yang bernama Mustapha Al Maraghi juga lawan dari Partai Wafd, kemudian memberikan fatwa dan dukungan kepada Raja Farouk terkait dengan kekuasaannya sebagai pemimpin Mesir(Tayib,Sadaruwan, 1981: 7).

Pasha[4] jatuh, dan Partai Wafd tidak dapat membentuk pemerintahan yang baru. Keadaan tersebut membuat Raja Farouk gelisah terkait dengan keberlangsungan pemerintahan Mesir. Kemudian tokoh politik yang setia terhadap Raja Farouk, Hussein Sirry Pasha membentuk pemerintahan baru dengan mengumbar visi dan misinya untuk segera mengakhiri peperangan. Hussein Sirry Pasha berjanji akan segera mengadakan perombakan di berbagai bidang untuk memperbaiki keadaan(Tayib,Sadaruwan, 1981: 7).

Pada masa pemerintahan Raja Farouk, dikirimlah sebuah delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nahas Pasha ke Inggris dalam rangka musyawarah perjanjian keamanan bersama. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1936, empat bulan setelah Raja Farouk berkuasa di Mesir. Dengan dalih melaksanakan perjanjian tersebut, Inggris berhak menempatkan pasukan-pasukannya di wilayah Mesir. Hal tersebut terutama di sekitar wilayah Terusan Suez (Hoesin, 1953: 32).

Penempatan kembali pasukan-pasukan Inggris di wilayah Mesir sama halnya dengan kembalinya penguasaan Inggris atas wilayah dan

---

[3] Nahas Pasha adalah pemimpin Partai Wafd dan telah beberapa kali menjabat dalam kabinet pemerintahan di Mesir. Ia merupakan orang yang cukup berpengaruh dalam dunia politik Mesir, meski terkadang pendapatnya berlawanan dengan Raja Farouk, dan dianggap membahayakan posisi Raja Farouk di Mesir. Lihat Mohamed Moustofa Ata, hlm. 102-103.

[4] Husein Sirry Pasha membentuk kabinet baru pada awal bulan Juli 1952. Pada saat itu dunia politik Mesir dalam kondisi yang kritis. Husein Sirry Pasha ditunjuk oleh Raja Farouk untuk mengatasi kondisi tersebut dan mengembalikan keadaan menjadi lebih stabil. Namun, kabinet ini hanya berlangsung selama sekitar 3 minggu,setelah itu digantikan oleh Aly Maher Pasha. Lihat *"Krisis Politik Mesir", Pewarta Soerabaia* (Edisi Kamis 3 Juli 1952), Surabaya: N.V. Pewarta-Soerabaia, hlm. 1. (bagian 1)

pemerintahan di Mesir. Ada berbagai kalangan yang menentang kebijakan yang diambil oleh Raja Farouk tersebut. Berbagai protes dan demonstrasi dilancarkan melalui media surat kabar, maupun televisi. Guna meredam demonstrasi tersebut, maka dilakukanlah penangkapan oleh sejumlah oknum dalam rangka mengurangi perlawanan. Meskipun demikian, Raja Farouk tetap bersikeras melanjutkan perjanjian bilateralnya dengan pemerintahan Inggris dalam rangka menjaga keamanan Mesir (Heikal, 1984: 13).

Nahhas Pasha melemah ketika Raja Farouk pada tahun 1937 mengumpulkan kekuatan politik. Bahkan perjanjian itu tidak lagi diindahkan, salah satunya disebabkan oleh penaklukan Italia di Afrika Timur pada akhir 1937. Pemilihan yang baru, diatur pada tahun 1938 untuk mengalahkan Wafdists. Sebelum Perang Dunia II pecah, Farouk dan pejabatnya memperoleh kekuatan penuh dengan membentuk kabinet Liberal yang baik dan Wafdists dikeluarkan (Ka'bah, 1994: 41).

Pada tanggal 11 Juni 1940, ancaman Italia terhadap Mesir semakin meningkat. Pasukan-pasukan Italia sudah berjaga-jaga di berbagai sudut wilayah Mesir. Pemerintahan Inggris tetap tidak bergeming untuk memberikan bantuan dalam rangka menjaga stabilitas Mesir. Sejalan dengan semakin memanasnya keadaan di Mesir, terjadi persoalan politik dalam pemerintahan yaitu pada Kabinet Ali Maher (Ka'bah, 1994: 41).

E. PENUTUP

Peradaban Mesir dimulai sekitar 5000 hingga 3100 SM, dalam kajian geografis wilayah kebudayaan Mesir berada dalam wilayah Afrika. Namun, kebudayaan dan politik mempengaruhi wilayah-wilayah Arab. Pada abad modern , Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir meskipun hanya dalam waktu tiga tahun mulai dari tahun 1798-1801 M.Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandiria kemudian menuju ke Kairo.

Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis(Hitti, 2010: 925).Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris Terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di Timur. Sebaliknya apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga

menguasai seluruh Asia barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India(Hitti, 2010: 925).

Sistem pemerintahan monarki Mesir hanya akan membuat kebencian masyarakat semakin meningkat. Pemerintah hanya memihak pada raja, bangsawan, tuan tanah, dan kerabat-kerabat yang disenangi oleh raja. Kepentingan rakyat diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan raja. Selain kesenangan rakyat, pada awal kemerdekaan Mesir dari Inggris 1922 masih terjadi ketidakstabilan politik. Meskipun, demikian, sebenarnya Revolusi 1919 cukup membawa angin segar bagi Mesir. (Ochsenwald, 2013: 421)

Mesir diberikan hak kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang harus dijalani Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris menetapkan empat masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah (1) masalah Sudan, (2) keamanan Mesir dari intervensi asing, (3) pengawasan Terusan Suez, dan (4) penjaminan kepentingan asing dan minoritas(Ochsenwald, 2013: 422).

Apa yang dilakukan Mesir, begitu pula yang dilakukan negara-negara di Arab untuk terbebas dari Barat. Pola yang sama juga dilakukan oleh Suriah-Libanon. Indonesia juga mengikuti jejak negara-negara yang terjajah. Maka perjuangan negara Mesir menjadi salah satu peletakan dasar pembaharuan negara-negara bekas penjajahan asing.

Perseteruan ini
kapan tuntasnya
memang generasi
mau tau masalah
kita... taunya mereka
lahir di dunia untuk hidup
sebagai manusia

Sudah ku duga
kalau punya masalah
yang kena bukan kita saja tapi seluruh dunia
makanya PBB turun tangan

Sudah-sudah mau PBB, atau Liga Arab
semua harus satu pemikiran
untuk damai musuh itu bukan
Israel atau Palestina
tapi sekarang kelompok yang ingin
memecah belah... sadar dong..
tu ada "gerakan Intifadha" cikal bakal
semua gerakan radikalisme
di seluruh dunia

Jika direnungkan
berapa jiwa hancur karena
konflik ideologi yang membesar
menjadi konflik wiayah
Indonesiapun mengalami
hal yang sama mengenai
penyalahgunaan HAM

Belajar dari Konflik Arab-Israel
Mari kita pupuk
persaudaraan dan persatuan
demi kesejahteraan anak negeri,
dan anak bangsa
sebagai Global citizenship

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan perbandingan Mesir dan Indonesia, dan anaisislah strategi membangun negaranya

PENGUMPULAN HASIL

Portofolio

KEGIATAN REFLEKSI

Bagaimana belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang gemilang?

____

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI

Across

4. Bentuk negara Mesir tahun 1923.
7. Lembag pendidikan yang dibangung Napoleon di Mesir
8. Ketua Partai Rakyat di Mesir
9. Orang Inggris yang menjadi komisaris tinggi di Mesir
10. Seorang nasionalis yang menjadi menteri pendidikan yang ditekan oleh pihak komisioner tinggi Inggris, untuk mengakui kemerdekaan Mesir

Down

1. Orang Perancis pelopor nasionalisme Mesir
2. Partai oposisi pemerintah
3. Kepala komisi untuk melakukan penyelidikan yang sifatnya protektorat di Mesir
5. Raja Mesir yang memerintah pada tahun 1917-1936
6. Wilayah strategis yang menjadi incaran bangsa Barat di Mesir

Tugas terstruktur:

Analisislah kepentingan Barat yang mendominasi di Mesir dan beberapa penyelesaian hingga tahun 1940!

BAB VI

KEMERDEKAAN SURIAH DAN LIBANON

6.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai Munculnya pengaruh Prancis,Kemerdekaan Suriah dan Libanon dan meredupnya kekuasaan Prancis,Hubungan dengan Barat dan negara-negara Barat

6.2 Relevansi

Setiap individu dapat mengembangkan karakternya untuk selalu kritis menghadapi segala situasi dan zaman, serta mampu menjaga keutuhan bangsa dengan mengembangkan prestasi bagi bangsa dan negara.

6.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan Kemerdekaan Suriah dan Libanon serta mengembangkan kepekaan untuk pembangunan karakter bangsa.

Glosarium

1. *de jure adalah* ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum"
2. *Wilayah Mandat* adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai.
3. *Sekuler* adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

A. Hubungan Suriah dan Libanon

Lebanon dan Suriah adalah negara yang memiliki hubungan khas tersendiri, secara adat istiadat ditinjau dari sejarah keduanya maupun secara geografi, Suriah dengan Lebanon merupakan negara bertetangga yang berbatasan wilayahnya secara daratan. Lebanon merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel. Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok agama dan pemerintah Lebanon sendiri mengalami kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi (Hourani, 1946: 12).

Masuknya pasukan militer Suriah dalam upaya melerai konflik internal Lebanon pada tahun 1976, adalah atas permintaan dari kekuatan yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan Lebanon. Di pihak lain, Liga Arab juga menyatakan dukungannya pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Ryadh tahun 1976 terhadap keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon. Pasukan militer Suriah sebanyak 35000 personel masuk ke Lebanon sekitar bulan Januari 1976, sembilan bulan setelah berkobarnya perang saudara di Lebanon, Suriah melakukan penyelesaian konflik melalui gencatan senjata (Sihbudi, 1993: 66).

Peranan pasukan militer Suriah selama ditempatkan di Lebanon awalnya adalah berusaha mengatasi perang saudara yang terjadi di Lebanon, tetapi selanjutnya pasukan militer Suriah justru terlibat tidak hanya dalam masalah konflik internal yang terjadi di Lebanon bahkan dengan masalah eksternalnya yaitu dalam masalah konflik antara Lebanon dan Israel. Keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon pada awalnya dilatarbelakangi oleh faktor kepentingan keamanan, hal tersebut dikarenakan letak geografi Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah Lebanon (Gelvin,1998: 38).

B. Munculnya pengaruh Prancis

Prancis mendapatkan hak atas Levant (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon) dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang akta mandatnya ditanda tangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis

dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya perang salib. Pada saat itu Prancis menerima Kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Henri IV, Richelieau dan Louis XIV. Pada 1740, Prancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan reverensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina dan hak istimewa Prancis tersebut dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit. (Lenczowski, 1993: 198)

Tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya di Levant, selain itu masyarakat Suriah pada saat itu lebih setuju berada dibawah mandat Inggris atau Amerika dari pada Prancis. Melihat kondisi tersebut, Prancis selanjutnya menyerang Damaskus dan mengusir Emir Faisal sebagai pemimpin tentara padang pasir yang nasionalis yang memiliki kekuasaan atas daerah pedalaman Suriah pada saat itu. (Khoury, 2004: 429-431)

Tahun 1931, Lebanon mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran. Hal tersebut memaksa komisaris tinggi Prancis menghapus konstitusi dan membentuk pemerintahan sementara untuk membenahi keadaan kas negara. Krisis tersebut juga membuat Prancis mengubah Lebanon menjadi negara korporatif semiotoriter, selanjutnya komisaris tinggi yang baru, Count de Martel memberlakukan konstitusi baru Lebanon pada 2 Januari 1934 yang isinya tidak menyatakan agama resmi negara, menjamin perwakilan profesi, membatasi wewenang parlemen, memperkuat kekuasaan eksekutif dan menjaga keuntungan negara dari pembelanjaan yang tidak bertanggung jawab(Lenczowski, 1993: 198).

Selanjutnya secara bertahap tradisi baru dibentuk yaitu Presiden harus orang Katolik Maronit dan perdana menterinya orang Muslim Sunni tujuannya agar ada keseimbangan diantara dua kelompok mayoritas Lebanon. Pemberlakuan Millet atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kekuatan politik di Lebanon terbagi diantara pemimpin agama, partai politik dan terdapat kelompok bersama dengan Prancis. Pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok yang menentang dan menuntut dihapuskannya pemerintahan mandat. (Lenczowski, 1993: 199)

Prancis pada tanggal 28 September 1941 memberikan kemerdekaan kepada Suriah, dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Untuk pelaksanaanya, Jenderal Catroux mengangkat Seikh Taj ad-din sebagai Presiden Suriah dan Alfred Naccache sebagai Presiden Lebanon (Sihbudi, 1993: 66).

Pada tahun 1973 perang antara Arab-Israel kembali berkecamuk yang bermula dari perang antara Mesir-Israel, inisiatif perang tersebut dimulai oleh Mesir yang didasarkan atas tindakan Israel menyerang Lebanon Selatan yang merupakan pusat gerilyawan Palestina. Tindakan Mesir tersebut mendapat dukungan dari negara Arab lainnya. Bersama dengan Suriah, Mesir berhasil merebut benteng Israel "Lini Berlev" pada tanggal 6 Oktober 1973. Sementara Suriah sendiri melakukan perlawanan terhadap Israel tidak kalah gencarnya sehingga mampu menggagalkan setiap usaha negara tersebut untuk merebut wilayah Suriah. Tetapi pada tanggal 9-10 Oktober 1973 Israel berhasil melumpuhkan Suriah dengan membombardir Damaskus tanpa perlawanan berarti dan Suriah kembali kehilangan sebagian lagi wilayah Dataran Tinggi Golan (Gelvin,1998: 38).

C. Kemerdekaan Suriah-Libanon dan Meredupnya Kekuasaan Prancis

Pada 8 Juni 1941, pasukan Inggris dibawah pimpinan Jenderal Sir Henry Haitland Wilson menyerang Suriah melalui Palestina, transyordania dan Irak, tetapi unsur-unsur Prancis bebas menyertai penyerangan tersebut, keadaan tersebut dikarenakan pada saat itu Suriah termasuk juga Lebanon berada dibawah kekuasaan Vichy dan pejabat Prancis yang anti-Inggris dan menolak Komite Prancis Bebas bentukan Jenderal de Gaulle. Sehari setelah invasi, panglima Prancis, Jenderal Catroux menyatakan bahwa pemerintah Prancis Bebas akan mengakhiri mandatnya atas Suriah dan Lebanon. Dengan demikian keduanya akan merdeka dan akan merundingkan hubungan timbal balik dengan Prancis. Pada saat yang sama Inggris pun setuju dengan pernyataan Prancis tersebut. Selanjutnya Jenderal de Gaulle menunjuk jenderal Catroux sebagai "Delegasi Jenderal dan Berkuasa Penuh Prancis Bebas di Levant", menggantikan jabatan komisaris tinggi pada 24 Juni 1941. Dalam upaya tersebut Prancis menyertakan Inggris didalamnya, namun konsep mengenai kemerdekaan Suriah dan Lebanon antara Inggris dan Prancis ternyata berbeda sehingga Jenderal de Gaulle

melakukan penangguhan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Prancis untuk kembali memperkuat posisi istimewanya atas Suriah dan Lebanon. Perbedaan antara Prancis dan Inggris selanjutnya tidak dapat disembunyikan sehingga menimbulkan kecurigaan keduanya dalam masalah penyelesaian Levant (Gelvin,1998: 38).

Tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan sementara dari Prancis. Banyaknya para kaum nasionalis yang berada di kursi parlemen di kedua negara tersebut memancing untuk bereaksi atas kondisi tersebut. Parlemen Lebanon, pada 8 November 1943 mengajukan sebuah resolusi untuk menghapuskan segala kekuasaan Prancis dari konstitusinya yang mengakibatkan ditahannya presiden republik dan seluruh anggota kabinet dilanjutkan penunjukkan Emile Edde sebagai kepala negara pemerintahan Lebanon oleh delegasi Jenderal Prancis baru, Helleu. Sebelumnya, pada 28 September 1941, Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah, yang isi naskahnya adalah(Lenczowski, 1993: 199):

1. Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat;
2. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya;
3. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya;
4. Suriah bersedia membantu Prancis selama perang;

Segala syarat terdahulu dengan perjanjian Prancis-Suriah yang baru yang menjamin kemerdekaan Suriah. Tindakan tersebut juga diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Isi naskahnya hampir sama dengan isi naskah proklamasi Suriah. Untuk pelaksanaanya Jenderal Catroux mengangkat Seikh Taj ad-din sebagai presiden Suriah dan Alfred Naccache sebagai presiden Lebanon. Menanggapi hal tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut secara de jure, dan mengangkat Jenderal Spear sebagai duta besar pertama untuk kedua negara tersebut. Negara-negara Arab lainnya justru merasa ragu dengan kejadian tersebut, dilain pihak Amerika tidak langsung mengakui kemerdekaan kedua negara baru tersebut tetapi bersikap menunggu proses berakhirnya mandat secara resmi dan tercapainya kesepakatan resmi bilateral Prancis dengan Suriah dan Lebanon (Khoury, 1987: 25).

Di lain pihak, Prancis ternyata masih belum siap untuk mengalihkan fungsi pemerintahan secara langsung kepada kedua negara tersebut. Ditundanya penyusunan konstitusi dan penunjukkan presiden oleh pihak

Prancis menimbulkan pertentangan baru dalam masyarakat, terutama dari para kelompok nasionalis dan kelompok sayap-kiri; sosialis dan komunis. Akibat kondisi tersebut, pemerintah Prancis akhirnya memutuskan memberlakukan kembali konstitusi lama yang pernah dibuat pada Maret 1943 dan mengupayakan diselenggarakannya pemilihan umum sesegera mungkin. Meski demikian kemerdekaan secara sempurna ternyata belum dirasakan oleh kedua negara tersebut karena pengawasan Prancis yang masih ketat terhadap kelangsungan pemerintahan keduanya. Delegasi Jenderal masih memiliki hak untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan parlemen dan menghapuskan konstitusi dengan alasan sesuai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Prancis juga masih menguasai tata tertib pemerintahan dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan dan sensor atas jurnalistik. Lebih jauh lagi agen intel Prancis Services Speciaux masih banyak berkeliaran di kedua negara tersebut (Khoury, 1987: 25).

D. PENUTUP

Sama halnya dengan bangsa Mesir, Suriah dan Libanon tidak lepas dari protektorat Barat khususnya Prancis. Adapun dampak dari pendudukan Prancis atas Suriah dan Libanon diantaranya:

1. izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah
2. mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit yang ada di Suriah
3. Tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya
4. Presiden harus orang Katolik Maronit dan perdana menterinya orang Muslim Sunni tujuannya agar ada keseimbangan diantara dua kelompok mayoritas Lebanon.
5. Pemberlakuan Millet atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kekuatan politik di Lebanon terbagi diantara pemimpin agama, partai politik dan terdapat kelompok bersama dengan Prancis.

Pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok yang menentang dan menuntut dihapuskannya pemerintahan mandat.

Tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan sementara dari Prancis. Banyaknya para kaum nasionalis yang berada di kursi parlemen di kedua negara tersebut memancing untuk bereaksi atas kondisi tersebut. Parlemen Lebanon, pada 8 November 1943 mengajukan sebuah resolusi untuk menghapuskan segala kekuasaan Prancis dari konstitusinya yang mengakibatkan ditahannya presiden republik dan seluruh anggota kabinet dilanjutkan penunjukkan Emile Edde sebagai kepala negara pemerintahan Lebanon oleh delegasi Jenderal Prancis baru, Helleu.

Selama ini kita menjalani hubungan baik namun jika hubungan bilateral ini dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak aku memilih mundur
Demi perjuangan rakyat Suriah-Libanon aku berjanji untuk menghapus segala bentuk penetrasi asing
caranya.... kita lakukan Revolusi kemerdekaan, jika tidak berhasil kita pakai langkah resolusi dengan bantuan PBB
BENAR! SEGALA BENTUK PENJAJAHAN DI DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUA DENGAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SELARAS DENGAN HUKUM DASAR NEGARA INDONESIA

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan perbandingan Mesir dan Indonesia, dan anaisislah strategi membangun negaranya

PENGUMPULAN HASIL

Portofolio

KEGIATAN REFLEKSI

Bagaimana belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang gemilang?

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI

Across

2. Presiden Suriah tahun 1941
4. Bangsa Barat penguasa Suriah dan Lebanon
6. Jendral Perancis yang memproklamasikan kemerdekaan Suriah.
8. Agen intel dari Perancis untuk negara Suriah dan Lebanon
9. Kota yang dibom oleh Israel dalam melumpuhkan Suriah pada tanggal 9-10 Oktober 1973
10. Wilayah pusat yang merupakan penyerangan Israel di Lebanon Selatan

Down

1. Benteng Israel yang berhasil direbut Mesir dan Suriah
3. Duta besar Perancis pertama untuk Suriah dan Lebanon
5. Presiden Lebanon tahun 1941.
7. Pendukung keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon

Tugas Terstruktur:
Analisislah perkembangan Sudan –Libanon pasca pendudukan Prancis!

BAB VII

PERANG PALESTINA ISRAEL SERTA DAMPAKNYA BAGI ARAB DAN DUNIA

7.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai Latar belakang Konflik,Upaya Kedua Belah Pihak untuk Meraih Kemerdekaan, Upaya perdamaian konflik Arab-Israel, Dampak bagi negara-negara Arab, dan Dampak konflik bagi dunia Internasional

7.2 Relevansi

Setiap pribadi mampu melihat setiap konflik sebagai suatu pembelajaran bukan sebagai pemicu masalah.

7.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis Perang Arab Israel dan mampu menjungung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Glosarium

1. *Aneksasi* adalah penggabungan adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian atau kota. Aneksasi juga berarti penggabungan dua hal, biasanya hal yang lebih kecil melekat pada sesuatu yang lebih besar.
2. *PLO* adalah Organisasi pembebasan rakyat palestina. PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada 1950-an.
3. *Intifada* adalah sebuah istilah Islam yang berarti perlawanan. Dalam konflik Israel-Palestina, Intifadah mencakup seluruh gerakan perlawanan untuk merebut kembali tanah Palestina pra-Israel, aksi ini didorong oleh rasa tertindas dan kehilangan yang dirasakan oleh para penduduk Palestina sejak peristiwa pengusiran paksa oleh tentara Yahudi setelah perang 6 hari.

A. Latar belakang Konflik

Konflik Palestina-Israel hingga saat ini masih menjadi isu yang dinamis. Dari segi historis, konflik Palestina-Israel sendiri telah berakar cukup lama, dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antara aktor-aktor konflik. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab konflik Palestina-Israel (Ben-Gurion, 1963, 65).

1. Perbedaan Mengenai Tanah Leluhur

Konflik yang terjadi antara bangsa (dan kemudian melibatkan negara-negara Arab) Palestina dengan bangsa Yahudi, (yang kemudian mendirikan negara Israel) pada dasarnya merupakan konflik yang telah berakar ratusan tahun.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik sengketa yang cukup panjang apabila kita meniliknya dari waktu maupun usaha rekonsiliasi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa tersebut. Konflik bermula ketika gerakan Zionisme Yahudi yang di populerkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl mulai marak di kawasan Eropa. Gerakan tersebut menyebabkan perpindahan masyarakat Yahudi ke Asia barat. Sementara pada saat itu wilayah Palestina dan Israel menjadi kekuasaan Ottoman (Dowty, 2001: 30).

Pada awal abad ke-20, Kekaisaran Turki Ottoman mulai melemah dan kekuatan Barat mulai masuk ke wilayah Mediterania, termasuk Palestina. Sebelum berakhirnya perang dunia pertama Palestina merupakan bagian dari wilayah Ustmaniah (1517-1918). Sepanjang perang dunia pertama, ada beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh kuasa bersekutu yang terdapat rancangan terhaap pembagian wilayah yang berada dibawah kepemimpinan dinasti Utsmani di wilayah Asia barat. Diantaranya terdapat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 dan perjanjian Versailes pada 1919. Adanya kuasa sekutu pada daulah Utsmaniah terlihat jelas di perjanjian Sam Remo pada 25 April 1920 yang berisi bahwa Prancis mendapat mandat di wilayah Syiria dan Lebanon sedangkan Inggris mendapat mandat di wilayah Palestina dan Iraq. Pada 24 Juli 1922 mandat Inggris dideklarasikan Liga Bangsa- Bangsa yang ikut menyetujui adanya hak asasi dan agama pada penduduk bukan Yahudi di Palestina. Dalam pernyatan ini sangat terlihat jelas bahwa orang Palestina tidak dianggap sebagai rakyat tetapi dianggap

sebagai komunitas bukan Yahudi yang berarti mereka tidak punya kuasa atas politik yang ada di wilayah Palestina. Hal itu tentunya menambah semangat bagi Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina (Rozali,2011: l21).

Ketika masa Perang Dunia I, seorang komisaris tinggi Inggris di Mesir melakukan korespondensi tersembunyi dengan salah satu pejabat Kekaisaran Turki Ottoman. Pihak Inggris meminta bantuan rakyat yang tinggal di Arab untuk menggulingkan Kekaisaran Turki Ottoman, dan sebagai imbalannya pihak Inggris akan membantu pendirian negara Arab yang independen, termasuk Palestina. Korespondensi yang direncanakan ini nyatanya berhasil menggulingkan kerajaan Turki Ottoman dan Inggris mengambil alih wilayah kekuasaan kerajaan tersebut selama berlangsungnya Perang Dunia I. Namun demikian, ternyata pihak Inggris juga membuat perjanjian lain yang bertentangan dengan korespondensi tersembunyi yang sebelumnya telah dilakukan. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu menyusun sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour yang isinya mengemukakan bahwa pemerintah Inggris mendukung terciptanya 'a Jewish national home in Palestine'. Deklarasi ini disusun sebagai bentuk apresiasi pemerintahan Inggris terhadap dukungan Yahudi yang dianggap esensial dalam perang melawan Ottoman. Akan tetapi, jelas bahwa deklarasi tersebut juga mendorong kegelisahan yang dirasakan oleh rakyat Arab, terutama non-Yahudi (Dowty, 2001: 120).

Setelah perang usai, Inggris dan Prancis membagi dua wilayah bekas kekuasaan Ottoman dan meyakinkan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk menyetujui otoritas quasi-colonial mereka atas wilayah tersebut. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, pihak Arab merasa kesal terhadap pihak Inggris karena dianggap tidak mampu memenuhi janji atas pendirian negara Arab yang independen. Di Palestina, situasi yang terjadi jauh lebih rumit karena Inggris turut mendukung upaya pihak Zionis untuk menjadikan wilayah itu sebagai homeland bangsa Yahudi. Hal ini mendorong terjadinya konflik antara pihak Palestina Arab dengan pihak British Mandate, dan juga Palestina Arab dengan pihak Yahudi. Konflik ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Konflik dan pemberontakan ini menelan banyak korban dan berlangsung selama bertahun-tahun. Seiring dengan terjadinya Perang Dunia II, pergolakan yang terjadi antara pihak-pihak tersebut akhirnya membuat Inggris melepaskan mandatnya atas wilayah Palestina (Dowty, 2001: 120).

2. Zionisme

Selanjutnya pada awal abad 19 tepatnya tahun 1881 ada pertentangan yang terjadi antara gerakan Zionisme dengan nasionalisme Arab pada masa akhir abad ke-19. Zionisme merupakan sebuah gerakan masyarakat Yahudi yang ingin kembali dan memperoleh 'tanah asli' mereka (Shlaim: 1990, 38).[1]

Pada masa itu, baru sekitar 565,000 rakyat Arab dan 24,000 Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina. Pihak Zionis berpendapat bahwa tanah Palestina merupakan tanah leluhur mereka dan mereka harus menjadikan tanah tersebut rumah mereka. Pihak Zionis kemudian berniat untuk mendirikan sebuah negara otonom yang keseluruhan atau paling tidak mayoritas rakyatnya merupakan pihak Yahudi. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di daerah tersebut telah tinggal masyarakat Arab, dengan 90% di antaranya beragama Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah Palestina semakin banyak didatangi oleh pendatang Yahudi. Hal ini mulai memunculkan konflik-konflik kecil di antara pihak Yahudi dan Arab karena terjadinya ketimpangan dan diskriminasi yang dirasakan oleh pihak Arab (Cohen, 1998: 48).

Pihak Arab yang sejak lama tinggal di wilayah Palestina tentunya tidak merasa senang mengetahui kedatangan dan intensi pihak Zionis untuk menjadikan tanah Palestina sebagai homeland bangsa Yahudi. Mereka berusaha melawan dan mencegah pihak Zionis untuk memperoleh wilayah yang lebih luas karena pihak Arab menyadari bahwa hal tersebut akan dapat mengancam eksistensi mereka di tanah Palestina. Hal inilah yang pada dasarnya memicu terjadinya konflik antara pihak Arab dengan pihak

[1] Zionisme merupakan gerakan nasional orang Yahudi dan budaya Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai Tanah Israel. Berbagai agamawan Zionisme mendukung orang-orang Yahudi menegakkan identitas Yahudi mereka, menentang asimilasi Yahudi ke dalam masyarakat lain dan harus dibebaskan dari diskriminasi, pengucilan, dan penganiayaan yang secara historis terjadi dalam kondisi mereka sebelumnya (Holocaust oleh Nazi Jerman). Zionisme muncul pada akhir abad ke-19 di Eropa tengah dan timur yang dipelopori oleh seseorang berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl sebagai gerakan kebangkitan nasional. Sejak berdirinya Negara Israel, gerakan Zionis terus berlanjut terutama untuk melakukan advokasi atas nama negara Yahudi dan menyerukan peringatan untuk melanjutkan tentang eksistensi keberadaannya dan keamanan.

Zionis Yahudi. Pertentangan di antara kedua belah pihak tersebut nyatanya diperumit dengan kondisi bahwa pada masa itu, wilayah Palestina telah menjadi bagian daerah kekuasaan dari Kekaisaran Turki Ottoman selama 400 tahun. Kekaisaran Turki Ottoman yang telah berkuasa lama tersebut pada dasarnya dianggap sebagai penguasa yang diskriminatif bagi rakyat yang tinggal di wilayah Palestina tersebut (Shlaim: 1990, 38).

3. Gerakan Intifadha

Pada tahun 1974 nasib Palestina mengalami pergolakan setelah terbentuknya kesepekatan perdamaian antara Israel dengan Syiria serta antara Israel dan Mesir pada tahun 1979. Ketika PLO (Palestine Liberation organization) tidak lagi mendapat bantuan dari negara-negara besar seperti Arab yang pada awalnya berpihak pada Palestina, maka satu-satunya pilihan yang diambil oleh PLO adalah beraliansi dengan Irak. Ketidakpastian nasib Palestina pun semakin bertambah ketika jalur Gaza dan Tepi barat yang seharusnya menjadi wilayah otonomi Palestina sesuai dengan kesepakatan Camp David 1979, belum juga diserahkan oleh Israel. Saat itu, PLO sudah tidak memiliki pilihan militer yang lain dan tidak mempunyai pilihan strategi yang efektif untuk mempertahankan keberadaannya. Keadaan inilah yang memicu terjadinya gerakan Intifada yakni pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel pada bulan desember 1987 (sering disebut gerakan lemparan batu) (Smith, 1984: 13).

Intifada adalah ledakan kebencian dan frustasi yang secara spontan muncul pada generasi muda dan golongan miskin masyarakat Palestina. Kemarahan ini tidak hanya ditunjukan kepada Israel tetapi juga kepada pemimpin Palestina hingga saat itu yang belum juga berhasil memberikan kepastian terhadap wilayah dan masyarakat Palestina. Bagi golongan miskin Palestina, kekuasaan Israel semakin lama semakin menyudutkan mereka dengan pungutan pajak dan pengangguran yang terus bertambah. Israel juga masih melakukan perampasan tanah terhadap mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki lahan untuk bekerja. Sedangkan untuk generasi muda Palestina, mereka tumbuh dan hidup dibawah kekusaan serta perlakuan kasar Israel terhadap orang tua mereka yang disaksikan sendiri oleh mereka. Generasi muda ini juga tidak mengerti ketika orang tua mereka tetap patuh pada aturan yang ditetapkan penjajah pada saat mereka sendiri telah dipermalukan. Ketika para orang

tua masih berharap atas kepemimpinan PLO, para pemuda melihat bahwa harapan telah memudar seiring dengan penurunan kekuatan PLO(Smith, 1984: 14).

Gerakan Intifada secara cepat menyebar dari Gaza hingga ke tepi barat dari jalur tersebut. Selama berlangsungnya kegiatan terebut berbagai kekerasan terjadi seperti pelemparan batu, penembakan, penusukan, dan pelemparan bom yang seluruhnya itu ditujukan kepada Israel. Kelompok buruh dan komite wanita pun akhirnya bergabung dengan perlawanan ini. Alasan yang kemudian menyatukan berbagai golongan masyarakat Palestina ini adalah didasarkan atas perlakuan Israel sendiri yang tidak pandang bulu terhadap mereka. Masyarakat Palestina kemudian memboikot barang-barang Israel dan menolak untuk membayar pajak yang dibebankan Israel kepada mereka. Israel kemudian membalas pemberontakan ini dengan menutup suplai makanan ke desa-desa dan melakukan karantina penuh. Israel bahkan memberikan perintah kepada penembak jitu untuk membunuh orang-orang yang melakukan pelemparan batu. Pada akhir tahun 1989,diperkirakan 626 Palestina dari 43 Israel yang telah terbunuh, sekitar 37.439 Arab terluka, dan antara 35.000 sampai 40.000 ditahan (Robinson, 1997: 57).

Tujuan dari gerakan Intifada sendiri adalah untuk mendorong PLO menegaskan kembali Negara Palestina. Peristiwa gerakan Intifada ini diprakarsai oleh masyarakat Palestina sendiri. Namun, akibat dari pemberontakan masyrakat miskin Palestina tersebut menyebabkan PLO harus mengubah jalur politiknya. Diakhir tahun 1988 PLO secara resmi untuk menerima solusi dua Negara (Partition Plan) yang berarti, selain mebentuk Negara Palestina organisasi ini telah memberikan pengakuannya terhadap keberadaan Negara Israel (Robinson, 1997: 57).

4. Munculnya Hamas

Hamas adalah gerakan yang "menganggap Islam sebagai jalannya yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi dan persespi. Gerakan ini menggunakan hukum Islam". Gerakan ini berdiri pada 14 Desember 1987. Hamas merupakan sayap dan penerus dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Hamas memiliki tujuan untuk memerdekakan tanah Palestina dan mendirikan negara Islam di Palestina. Hamas juga ingin mendirikan pendidikan yang universal bagi generasi muda untuk dapat memenuhi tujuan – tujuan yang dicita – citakan (Muchsin, 2015: 404).

Hamas memiliki pemimpin utama yaitu yaikh al-Intifadhah. Sedangkan untuk bagian wilayah Gaza dipimpin oleh Abd- Al aziz Al-Rantisi, Mahmud al- Hazad dan Abd Al- Fatah. Untuk wilayah tepi barat dipimpin oleh Jamal Salim, Hasan Yusuf dan Jamal Natasyah. Khalid Mis'al adalah kepala biro politik yang berada di luar Palestina. Dengan memiliki pemimpin – pemimpin tersebut Hamas memiliki tekad kuat untuk mewujudkan peperangan dengan Israel yang kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dan berharap kelak akan mewujudkan berdirinya negara Palestina. Dengan memiliki target tersebut Hamas juga mengguncang etnis Yahudi, ia berhasil membunuh 70 Yahudi dan 340 orang luka – luka dalam kurun waktu satu bulan yaitu dari bulan febuari – maret 1996. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada perjanjian dan kesepakatan antara PLO dengan Israel yang berisi pemerintahan otonom bagi Palestina di Gaza dan tepi barat sejak 1994 (Muchsin, 2015: 404).

B. Upaya Kedua Belah Pihak untuk Meraih Kemerdekaan

Ada beberapa alasan mengapa Israel menyerang Palestina diantaranya:

1. Pembagian Wilayah

Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung lama sejak tahun 1947 (Morris, 1988: 107). Pada masa itu tepatnya pada bulan Mei, dilakukan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasil dari pembagian wilayah adalah 54% dari wilayah diserahkan untuk Israel sedangkan sisanya untuk Palestina yakni 46%. Apabila ditinjau dari segi jumlah penduduk yang ada antara Israel dan Palestina, prosentase masyarakat Israel yakni bangsa Yahudi hanya berkisar 31,5 % dari populasi yang ada(Muchsin, 2015: 404).

2. Rasa Tidak Puas

Hal inilah yang menimbulkan reaksi balik dari rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Sementara bangsa Yahudi menganggap pembagian yang telah dilakukan itu tidaklah cukup. Mereka menginginkan wilayah yang lebih luas. Sejak itulah terror yang meluas terhadap rakyat Palestina berlangsung. Pada tanggal 9 April 1948

dilancarkan pembantaian massal, serangan yang dilakukan milisi Irqun dan sebanyak 259 penduduk tewas (Shlaim, 2001: 24).

Akibat dari dua alasan tersebut, perang terus terjadi antara Israel dan Palestina. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara Israel. Tanah yang menjadi sengketa antara kedua bangsa merupakan koloni dari Inggris setelah perang dunia I. bangsa Yahudi menginginkan negerinya berdiri sendiri diatas tanah tersebut sementara di tanah tersebut juga didiami bangsa Palestina. Populasi bangsa Yahudi saat itu hanya 56.000 sedangkan Palestina mencapai satu juta(Muchsin, 2015: 404).

Sengketa ini terus berjalan seiring dengan tekanan yang dilakukan oleh penguasa Israel. Tentara Israel melakukan penyerangan di berbagai wilayah Paestina, salah satunya adalah Ramallah, di kawasan Tepi Barat , Palestina. Israel mengawali blokade di Ramallah dengan mengirim anggota Batalion Egoz. Tentara Israel memburu warga Palestina khususnya yang dianggap sebagai teroris. Kondisi seperti itu membuat warga dan petinggi pemerintah Palestina meradang. Apalagi respon dunia khususnya Amerika Serikat sangat lambat. Selain mengepung dan menyerang kota Ramallah pasukan Israel juga melakukan serangan kilat ke Tepi Barat. Hanya dalam waktu kurang dari tiga hari, Kota Jenin, Tulkarem, Betlehem, Qalqilya, dan Nablus di Tepi Barat secara de facto berada dalam kontrol Israel(Shlaim, 2001: 24).

Rakyat Palestina yang merasa terusir dari daerah yang mereka diami selama ratusan tahun tidak tinggal diam saja. Mereka terus melancarkan perang terhadap Israel sehingga muncullah perang yang terjadi antara tahun 1948, 1967 dan tahun 1971. Perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kembali wilayahnya bergabung dalam suatu organisasi yaitu PLO. September tahun 1982 terjadi pembantaian besar-besaran atas pengungsi Palestina di kamp pengungsian Sabra dan Shatila yang menewaskan 2700 pengungsi hanya dalam waktu 1 jam. Palestina sendiri akhirnya membentuk milisi yang dikenal dengan Intifada. Perlawanan dari rakyat Palestina bergulir sejak tahun 1987. Israel sendiri berusaha untuk meredam dengan upaya memberikan konsensi pada perjanjian Oslo di tahun 1993 mengenai kesepakatan antara Israel dan Palestina yang akan memberikan kesempatan kemerdekan bagi bangsa Palestina walau pada akhirnya Israel melanggar perjanjian tersebut pada tahun 1998(Ghanem, 2001: 120).

Harapan rakyat Palestina atas kemerdekaannya dengan berdirinya Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukota Yerusalem Timur ternyata mengalami kegagalan karena perjanjian tersebut dilanggar oleh Israel. Sebaliknya dengan perjanjian tersebut semakin memperjelas kuatnya kontrol Israel atas daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kebijakan apartheid yang membedakan warna dan bersifat sangat diskriminatif diterapkan. Israel sendiri telah menguasai perekonomian di daerah Tepi Barat baik tanah maupun sumberdaya alamnya, dengan ditopang dengan kekuatan militer yang berfungsi untuk terus mengawasi rakyat Palestina. Perlawanan Intifada bergolak pada akhir September 2001 setelah terjadiya bentrokan antara Palestina dan Israel yang juga dipicu oleh kedatangan Ariel Sharon yang dianggap bertanggungjawab atas pembantaian di kamp pengungsian Sabra dan Shatila. Pada bentrokan ini 7 orang Palestina tewas dalam Mesjid Al Aqsa (Ghanem, 2001: 120).

C. Upaya Perdamaian Konflik Palestina-Israel

Meskipun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung alasan Israel karena sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik Israel. Sebaliknya negara-negara Arab berargumen bahwa karena Jerman yang melakukan genosida maka tanah Jermanlah yang harus disisihkan untuk dijadikan negara Yahudi. Dibalik semua intrik politik, Inggris secara sukarela mundur dari kepemilikan wilayah Arab dan Israel serta memberikan hak klaim wilayah/kemerdekaan kepada siapa saja yang siap untuk mengklaimnya. Berhubung Israel lebih siap maka mereka lebih dahulu memproklamirkan negara pada 14 Mei 1948 (Medding, 1990: 39).

Sebaliknya orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar disana tidak mau terima mejadi bagian negara Yahudi (Dalam literatur doktrin Islam pemimpin negara harus seorang Muslim) apalagi menurut kepercayaan orang Islam Palestina menjadi wilayah yang istimewa karena disitulah terjadi peristiwa Isra' Nabi Muhammad SAW dan juga tempat lahirnya nabi Ismail AS. Bagi umat Kristiani pula Palestina merupakan tanah air bagi Yesus Kristus. Dari segi sejarahnya berkaitan dengan perpindahan suku dari kabilah Ka'nan yang kemudian menetap di wilayah antara Timur laut mediterania sampai kesungai Jordan. Wilayah tersebut dinamakan Palestina. Perpindahan suku Ka'nan terjadi sebelum 3000 tahun sebelum masehi (al-a'ly,1993: 37-38) , sehingga bangsa Israel kemudian melihat orang Palestina

sebagai ancaman dalam negeri, begitu juga dengan bangsa Palestina yang menganggap Israel sebagai penjajah baru.

Beberapa usaha perdamaian yang telah dilakukan bahkan dengan bantuan PBB diantaranya:

1. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, 1967

Resolusi Dewan Keamanan PBB no 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi no 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah (Medding, 1990: 39).

2. Perjanjian Perdamaian Camp David, 1978

Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan. Kesepakatan pertama bersisikan penarikan mundur pasukan militer Israel dari semua wilayah yang didudukinya setelah Perang Enam Hari, yaitu Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Kesepakatan kedua bersikan pengakuan akan keberadaan Isarel dan perjanjian damai dengan Mesir (Oren, 1992: 21).

3. Konferensi Madrid, 1991

Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu dengan juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan (Bar-On, 1994: 29).

4. Perjanjian Oslo, 1993

Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat

dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun (Ghanem, 2001: 120).

5. Perjanjian Camp David, 2000

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina (Quandt, 2001: 43).

6. Inisiatif Perdamaian Arab, 2002

Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel (Medding, 1990: 39).

7. Peta jalan damai, 2003

Dalam kerangka Kuartet Asia barat, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana(Quandt, 2001: 43).

8. Annapolis, 2007

Pada tahun 2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008(Quandt, 2001: 43).

9. Washington 2010

Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu, dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan (Quandt, 2001: 43).

10. Siklus eskalasi dan gencatan senjata

Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014(Ghanem, 2001: 120).

11. KTT Paris, 2017

Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Prancis, membahas konflik Israel-Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut(Ghanem, 2001: 120).

Meski telah berkali-kali dilakukan usaha perdamaian sampai pada tingkat perjanjian Internasional yang telah dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga menghasilkan pembagian wilayah untuk kedua masing-masing pihak yakni Israel dan Palestina, tetapi pada kenyataannya tidak mampu secara langsung menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina(Ghanem, 2001: 101). Palestina dengan gerakan Intifadanya dan Israel dengan kekuatan bersenjata yang cukup kuat tetap saling menyerang dan bertahan satu sama lain.

Sepanjang perang dunia pertama, ada beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh kuasa bersekutu yang terdapat rancangan terhaap pembagian wilayah yang berada dibawah kepemimpinan dinasti Utsmani di wilayah Asia barat. Diantaranya terdapat perjanjian Sykes-Picot pada

tahun 1916 dan perjanjian Versailes pada 1919. Adanya kuasa sekutu pada daulah Utsmaniah terlihat jelas di perjanjian Sam Remo pada 25 April 1920 yang berisi Prancis mendapat mandat di wilayah Syiria dan Lebanon sedangkan Inggris mendapat mandat di wilayah Palestina dan Iraq. Pada 24 Juli 1922 mandat Inggris dideklarasikan Liga Bangsa-Bangsa yang ikut menyetujui adanya hak asasi dan agama pada penduduk bukan Yahudi di Palestina. Dalam pernyatan ini sangat terlihat jelas bahwa orang Palestina tidak dianggap sebagai rakyat tetapi dianggap sebagai komunitas bukan Yahudi yang berarti mereka tidak punya kuasa atas politik yang ada di wilayah Palestina. Hal itu tentunya menambah semangat bagi Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina (Rozali, AKamaruzaman,2011: l21).

D. Dampak Bagi Negara-Negara Arab

Pasca berdirinya negara Israel tersebut, konflik terbuka Arab-Israel memang makin tak terhindarkan lagi. Bahkan, dalam periode 1948-1992, terjadi 63 Militarized Interstate Disputes (MIDs) alias Konflik Militer Antarnegara, dengan 18 di antaranya berbentuk Perang Terbuka (Full Fledged War) antara Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Perang utama yang terjadi antara pihak Arab dengan Israel pasca Perang Kemerdekaan Israel 1949(terjadi pada tahun 1956, 1967, 1973, dan 1982). Namun, antara tahun 1949-1956, tidak terjadi perang besar antara pihak Arab dengan pihak Israel. Periode tersebut lebih diwarnai oleh berbagai peristiwa penting seperti aneksasi Tepi barat oleh Yordania, pembunuhan Raja Abdullah I dari Yordania oleh kelompok teroris dari Palestina yang tidak puas dengan tindakan Yordania saat melawan Israel, kudeta terhadap Raja Farouk oleh Gamal Abdul Nasser di Mesir, Skandal Lavon yang melibatkan mata-mata Israel di Mesir, dan terpilihnya David Ben Gurion sebagai Perdana Menteri Israel (Brenner, 1980: 25).

Pada tahun 1956, Amerika Serikat, Inggris, dan Bank Dunia memutus dana bantuan untuk Mesir karena negara yang dipimpin Nasser tersebut dianggap terlalu mendekat ke Uni Soviet. Hal tersebut dibalas Mesir melalui tindakan nasionalisasi Terusan Suez. Tindakan tersebut memicu deklarasi perang oleh Inggris dan Prancis terhadap Mesir. Israel turut terlibat dalam perang tersebut, dan dengan relatif mudah berhasil menginvasi serta merebut Semenanjung Sinai hanya dalam waktu 100 jam, meski kemudian mundur dari wilayah tersebut karena digantikan oleh tentara penjaga perdamaian dari PBB. Perang tersebut menunjukkan kekuatan militer Israel yang dengan

mudah mampu mengalahkan pasukan Mesir yang kurang terlatih. Baik negara-negara Arab maupun Israel meningkatkan anggaran militer mereka pasca 1956 sebagai persiapan apabila kembali terjadi perang antara Arab-Israel, dan pada 1956-1966 berlangsung konflik-konflik berskala rendah seperti clash perbatasan Israel-Suriah pada 1964, perang sipil di Yaman yang diintervensi oleh Mesir (dan gagal), serangan gerilya Palestina ke Israel 1965-1966, dan pembalasan Israel ke basis Palestina di Yordania. Israel kemudian mengaplikasikan doktrin militer rapid advance in the event of war dan melakukan modernisasi besar-besaran pada sektor tank dan kekuatan udara (Dictionary of the Israeli-Palestinian, 2005: 21)

Berbagai dinamika di kawasan Asia barat kemudian menyebabkan pecahnya Perang Enam Hari pada tahun 1967. Ambisi politik nasionalisme Arab pemerintahan Nasser, kudeta dan juga sengketa air dengan Israel di Suriah, pembentukan pakta pertahanan antara Mesir-Suriah, dan juga serangan Israel ke sebuah desa di Yordania merupakan beberapa penyebab terjadinya perang tersebut. Perang Enam Hari berlangsung pada 5-10 Juni 1967. Perang tersebut dimulai dengan serangan Mesir dan koalisi Arab (Suriah, Lebanon, dan Yordania) ke wilayah Israel. Pada awal peperangan, pasukan Arab di bawah pimpinan Mesir menguasai keadaan dan mampu mengalahkan pasukan Israel di beberapa pertempuran. Akan tetapi, pada pertengahan peperangan, kemampuan Israel mampu membalikkan keadaan denga meretaliasi serangan-serangan pasukan Arab hingga mengalahkan seluruh pasukan Arab yang menyerangnya. Keberhasilan Israel untuk mengalahkan negara-negara Arab tersebut juga dipengaruhi oleh kehebatan intelijen serta diplomasi negara tersebut. Peran lobi Yahudi di Amerika Serikat turut mempengaruhi dukungan Amerika Serikat pada Israel, meski bukan berupa dukungan militer, pada perang tersebut. Setelah Perang Enam Hari berakhir, Israel menguasai wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai Mesir, Suriah, dan Yordania, yaitu wilayah Semenanjung Sinai, Tepi Barat (termasuk Jerusalem Timur), Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. Namun, perhatian dunia pada perang ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 242, yang berisi (Brenner, 1980: 25):

1. Penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki pada Perang Enam Hari
2. Terminasi seluruh klaim dan perilaku yang mengarah pemberontakan serta menghormati kedaulatan, integritas teritorial, serta independensi

politik seluruh negara di kawasan agar dapat mewujudkan kedamaian berdasarkan batas-batas wilayah yang aman dari perilaku kekerasan.

Meski didukung oleh Amerika Serikat, tekanan negara-negara lain yang tergabung dalam PBB, ditambah dengan beberapa perhitungan lain, Israel pada akhirnya mengikuti resolusi PBB tersebut. Akan tetapi, dengan keluarnya resolusi DK PBB nomor 242 yang dijalankan oleh Israel tersebut, secara de facto dan de jure PBB mengakui negara tersebut memiliki kendali yang sah atas wilayah yang dikuasai sebelum Perang Enam Hari. Keputusan tersebut hingga saat ini masih menjadi penyebab berbagai konflik antara Israel dengan pihak Arab (Quandt, 2001: 43).

E. Dampak Konflik Bagi Dunia Internasional

Perang Arab-Israel tahun 1948 menciptakan masalah pengungsian besar-besaran di Asia barat. Lebih dari 500 kota besar dan kecil di seluruh Palestina benar-benar kehilangan penghuni selama perang ini berlangsung. 700.000 lebih pengungsi dari kota-kota tersebut menjadi beban ekonomi dan sosial di negara-negara tetangga dan Tepi Barat, terutama di wilayah Yordania. Pada tahun 1954, Israel membuat *Prevention of Infiltration Law* (sebuah hukum yang dibuat Israel untuk mengatur orang-orang yang masuk dari dan ke wilayah mereka baik bersenjata maupun tidak). Hukum ini memungkinkan pemerintah Israel mengusir setiap warga Palestina yang berhasil menyelinap kembali ke rumah mereka yang telah menjadi wilayah Israel. Saat ini, hak kembali masih merupakan masalah utama yang belum bisa diselesaikan oleh perundingan damai antara Palestina dan Israel. Pengusiran paksa warga Palestina pada tahun 1948 terbukti menjadi masalah yang terus berlangsung bahkan setelah para pengungsi tahun 1948 telah meninggal semuanya di awal tahun 2000-an, masalah pun tetap ada (Herzog, 1982: 67).

Serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza telah banyak memakan korban, dan ribuan nyawa tak berdosa melayang dengan sia-sia. Jumlah warga sipil yang tewas terus meningkat dari waktu ke waktu. Semantara itu, konflik antar kedua negara tersebut memberikan dampak negatif pada Israel, begitu juga Palestina. Berikut dampak yang diakibatkan:

3. Mendapatkan kecaman dari dunia internasional

Mengingat serangan Israel adalah agresor ke Hamas dan tak ada hentinya, membuat berbagai penduduk di belahan dunia kian marah atas perilaku Israel. Seperti negeri Venezuela, mengusir Duta Besar Israel Shlomo Cohen dan sejumlah stafnya. Insiden tersebut dilakukan untuk mendesak Israel agar menghormati hukum Internasional. Negara di Amerika latin juga ikut serta mendesak Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza. Seperti Ekuador, Colombia, dan Guatemala pun ikut berkiprah agar dapat tercapainya gencatan senjata antar kedua Negara itu (Klieman, 1990: 48).

Disisi lain di Jakarta, kecaman juga dilontarkan oleh delegasi tokoh Masyarakat Madani Indonesia yang terdiri atas berbagai agama. Tak hanya itu, para budayawan, serta artis pun ikut mendatangi kantor PBB di Jakarta. Kedatangannya tak lain adalah untuk mendesak agar Agresi Israel segera dihentikan. Kebrutalan Israel atas Gaza sudah menyeret Israel sebagai penjahat kemanusiaan (Brenner, 1980: 25).

4. Kondisi Masyarakat

Perang memang tak membawa kedamaian, tapi hanya membawa kehancuran. Fenomena seperti inilah yang terjadi sekarang ini, seperti konflik yang terjadi kian marak di Israel-Palestina. Agresi militer yang dilakukan oleh Israel, sedikitnya telah mengakibatkan gedung-gedung bertingkat rubuh seketika, masjid-masjid hancur, rumah penduduk rata dengan tanah, banyak nyawa hilang, dan membuat suasana semakin memilukan.

Tak hanya itu, dampak konflik ini juga berpengaruh dikalangan anak-anak, sekitar 59 persen penduduk jalur Gaza adalah anak-anak. Dari 220 korban tewas adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Kejadian ini sangat menprihatinkan nasib anak-anak di Palestina(Herzog, 1982: 67).

Nasib anak-anak Palestina sangat mengenaskan, banyak anak-anak yang trauma, mereka harus kehilangan tempat tinggal, tidak bisa sekolah, gedung sekolah hancur. Sebagai tulang punggung negara, nasib mereka terancam, tindakan brutal para pionir-pionir Israel, telah merenggut masa depan para generasi penerus Palestina (Herzog, 1982: 67).

5. Bidang Ekonomi

Dampak perang Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, bukan saja membuat warga Palestina menjadi pengungsi di tanah

air mereka, namun seluruh populasi 1,8 juta Jalur Gaza kini membutuhkan bantuan makanan dan pemulihan sektor pertanian di daerah ini tanpa bantuan jangka panjang juga tidak mungkin dilakukan. Selain dari sisi Palestina, Isarel tentunya harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk membiayai biaya perang(Herzog, 1982: 67).

F. PENUTUP

Konflik berkepanjangan yang terjadi di antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik sengketa yang cukup panjang.Konflik bermula ketika gerakan Zionisme Yahudi yang di populerkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl mulai marak di kawasan Eropa. Gerakan tersebut menyebabkan perpindahan masyarakat Yahudi ke Asia barat. Sementara pada saat itu wilayah Palestina dan Israel menjadi kekuasaan Ottoman (Dowty, 2001: 30).

Semenjak saat itu berbagai konflik meliputi palestina dan Israel bahkan berdampak bagi hubungan bilateral negara-negara Arab dan kepentingan internasional. Berbagai perjanjian telah dilakukan namun ada beberapa gerakan yang memicu radikalisme dan kepentingan lain yang ikut memecah belah proses rekonsiliasi tersebut. Maka hingga saat ini banyak korban terkait konflik Palestina-Israel, karena saat ini sudah melewati batas kemanusiaan.

Persetenuan ini
kapan tuntasnya
memang generasi
mau tau masalah
kita... taunya mereka
lahir di dunia untuk hidup
sebagai manusia

Sudah ku duga
kalau punya masalah
yang kena bukan kita saja tapi seluruh dunia
makanya PBB turun tangan

Sudah-sudah mau PBB, atau Liga Arab
semua harus satu pemikiran
untuk damai musuh itu bukan
Israel atau Palestina
tapi sekarang kelompok yang ingin
memacah belah... sadar dong..
tu ada "gerakan Intifadha" cikal bakal
semua gerakan radikalisme
di seluruh dunia

Jika direnungkan
berapa jiwa hancur karena
konflik ideologi yang membesar
menjadi konflik wiayah
Indonesiapun mengalami
hal yang sama mengenai
penyalahgunaan HAM

Belajar dari Konflik Arab-Israel
Mari kita pupuk
persaudaraan dan persatuan
demi kesejahteraan anak negeri,
dan anak bangsa
sebagai Global citizenship

KEGIATAN MENGGALI AKSI

AKSI KELOMPOK

Membuat Meme atau quote dengan aplikasi mengenai konflik / perang Arab-Israel serta perdamaian

PENGUMPULAN HASIL

Dikumpulkan format.jpg ke Exelsa

KEGIATAN REFLEKSI

Berikan satu solusi untuk perdamaian Arab-Israel!

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI
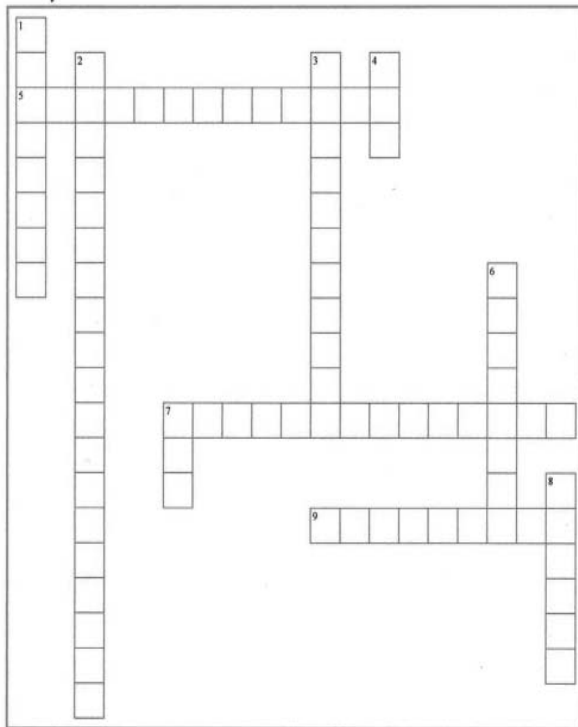
Across

5. Pelopor gerakan zionisme Yahudi berkebangsaan Austria
7. Upaya perdamaian Israel-Palestina 1993
9. Ibukota Yerusalem Timur

Down

1. Gerakann perlawanan dan bentuk protes terhadap tentara Israel
2. Hasil Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973)
3. Seorang yang bertanggungjawab ataspembantaian di kamp pengungsian Sabra dan Shatila
4. Organisasi pejuang rakyat Palestina
6. Pembunuhan berencana dan besar-besaran terhadap sejumlah kelompok oleh Nazi yang menyebabkan gerakan zionisme di Timur Tengah
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. Penganut mayoritas agama di Israel

Tugas Terstruktur: Buatlah kliping mengenai konflik Israel Palestina di segala bidang yang masih berlangsung hingga saat ini!

BAB VIII

PENDUDUKAN
DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN IRAN

8.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai Iran Pasca Penaklukan Persia, Perkembangan Iran di Bawah Kekaisaran, Krisis Minyak dan Pemerintahan, Akar Ideologi Revolusi, Revolusi Islam Iran 1978, Pasca Revolusi Iran,Pengaruh Uni Soviet di Iran, Relasi dengan Iran-Arab, Reformasi dan konsekuensinya (1997–2005)

8.2 Relevansi

Setiap individu mampu melihat perbedaan prinsip negara Iran sebagai suatu tolok ukur bahwa keberagaman bukan berarti pemecah belah namun menjadi suatu tradisi dan kekayaan bersama.

8.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis Pendudukan Iran dan mampu menghargai segala upaya baik untuk mengutamakan persatuan bangsa dan penerimaan kebaragamanan.

Glosarium

1. *Zoroaster adalah sebuah agama dan ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran Zarathustra yang dalam bahasa Yunani*
2. *Fundamentalis Muslim* adalah pemberlakuan Syariat Islam dalam pembentukan negara Islam. Karenanya, perjuangan menegakkan Syariat Islam ini merupakan salah satu tren terpenting
3. *Monarki Absolut* adalah bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis

A. Iran Pasca Penaklukan Persia

Penaklukan kaum Muslim atas Persia (633–656) merupakan akhir bagi Kekaisaran Sasania sekaligus menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Iran. Islamisasi Iran yang berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi pada akhirnya meredupkan Ajaran *Zoroaster* di Iran dan daerah-daerah bawahannya. Sekalipun demikian, pencapaian-pencapaian peradaban Persia sebelumnya tidak punah begitu saja, tetapi hampir sepenuhnya diserap oleh peradaban dan pemerintahan Islam yang baru (Gasiorowski, 1991: 90)

Iran, dengan sejarah panjang peradaban dan kekaisarannya, mengalami penderitaan besar di akhir Abad Pertengahan dan permulaan zaman modern. Banyaknya invasi suku-suku pengembara, yang pemimpin-pemimpinnya berhasil menjadi penguasa Iran, telah berdampak negatif pada negeri ini (Moghadam,1996: 103).

Iran sekali lagi dipersatukan menjadi sebuah bangsa pada 1501 oleh wangsa Safawi, yang mengalihkan *mazhab* agama Islam di Iran dari Sunni ke Syi'ah sebagai agama resmi kekaisaran. Keputusan ini merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Islam. Kembali menjadi sebuah negara adikuasa, berdampingan dengan negara adikuasa lain yakni Kekaisaran Osmani, seteru utama mereka selama berabad-abad, Iran menjadi sebuah negara monarki dipimpin seorang kaisar yang nyaris tak terputus sejak 1501 sampai Revolusi Iran pada 1979, ketika Iran secara resmi menjadi sebuah Republik Islam pada 1 April 1979 (Moghadam,1996: 103).

Sepanjang paruh pertama abad ke-19 Iran kehilangan wilayah luas di Kaukasus (silih-berganti lepas dan kembali ke dalam kekuasaan Iran dalam rentang waktu ribuan tahun), meliputi kawasan timur Georgia, Dagestan, Azerbaijan, dan Armenia sekarang ini, yang jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia, tetangga sekaligus saingannya yang dengan pesat bertumbuh dan berekspansi, setelah Perang Rusia-Persia pada 1804–1813 dan 1826–1828 (Gasiorowski, 1991: 90)

B. Perkembangan Iran di Bawah Kekaisaran

1. Shah Reza (1925–1941)

Ketika Perang Dunia I, Iran berada di bawah pengaruh Inggris dan Rusia walaupun kebijakan pemerintahannya netral. Pada 1919, Inggris mencoba menjadikan Iran sebagai negeri naungan mereka tetapi rencana

macet saat Shah Reza menggulingkan Pemerintahan Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlavi. Shah Reza Pahlavi memerintah Iran selama 16 tahun dan memulai proses pemodernan Iran serta mendirikan pemerintahan sekuler baru (Gasiorowski, 1991: 90).

Shah Reza berkuasa selama hampir 16 tahun sampai 16 September 1941, tatkala ia dipaksa turun tahta oleh Inggris setelah peristiwa invasi Inggris-Soviet atas Iran. Ia membentuk pemerintah otoriter yang mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, militerisme, sekularisme dan anti-komunisme digabungkan dengan sensor ketat dan propaganda negara. Shah Reza melakukan berbagai reformasi di bidang sosial dan ekonomi, menata ulang angkatan bersenjata, administrasi pemerintahan, dan keuangan negara (Gasiorowski, 1991: 90).

Bagi para pendukungnya, masa pemerintahan Shah Reza menghadirkan "hukum dan ketertiban, disiplin, kewenangan terpusat, dan sarana-sarana modern – sekolah-sekolah, kereta api, bus, radio, gedung-gedung bioskop, dan jaringan telepon". Akan tetapi usaha-usaha modernisasi yang dilakukannya dinilai "terlampau cepat"dan juga sekadar "polesan" belaka, dan masa pemerintahannya dinilai sebagai zaman "penindasan, korupsi, beban pajak, kurangnya autentisitas" dengan "cara pengamanan ala negara polisi (Moghadam,1996: 103).

Banyak hukum dan aturan baru yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan umat Muslim dan kaum ulama. Misalnya saja, mesjid-mesjid diwajibkan memasang kursi; kaum pria diwajibkan berpakaian ala barat, termasuk mengenakan topi bertepi datar; kaum wanita didorong untuk menanggalkan hijab; pria dan wanita diizinkan berkumpul dengan bebas, yang bertentangan dengan aturan batas antar jenis kelamin menurut agama Islam. Ketegangan akhirnya meluap pada 1935, tatkala para bazaari dan penduduk desa bangkit memberontak di dalam Mesjid Imam Reza di Masyhad, dengan menyerukan slogan-slogan seperti 'Shah adalah Yazid yang baru.' Banyak orang terbunuh dan ratusan yang terluka ketika pasukan-pasukan tentara datang meredam kerusuhan (Gasiorowski, 1991: 90).

Sejak penemuan minyak, Iran menjadi sumber cadangan minyak utama bagi negara-negara Sekutu. Ketika Perang Dunia II, tentara Sekutu meminta agar Shah Reza menghalau keluar teknisi Jerman tetapi permintaan ini ditolak. Maka, tentara Sekutu melancarkan serangan atas Iran dan menyingkirkan Shah Reza dan melantik puteranya Shah Mohammad Reza

menjadi pengganti Shaah Iran. Namun begitu, Shah Mohammad hanyalah boneka Inggris dalam administrasi Iran dan pemerintahannya bersifat otokratis dan dibenci rakyat Iran (Moghadam,1996: 103).

2. Shah Mohammad Reza (1941–1979)

Awalnya diharapkan bahwa Iran pasca pendudukan akan menjadi sebuah negara monarki konstitusional. Mohammad Reza Shah Pahlavi, mula-mula mengambil sikap tidak campur tangan dalam pemerintahan, dan membiarkan parlemen memegang kekuasaan besar. Beberapa kali pemilihan anggota parlemen diselenggarakan pada tahun-tahun permulaan, meskipun parlemen sebenarnya masih terus berkubang dalam korupsi. Parlemen terus-menerus tidak stabil, dan dalam rentang waktu antara 1947 sampai 1951 rakyat Iran menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan enam orang perdana menteri (Gasiorowski, 1991: 90).

Pahlavi memperbesar kekuasaan politiknya dengan menyelenggarakan Sidang Konstituante Iran, 1949, yang akhirnya membentuk Dewan Senat Iran, sebuah Majelis Tinggi legislatif yang pembentukannya diatur dalam konstitusi 1906 tetapi belum pernah diwujudkan. Para senator baru ini adalah orang-orang yang sangat mendukung Pahlavi, sebagaimana yang telah diniatkannya sejak semula (Alam, 1992: 65).

Pada 1951 Perdana Menteri Mohammed Mosaddeq mendapatkan jumlah suara yang diperlukan dari parlemen untuk melakukan nasionalisasi atas industri perminyakan yang dimiliki Inggris, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Krisis Abadan. Kendati mendapat tekanan dari Inggris, yang juga mencakup blokade ekonomi, nasionalisasi tetap dilaksanakan. Mosaddeq sempat untuk sementara waktu dilengserkan dari kekuasaan pada 1952 namun tak lama kemudian diangkat kembali oleh Shah sebagai perdana menteri, karena desakan rakyat yang mendukungnya. Sang perdana menteri pada gilirannya memaksa Shah untuk undur sementara waktu ke pengasingan pada Agustus 1953 setelah gagalnya sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh Pengawal Kekaisaran, Kolonel Nematollah Nassiri (Alam, 1992: 65).

C. Krisis Minyak dan Pemerintahan

Mossadegh adalah seorang doktor yang menganut prinsip anti-kapitalisme. Oleh sebab itu, sejak berkuasa pada tahun 1951, ia menerapkan

kebijakan nasionalisasi minyak Iran untuk meningkatkan devisa negara Iran. Karena selama ini, AIOC lah yang paling banyak menerima porsi dari keuntungan penjualan minyak Iran (Elm, 1922: 92).

Iran memang harus menerima konsekuensi atas kebijakan Mossadegh itu. Produksi minyak Iran jadi menurun karena AIOC menghentikan produksinya dan ini artinya, pendapatan Iran dari hasil ekspor minyak juga terganggu. Krisis minyak di Iran juga menyebabkan krisis minyak dunia. Kondisi ini diperparah dengan sikap Inggris yang "sakit hati" dengan kebijakan Mossadegh. Untuk membalas Iran, Inggris bersekutu dengan AS memblokade Teluk Persia sampai ke Selat Hormuz yang menjadi jalur utama lalu lintas minyak dunia dan lalu lintas perdagangan serta ekonomi Iran (Gasiorowski, 1991: 90).

Kabinet Britania Raya memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Iran. Negara ini melarang ekspor komoditas utama Britania, termasuk gula dan baja, menarik semua personel Britania dari ladang minyak di seluruh Iran, menarik semua pengelola ladang dari Abadan kecuali 300 pengelola intinya, dan memblokir akses Iran ke rekening fisiknya di bank-bank Britania Raya (Moghadam,1996: 103).

Setelah penarikan karyawan Britania pada musim gugur 1951, Iran percaya mereka mampu mempekerjakan teknisi non-Britania untuk menjalankan pabrik dan dengan cepat melatih warganya sendiri untuk menggantikan mereka. Sayangnya, upaya mereka gagal: Amerika Serikat, Swedia, Belgia, Belanda, Pakistan, dan Jerman menolak mengirimkan tenaga ahli mereka ke perusahaan yang telah dinasionalisasi ini. Hanya Italia yang mau mengirimkan tenaga ahlinya, sehingga menunjukkan bahwa kebanyakan negara maju mendukung Britania Raya dalam permasalahan nasionalisasi ini.

Pada bulan Juli 1952, Angkatan Laut Kerajaan mencegat kapal tanker Italia *Rose Mary* dan memaksanya berlabuh di Aden, protektorat Britania Raya, dengan alasan minyak yang diangkut kapal itu adalah barang curian. Berita bahwa Angkatan Laut Kerajaan mencegat kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak Iran membuat tanker lainnya khawatir dan sejak saat itu ekspor minyak dari Iran berhenti total (Bamberg.Vol 2: 57).

Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Inggris-AS. CIA menugaskan seorang agennya bernama Kermit Roosevelt Jr-cucu mantan presiden AS Theodore Roosevelt untuk merancang operasi intelejen

menggulingkan Mossadegh yang diberi nama “Operasi Ajax”. Sebagai pimpinan operasi, CIA menunjuk Donald Wilber(Moghadam,1996: 103).

CIA memulai operasi itu dengan cara menghasut rakyat Iran agar pro-Barat, menghembuskan berbagai isu untuk melemahkan dukungan rakyat terhadap Mossadegh dan mempengaruhi sejumlah perwira di angkatan bersenjata Iran. Tapi upaya kudeta CIA yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1953 gagal, karena keburu tercium oleh para pejabat militer Iran yang loyal dengan Mossadegh (Goode, 1997: 88).

Mossadegh lalu memerintahkan Kepala Staff Keamanan Kabinet, Jenderal Taghi Riahi untuk menyelidiki rencana kudeta itu, yang kemudian mengirim utusan untuk mengabarkan rencana kudeta itu pada pasukan pengawal kerajaan. Tapi CIA berhasil mencegahnya dengan menyogok Jenderal Fazlollah Zahedi-pimpinan kelompok yang pro-Shah Iran-agar menangkap utusan Jenderal Riahi (Goode, 1997: 88).

Upaya kudeta pertama berhasil digagalkan berkat perlawanan keras pasukan pemerintah Iran. Kermit Roosevelt dan Jenderal Zahedi bahkan melarikan diri ke wilayah utara Iran. Setelah kegagalan itu, CIA merancang rencana kudeta yang lebih baru dengan memanfaatkan media massa. CIA sengaja menyebarkan surat kaleng ke berbagai kantor berita yang isinya menyebutkan bahwa Shah Iran telah mengeluarkan dekrit untuk memecat perdana menteri Mossadegh dan menunjuk Jenderal Zahedi sebagai penggantinya. Tapi upaya ini pun tidak membuahkan hasil karena dukungan dan kepecayaan massa di Iran terhadap Mossadegh ternyata masih sangat kuat.

CIA nyaris putus asa melihat pemerintahan Mossadegh berhasil menangkapi agen-agen mereka yang direkrut di Iran dan menerapkan kebijakan ketat pada media massa. Shah Iran yang awalnya mendukung rencana kudeta CIA, juga melarikan diri ke Baghdad (Goode, 1997: 88).

Tapi CIA tak mau Operasi Ajax itu gagal. Di Baghdad, CIA berhasil membujuk Shah Iran untuk mengeluarkan dekrit untuk membubarkan pemerintahan Mossadegh. Dekrit yang disiarkan pada tanggal 19 Agustus oleh seluruh media massa itu memicu rusuh massa di Iran yang memaksa Mossadegh melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Jenderal Zahedi (Goode, 1997: 88).

Oleh CIA, Operasi Ajax untuk menggulingkan Mossadegh yang menjadi salah satu operasi intelejen terbesar AS, dinilai sukses. Shah Reza Pahlevi yang pro Barat kembali ke Iran dan sebagai ucapan terima kasih,

Shah mengijinkan kembali AIOC mengelola minyak Iran, bersama lima perusahaan minyak AS, satu perusahaan minyak Prancis dan perusahaan minyak Dutch Royal Shell (Pahlavi, 1980: 115).

Operasi Ajax yang dilakukan CIA untuk menggulingkan pemerintahan di Iran dirancang dengan cara menimbulkan kerusuhan massa yang berujung pada munculnya mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Mossadegh (Pahlavi, 1980: 115).

D. Akar Ideologi Revolusi

Hamid Dabashi menyebut Syari'ati sebagai *"the ideologist of revolt"*. Dalam bukunya, *Theology of Discontent: The Idelogical Foundation of The Islamic Revolution in Iran,* Dabashi menyatakan bahwa Ali Syari'ati adalah salah satu ideolog terkemuka Iran yang mengusung aliran dan ideologi utama dan penting yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi. Dalam kajian beberapa peneliti yang fokus dengan Revolusi Iran, ada beberapa aliran dan ideologi menonjol yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi 1978-1979, diantaranya adalah ideologi sosialis-sekuler yang diusung diantaranya oleh Partai Tudeh (Partai Komunis Iran), dan ideologi sosialis-religius (Syi'ah progresif) yang diusung oleh Ali Syari'ati (Hiro, 1985: 95).

Partai Tudeh memang disebut-sebut oleh Zayar dalam bukunya, *Iranian Revolution: Past, Present and Future,* sebagai elemen penting dalam revolusi Iran, disamping beberapa kelompok gerakan sosialis lainnya, diantaranya adalah Fadaeen (Organisasi Rakyat Iran). Tidak hanya itu, Zuyar bahkan menempatkan Khomeini hanya sebagai tokoh yang datangnya lebih belakangan yang ambil bagian dalam gerakan revolusi. Khomeini tidak lebih dari "pembajak revolusi" tulis Zayar (Moin, 2000: 89).

Apa yang ditulis oleh Dabashi dan Zayar memberi jalan masuk yang lebar atas potret historis revolusi Iran. Tetapi masing-masing kurang menyinggung, bahkan dalam tulisan Zayar tidak disinggung sama sekali peran Ali Syari'ati dalam revolusi itu. Sehingga apa yang ditulis Zayar, lebih menampakkan peran penting kelompok Marxis Iran, dan ini seakan seperti menafikan fakta historis-sosiologis bahwa masyarakat Iran adalah mayoritas Syi'ah (Moin, 2000: 89).

E. Revolusi Islam Iran 1978

Revolusi Iran, juga dikenal sebagai Revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari sebuah monarki absolut di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlawi, menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, salah satu dari pemimpin-pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran. Rentang waktu revolusi boleh dikata bermula sejak Januari 1978 dengan demonstrasi-demonstrasi besar yang pertama, dan berakhir pada Desember 1979 dengan disetujuinya konstitusi baru yang teokratis dimana Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin besar negara itu (Hooglund, 1982: 69).

Sementara itu, Mohammad Reza Pahlawi meninggalkan Iran menuju pembuangan pada Januari 1979 setelah aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara itu, dan pada 1 Februari 1979 Ayatollah Khomeini kembali ke Iran disambut oleh jutaan rakyat Iran. Kejatuhan terakhir Wangsa Pahlawi terjadi tak lama berselang pada 11 Februari tatkala militer Iran menyatakan diri "netral" setelah pasukan-pasukan gerilyawan dan pemberontak mengalahkan pasukan-pasukan yang setia pada Shah dalam pertempuran bersenjata di jalanan. Iran secara resmi menjadi negara Republik Islam pada 1 April 1979, ketika sebagian besar rakyat Iran menyetujui pembentukannya melalui sebuah referendum nasional (Milani, 1994: 64).

Ideologi pemerintahan revolusioner ini bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan terutama Syi'ah. Konstitusinya yang unik dilandaskan pada konsep Wilayat-i faqih, gagasan yang dicetuskan Khomeini bahwasanya umat Muslim nyatanya setiap orang memerlukan "tuntunan", dalam bentuk aturan atau pengawasan dari ulama atau sekumpulan ulama Islam sebagai penuntun. Khomeini menjalankan tugas sebagai ulama penuntun, atau pemimpin besar, sampai tutup usia pada 1989 (Milani, 1994: 64).

Perekonomian kapitalis Iran yang tumbuh pesat ditukar dengan sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bersifat islami. Banyak industri dinasionalisasi, aturan-aturan hukum dan sekolah-sekolah diislamisasi, dan pengaruh-pengaruh dari Barat dilarang. Revolusi Islam juga berdampak besar bagi dunia. Di negara-negara non-Muslim, revolusi ini telah mengubah citra Islam, menggugah ketertarikan orang ramai pada politik dan spiritualitas Islam, sekaligus menimbulkan "kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap Islam" khususnya terhadap Republik Islam beserta pendirinya (Ramzani, 1986: 64).

Pada tahun 1979 terjadi penurunan jumlah minyak yang sangat besar hingga sekitar 4%. Penurunan jumlah ini muncul setelah adanya revolusi Iran. Lalu pada 1980, setelah pecahnya perang Iran-Irak jumlah produksi minyak di Iran hampir berhenti dan produksi minyak Irak berhenti juga. Lalu kemudian harga minyak mengalami penurunan selama 20 tahun. Sama seperti krisis tahun 1973 politik global dan keseimbangan kekuatan dunia terkena dampaknya. Eksportir minyak seperti Mexico, Venzuela, dan Nigeria meningkatkan produksi minyaknya; Uni Soviet menjadi penghasil minyak terbesar; minyak laut selatan dan Alaska banjir di pasaran; dan OPEC kehilangan pengaruhnya (Brumberg, 2001: 39).

F. Pasca Revolusi Iran

1. Pemerintahan Khomeini (1979 – 1989)

Khomeini menjabat sebagai pemimpin revolusi atau sebagai Pemimpin Besar Iran sejak 1979 hingga mangkat pada 3 Juni 1989. Era ini didominasi konsolidasi revolusi menjadi republik teokratis di bawah kepemimpinan Khomeini, dan perang dengan Irak yang banyak makan biaya dan korban jiwa (Brumberg, 2001: 39).

Konsolidasi berlangsung sampai 1982–1983, begitu Iran terbiasa menanggulangi kehancuran ekonomi, militer, serta aparat pemerintahnya, dan protes-protes serta pemberontakan-pemberontakan golongan sekuler, golongan kiri, juga golongan muslim yang lebih tradisional—tokoh-tokoh revolusi yang sebelumnya merupakan sekutu tetapi kini menjadi saingan—secara efektif ditekan. Banyak lawan politik dihukum mati oleh rezim baru ini. Menyusul rentetan peristiwa revolusi, para gerilyawan Marksis dan golongan-golongan federalis memberontak di beberapa daerah yang termasuk dalam wilayah Khuzistan dan Kurdistan, yang menimbulkan pertempuran sengit antara para pemberontak dan angkatan bersenjata revolusioner. Pemberontakan-pemberontakan ini bermula pada April 1979 dan berlangsung hingga beberapa bulan bahkan ada yang lebih dari setahun lamanya, berbeda-beda menurut daerahnya. pemberontakan suku Kurdi, dipimpin Partai Demokrasi Kurdistan Iran, adalah yang paling beringas, berlangsung hingga 1983 dan mengakibatkan 10.000 korban berjatuhan (Brumberg, 2001: 39).

Pada musim panas 1979 sebuah konstitusi baru yang memberikan kedudukan dengan kekuasaan besar kepada Khomeini sebagai ulama

penuntun atau pemimpin besar serta kekuasaan atas penyusunan undang-undang dan pemilihan umum kepada sebuah Mejelis Penuntun yang beranggotakan para ulama, disusun oleh sebuah Sidang para pakar untuk Konstitusi. Konstitusi baru ini disetujui melalui referendum pada Desember 1979 (Brumberg, 2001: 39).

2. Perang Iran–Irak (1980 – 1988)

Konflik telah berlangsung dari tahun 1980-1988 yang biasa dikenal dengan perang teluk Persia. Perang ini dikenal sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran dan Qadisiyyah Sadam di Irak. Perang bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran tanggal 22 september 1980 (Milani, 1994: 64).

Perang antara kedua Negara ini dikatakan terjadi karena adanya perebutan hegemoni sebagai penguasa di kawasan teluk Persia atau Shatt Al Arab yang sangat diincar oleh Irak, yang mana merupakan kawasan perairan strategis yang memisahkan Iran-Irak menuju teluk Persia. Karena kawasan itu juga merupakan tempat atau jalur dimana kedua negara tersebut mengekspor minyak. Adapun hal lain yang berdampak yaitu pada saat itu di Iran sedang terjadi Revolusi Islam pada Januari 1979. Revolusi Islam tersebut berhasil menjatuhkan rezim shah Iran (Shah Reza Pahlevi) yang didukung Amerika Serikat. Tonggak penguasa selanjutya dipegang kaum ulama yang dipimpin Ayatollah Khomeini (Moghadam,1996: 103).

Kala krisis politik dan sosial tengah melanda Iran, pemimpin Irak, Saddam Hussein, mencoba menggali untung dari kekacauan akibat Revolusi Islam, kelemahan militer Iran, dan penentangan revolusi terhadap pemerintah Barat. Militer Iran yang pernah begitu kuat telah bubar selama revolusi, dan dengan lengsernya Shah, Hussein berambisi untuk menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai orang kuat baru di Asia Barat, dan berupaya memperluas akses Irak ke Teluk Persia dengan merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dituntut Irak dari Iran pada masa pemerintahan Shah (Hooglund, 1982: 69).

Wilayah terpenting bagi Irak adalah Khuzestan yang tidak saja membangga-banggakan populasi Arabnya yang substansial, melainkan juga ladang-ladang minyaknya yang kaya. Dengan mengatasnamakan kepentingan Uni Emirat Arab secara sepihak, pulau Abu Musa dan pulau-pulau Tunb pun turut disasarnya. Dengan ambisi-ambisi sedemikian dalam

benaknya, Hussein merancang sebuah penyerbuan berskala besar atas Iran, membual bahwa angkatan bersenjatanya mampu mencapai ibu kota Iran dalam tiga hari. Pada 22 September 1980, angkatan darat Irak menginvasi wilayah Iran di Khuzestan, memicu pecahnya Perang Iran–Irak. Serangan mendadak itu benar-benar mengejutkan Iran yang tengah dilanda revolusi (Abrahamian, 1982: 23).

Sekalipun angkatan bersenjata Saddam Hussein beberapa kali berjaya di awal, angkatan bersenjata Iran mampu menghalau angkatan darat Irak mundur kembali ke Irak menjelang 1982. Khomeini berupaya mengekspor revolusi Islamnya ke arah barat menuju Irak, khususnya bagi mayoritas kaum Arab Syiah yang tinggal di negara itu. Perang terus berlanjut enam tahun lagi sampai pada 1988, tatkala Khomeini, dengan kata-katanya sendiri, "menelan racun" dan menyepakati sebuah gencatan senjata yang diperantarai Perserikatan Bangsa Bangsa (Nasir, 1981: 52).

Banyak warga sipil dan personil militer Iran yang tewas tatkala Irak menggunakan senjata kimia dalam peperangan. Irak didukung secara finansial oleh Mesir, negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa, Amerika Serikat (sejak 1983), Prancis, Inggris, Jerman, Brazil, serta Republik Rakyat Tiongkok (yang juga menjual persenjataan kepada Iran) (Abrahamian, 1982: 23).

Ada lebih dari 100.000 korban yang jatuh di pihak Iran akibat senjata kimia yang dipergunakan Irak selama perang delapan tahun itu. Total korban perang di pihak Iran diperkirakan mencapai jumlah antara 500.000 sampai 1.000.000. Hampir semua perwakilan internasional terkait membenarkan bahwa Saddam mempergunakan perang kimia untuk melumpuhkan serbuan lautan manusia dari Iran; perwakilan-perwakilan ini satu suara membenarkan bahwa Iran tidak pernah mempergunakan persenjataan kimia selama perang (Abrahamian, 1982: 23).

Mulai dari 19 Juli 1988 dan bertahan sekitar lima bulan pemerintah secara sistematis menghukum mati ribuan tahanan politik di seluruh Iran. Peristiwa ini umumnya dikenal sebagai eksekusi tahanan politik Iran 1988 atau Pembantaian Iran 1988. Yang menjadi target utama adalah anggota-anggota Organisasi Mujahidin Rakyat Iran, walaupun sejumlah kecil tahanan politik dari kelompok-kelompok kiri lainnya semisal Partai Tudeh Iran (Partai Komunis) juga turut menjadi korban. Perkiraan jumlah korban tereksekusi berkisar dari 1.400 hingga 30.000 jiwa (Nasir, 1981: 52).

3. Delapan tahun pertama (1989 – 1997)

Menjelang ajalnya pada 1989, Khomeini menunjuk 25 orang sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi Pemimpin Besar Iran berikutnya, dan membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Alih kekuasaan berjalan mulus menyusul kematian Khomeini pada 3 Juni 1989. Meskipun Khamenei tidak memiliki "karisma dan kewibawaan" Khomeini, ia memiliki jaringan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat. Di bawah pemerintahannya rezim Iran dikabarkan – oleh sekurang-kurangnya satu orang pengamat – lebih tampak sebagai "sebuah oligarki ulama.. dari pada sebuah otokrasi" (Nasir, 1981: 52).

Yang menggantikan Khamenei sebagai presiden adalah tokoh konservatif yang pragmatis, Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani, yang menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua kali empat tahun dan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pembangunan kembali perekonomian serta infrastruktur Iran yang hancur akibat perang sekalipun dipersulit oleh rendahnya harga minyak. Rezimnya juga berjaya mempromosikan pengendalian kelahiran, memotong pengeluaran militer, dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga semisal Arab Saudi. Selama Perang Teluk Persia pada 1991 negara ini tetap netral, membatasi aksi-aksi pengutukannya terhadap Amerika Serikat, serta mengizinkan kapal-kapal terbang dan pengungsi Irak memasuki wilayahnya (Basri, 1987: 89).

G. Pengaruh Uni Soviet di Iran

Runtuhnya "Imperium" Uni Soviet yang disusul dengan pembentukan persemakmuran negara-negara merdeka membawa perubahan cukup drastis dalam peraturan politik internasional. Peristiwa bersejarah ini juga membawa dampak bagi terciptanya pola-pola baru dalam tata hubungan internasional (Hooglund, 1982: 69).

Seperti yang terlihat dari pergolakan yang terjadi pada bulan Januari 1990, *kaum Azer*i menuntut untuk bergabung dengan Iran. Pada waktu itu, pagar-pagar yang membatasi Republik Azerbaijan (bekas) Soviet dan Provinsi Azerbaijan Iran dirobohkan oleh para demonstran Azeri. Jika tembok Berlin saja bisa runtuh, mengapa "tembok Azerbaijan" tidak? Sejak dulu kami adalah bagian dari Iran," kata salah seorang demonstran.

Demonstrasi di Azerbaijan saat itu berhasil dipadamkan, setelah Moskow mengerahkan sedikitnya 24.000 Tentara Merah yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata berat (termasuk tank dan heli tempur) guna menumpas secara keji para pejuang Muslim Azeri. Menurut sumber, tragedy Azerbaijan menelan 80 orang tewas. Tapi ada pula yang menyebutkan lebih dari 3.000 Muslim Azeri yang menjadi *syahid* (Fawcett, 1991: 72).

Selama puluhan tahun umat Islam di (bekas) Soviet memang hidup dibawah sistem yang amat represif dan anti agama. Majalah *Time* mencatat bahwa sejak revolusi Bolshevik (Oktober 1917) yang menjadikan Uni Soviet sebagai jantung komunisme di dunia, sudah 26.000 masjid dan 24.000 lembaga pendidikan Islam lainnya di negeri ini yang diajukan. Ini belum termasuk ribuan ulama yang dihukum mati atau dijebloskan ke penjara, karena menolak komunisme(Fawcett, 1991: 72).

Namun, kendati mengalami tekanan yang maha berat, umat Islam dibekas Soviet berbeda dengan umat lain berhasil mempertahankan identitas keislaman mereka. Kegigihan mereka membuat siapapun yang menduduki istana Kremlin selalu menemui kegagalan dalam upaya menghancurkan keyakinan agama mereka(Abrahamian, 1982: 23).

Memang, tampilnya Gorbachev dengan “glastnost”nya semula diharapkan dapat meperbaiki kondisi mereka. Ternyata Gorbachev, terutama setelah “tragedy Azerbaijan”, tidak banyak perbedaan dengan para pendahulunya. Ia bahkan secara terang-terangan pernah menuduh pergolakan anti Kremlin di Azerbaijan, Uzbeksitan, Kazakhstan, dan Tadzhikhistan sebagai “didalangi oleh unsur-unsur Islam fundamentalis.” Dan, dalam “kamus politik” decade 1980-an, istilah “Islam fundamentalis” atau “fundamentalisme Muslim” hampir selalu dikaitkan dengan Republik Islam Iran(Abrahamian, 1982: 23).

Setelah PD II, Uni Soviet menolak untuk mundur dari teritori Iran. Mereka takut akan kehilangan pengaruh regionalnya di situ. Kemudia Harry S. Truman (Amerika) mengeluarkan Doktrin Truman yang salah satu isinya membatasi ekspansi Uni Soviet. Karena kekuatan diplomasi dan negosiasi Amerika, Uni Soviet akhirnya menyatakan mundur dari Iran pada 1946 (Kuniholm, 2000: 541-571).

H. Relasi dengan Iran-Arab

Setelah Revolusi Iran, hubungan luar negeri Iran berubah. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang bermusuhan dengan Arab bersahabat dengan Iran, ketika negara yang memberikan dukungannya mengurangi hubungannya. Adapun tujuh hal tentang ketegangan yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi (Najmabadi, 1987: 47).

1. Agama

Faktor paling signifikan di balik persaingan adalah bahwa masing-masing negara memandang dirinya sebagai pemangku agama Islam dalam versi yang berbeda. Muslim terpisah dalam dua kelompok utama, Sunni dan Syiah. Perpecahan berasal dari pertikaian yang terjadi tidak lama setelah meninggalnya Nabi Muhammad tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Muslim. Saudi adalah negara dimana terdapat dua tempat paling suci Islam, Mekkah dan Madinah, sehingga menyatakan diri sebagai ‘pemimpin Sunni dunia’. Iran memiliki penduduk Syiah terbesar dunia dan sejak revolusi Iran pada tahun 1979 menjadi ‘pemimpin dunia Syiah (Amuzegar, 1991: 59).

2. Geopolitik

Negara Iran dan Arab bersaing untuk mempengaruhi negara-negara tetangganya dan juga terdapat kecurigaan tentang pengaruh Iran terhadap kelompok minoritas Syiah di Arab Saudi, di samping masyarakat Syiah di Bahrain, Irak, Suriah dan Lebanon. Program nuklir Iran dan kemungkinan bahwa negara itu pada suatu hari akan memiliki senjata nuklir juga membuat khawatir tetangganya, terutama Arab Saudi (Amuzegar, 1991: 59).

3. Ideologi politik

Arab Saudi dikuasai seorang raja dan bentuk pemerintahannya adalah Islam konservatif. Iran memiliki bentuk Islam yang lebih revolusioner dan pemimpin revolusi tahun 1979 – Ayatollah Khomeini – memandang monarki tidak sesuai dengan Islam. Agenda berhaluan Islam Syiah radikal diluncurkan pada revolusi 1979 dipandang sebagai suatu penentangan terhadap rezim konservatif Sunni, terutama di kawasan Teluk, dan terdapat kecurigaan mendalam di dunia Arab terkait usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga (Hiro, 1985: 95).

Iran sangat mendukung usaha Palestina menentang Israel dan menuduh negara-negara seperti Arab Saudi tidak memperhatikan nasib warga Palestina dan mewakili kepentingan pihak Barat. Secara historis, Arab Saudi memiliki hubungan dekat dengan Barat yang memasok miliaran dolar persenjataan. Sejak tahun 1979, hubungan Iran dengan Barat sangat menegang dan Barat menerapkan sanksi ekonomi selama bertahun-tahun terhadap Iran terkait apa yang dipandang sebagai usaha Teheran untuk memiliki senjata nuklir(Hiro, 1985: 95).

4. Minyak

Minyak penting bagi kedua negara - Arab Saudi adalah produsen dan eksportir terbesar dunia dan mereka kemungkinan memiliki kepentingan yang berbeda tentang seberapa banyak minyak yang dihasilkan dan berapa harganya. Arab Saudi relatif kaya dan memiliki penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Iran. Negara ini diberitakan dapat mengatasi rendahnya harga minyak saat ini untuk jangka pendek. Iran lebih memerlukan pemasukan dan lebih menginginkan harga per barel yang lebih tinggi. (Elm, 1922: 92)

Setelah beberapa tahun tidak dilibatkan dalam pasar minyak dunia karena pemberlakuan sanksi, hal ini akan sangat membantu ekonomi Iran yang bermasalah. Tetapi para pengamat memperkirakan para penghasil minyak memompa 0,5 juta sampai dua juta barel minyak per hari melebihi permintaaan, jadi Iran memerlukan negara penghasil minyak lainnya untuk memotong produksi agar terjadi peningkatan harga. Arab Saudi tidak ingin melakukan hal ini (Rumer, 2000: 23).

I. Reformasi dan Konsekuensinya (1997–2005)

Rafsanjani digantikan pada 1997 oleh tokoh reformasi Iran, Mohammad Khatami. Masa jabatannya diwarnai ketegangan antara pemerintah yang berwawasan reformasi dan kaum ulama yang vokal dan makin lama makin konservatif. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Juli 1999 tatkala protes besar-besaran anti pemerintah pecah di jalan-jalan kota Teheran. Kericuhan berlangsung sampai sepekan lamanya sebelum polisi dan pihak sipil yang pro pemerintah akhirnya membubarkan kerumunan massa (Rumer, 2000: 23).

Khatami terpilih kembali pada Juni 2001 tetapi upaya-upaya reformasinya berulang kali dihambat oleh kalangan konservatif di parlemen.

Unsur-unsur konservatif dalam pemerintah Iran mengambil tindakan-tindakan yang melemahkan gerakan reformasi, membrendel surat-surat khabar liberal dan menggugurkan calon-calon yang mendaftarkan diri untuk pemilihan anggota parlemen. Hambatan terhadap perbedaan pendapat, ditambah kegagalan Khatami mereformasi pemerintahan, mengakibatkan meluasnya sikap tidak peduli terhadap politik di kalangan generasi muda Iran. Pada Juni 2003, protes-protes anti pemerintah yang diikuti ribuan pelajar berlangsung di Teheran. Beberapa protes terkait HAM juga terjadi pada 2006 (Amuzegar, 1991: 59).

J. PENUTUP

Peradaban Persia yang masih membekas pada Iran ialah ideologinya. Iran menjadi negara yang konsisten terhadap alirannya di abad ke-20 karena ada banyak kepentingan yang meliputi wilayahnya, tidak hanya Barat yang mengincar minyaknya namun juga negara-negara Arab yang inging menyatukan negara Arab dalam satu ideologi utuh.

Maka ketika Iran dalam kemelut internal dengan Irak Liga Arab tidak banyak membantu, sehingga yang terjadi ialah kerugian kedua belah pihak. Di bawah komando Ahmad Mossadegh Iran memberanikan diri untuk melakukan suatu perlawanan terhadap penguasaan asing dengan menasionalisasikan perusahaan asing yang ada di Iran AIOC meski harus memikul dampak yang cukup berat dan memicu AS untuk membantu perekonomian Iran. Maka dengan segala keberaniannya di bawah kepemimpian Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran mendirikan Republik Islam Iran sjeak Januasi 1978.

Kalau kita selalu tertutup, kapan negara kita maju padahal kita punya banyak minyak
Sudah cukup SDA kita dirampas, semua perusahaan asing (AIOC) harus dinasionalisasikan dasar lintah darat!!
Pak bagaimana jika kita melakukan Revolusi untuk menentang dua kekuatan yang membelenggu negara ini
Sudah saatnya kita memperjuangkan negara ini dari keterpurukan aku setuju dengan idemu
Terimakasih saudaraku seperjuangan... Kita memiliki nasib yang sama, percuma memiliki potensi tapi dikuras oleh investorasing. Sekarang, aku hanya punya kekayaan budaya yang bisa jadi modal besar negara tanpa harus kehilangan identitas

KEGIATAN MENGGALI AKSI

AKSI KELOMPOK

Membuat komik mengenai Iran

Tiap Kelompok dapat memilih topic sesuai materi

PENGUMPULAN HASIL

Dikumpulkan format.jpg ke Exelsa

KEGIATAN REFLEKSI

Kemukakan gagasan mengenai ideology individu dengan ideology bersama

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

EVALUASI

Across

5. Pemimpin Iran sebelum Revolusi Islam Iran pada tahun 1979
8. Ajaran yang dianur Iran sebelum ada Islamisasi
9. Persemakmuran negara-negara merdeka.

Down

1. 24.000 pasukan Moskow yang membantu menumpas serangan demonstran Azerbaijan
2. Sistem pemerintahan yang berusaha dihapus sekelompok orang di Iran pada masa Shah Reza
3. Perdana Menteri yang melakukan nasionalisasi atas industri perminyakan yang dimiliki Inggris.
4. Pengawal Kekaisaran yang menggagalkan kudeta militer perdana menteri Mosaddeq terhada Shah.
5. Wangsa/suku yang mengalihkan mazhab agama Islam di Iran dari Sunni ke Syi'ah sebagai agama resmi kekaisaran.
6. Kelompok yang menuntut untuk bergabung dengan Iran pada Januari 1990.
7. Suatu peristiwa sebagai dampak nasionalisasi atas industri perminyakan

Tugas Terstruktur:

Buatlah mind map kronologi konflik Palestina Israel dan penyelesaiannya!

BAB IX

PENDUDUKAN DAN KONFLIK POLITIK DI IRAK

9.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai Irak di Masa Pergolakan, munculnya Saddam Hussein di Panggung Politik Irak, serta Irak setelah Perang Dunia II.

9.2 Relevansi

Setiap individu mampu berpikir kritis dan menerapkan jiwa kepemimpinan agar mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan inividu.

9.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis Pendudukan Irak dan mampu menghargai segala upaya baik untuk mengutamakan persatuan bangsa dan penerimaan kebaragaman.

Glosarium

1. *Suku Kurdi* (KDP PUK) *adalah* sebuah kelompok etnis di Asia barat, yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki.
2. Kristen Nestorian adalah Doktrin ini dikaitkan dengan Nestorius (c. 386–c. 451), Patriark Konstantinopel. Pandangan mengenai Kristus ini dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431, dan konflik mengenai pandangan ini mengakibatkan Skisma Nestorian, yang memisahkan Gereja Timur Asiria dari Gereja Byzantium

A. Irak di Masa Pergolakan

Pada abad ke-20 tepatnya tanggal 23 Agustus 1921, dinobatkanlah Raja Faisal. Ia harus membenahi keterbelakangan yang masih ada sejak jaman Uthmaniyah bahkan masalah luar negeri khusunya dengan Inggris yang sebelumnya memilih Irak sebagai salah satu daerah mandatnya (Elliot, 1996: 57).

Terlepas dari itu persoalan antar suku erat kaitannya dengan masalah minoritas. Kelompok ini berjumlah 20 persen dari penduduk Irak. Kelompok yang terbesar ialah suku Kurdi yang tinggal di sebelah utara, sekitar Mosul. Sebagian dari mereka menetap dan sebagian lagi mengembara. Suku ini selalu menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Irak. Selain di Irak, mereka tersebar di Turki, Suriah, Iran, dan Unisoviet (Mahdi, 2000: 25).

Di berbagai negara tersebut suku Kurdi bergerak kompak sehingga sempat mengancam negara Irak khususnya pada tahun 1922-1932 terjadi pemberontakan di Irak. Di dunia Internasional Uni Soviet dan Inggris saling bersaing di wilayah Irak, untuk itu Inggris memanfaatkan gejolak yang dihadapi Irak dengan memihak suku Kurdi. Hal ini dilakukan dengan alasan yang pertama, sebagai taktik bila suatu waktu menghadapi kesulitan dengan Baghdad dan Teheran; kedua, untuk mencegah penetrasi asing, baik Uni Soviet ataupun Jerman (Elliot, 1996: 57).

Ada pula suku Asirialah yang paling sulit dihadapi. Suku ini merupakan pendatang baru yang melarikan diri ke Irak dari Turki atau Iran pada masa Perang Dunia I. Suku ini beragama Kristen Nestorian dan dilindungi pihak Inggris. Mereka juga ditempatkan di bagian utara Irak dan mengawal pangkalan angkatan udara Inggris. Ketegangan mulai terjadi saat Asiria memeinta haknya di Irak. Dalam pemberontakan ini banyak tentara Irak yang tewas. Akibatnya pemerintah Irak membakar dua puluh desa suku Asiria dan membantai penghuninya. Bangsa-bangsa Arab mendukung pemberontakan ini, bahkan Kolonel Bakr Sidki dianggap sebagai pahlawan nasional. (Mahdi, 2000: 25)

Di Irak juga terdapat dua aliran Islam yaitu golongan Shiah dan Sunni. Shiah dominan di Irak namun lebih terbelakang karena mereka enggan menerima sistem pendidikan sekuler. Maka sedikit sekali orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Golongan Shiah lewat para ulamanya, mempunyai hubungan dengan Iran yang sebagian besar penduduknya beraliran Shiah. Merekapun bermigrasi ke Irak khususnya bagi ulama yang

anti Shah Reza. Para kaum Shiah yang mendominasi pemerintahan Irak pun dideportasi oleh Raja Faisal pada tahun 1922 karena dianggap tidak loyal bahkan selalu menghalangi usaha bersama Irak-Inggris (Elliot, 1996: 57).

B. Munculnya Saddam Hussein di Panggung Politik Irak

Saddam Husein lahir pada tahun 1937 di Tikrit. Kehidupan di Desanya teramat sangat keras, pada masa kecilnya Saddam seringkali keluar rumah dengan membekali diri dengan senjata sebagai alat bela diri dikarenakan seringkali terjadi bentrokan antar dengan teman sebayanya. Pada usia 16 tahun Saddam sudah menjadi ketua geng jalanan. Pada Usia 17 Tahun Saddam membunuh salah seorang pesaing pamannya hingga dipenjara 6 bulan. Pada Usia 19 Tahun sudah berkomplot untuk menumbangkan monarki yang berkuasa dan pada usia 21 tahun melakukan percobaan pembunuhan dengan menembak perdana menteri Irak dengan senapan Mesin (Hiro, 1992: 26).

Pada usia 20 tahun ia terjun dalam dunia politik dengan bergabung dalam Partai Baath. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan Partai Baath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif pada tahun 1968. Kudeta tersebut dipimpin oleh ketua Partai Baath, Hasan Al Bakr, yang setelah kudeta mengangkat diri sebagai presiden. Saddam pun diangkat sebagai wakil Hasan Al Bakr dan menduduki posisi itu selama 15 tahun. Selama itu pula, Saddam melakukan berbagai aksi represif terhadap rakyat Irak. Setelah semakin berkuasa, Sadam pun menyingkirkan Hasan Al Bakr dan merebut posisi sebagai presiden dan pemimpin Partai Baath (Hiro, 1992: 26).

Tak lama setelah Sadam menjadi pemimpin partai Baath, dia melakukan pembersihan besar-besaran dalam tubuh partai. Para penentangnya dibunuh. Para ulama penentang Saddam juga dibunuh atau disiksa dalam penjara. Selama 35 tahun menjadi pemimpin Partai Baath, dia melakukan berbagai pembunuhan massal terhadap rakyat Kurdi di utara Irak dan rakyat Syiah di selatan Irak (Mahdi, 2000: 25).

Sebagian sejarawan meyakini, sejak sebelum kudeta tahun 1968, sesungguhnya Saddam sudah menjalin hubungan dengan AS. Menurut mereka, Saddam setelah pembunuhan terhadap Abdul Karim Qasim tahun 1959 melarikan ke Mesir dan di negara ini dia menjalin hubungan dengan agen-agen CIA. Empat tahun kemudian, Saddam pun kembali ke Irak (Mahdi, 2000: 25).

C. Irak setelah Perang Dunia II

Perkembangan Irak dibawah pemerintahan Raja Faisal memiliki banyak tantangan namun Raja Faisal berusaha memperkuat posisinya. Hingga pada bulan September 1939, pemerintahan Irak dipimpin oleh Perdana Mentteri Nuri as-Said. Ia juga tidak segan memutuskan hubungan dengan Jerman, mengingat Irak juga diperebutkan oleh 3 negara besar yaitu Inggris, Uni Soviat dan Jerman. Pemerintah Irak pun memilih netral di bawah kekuasaan Rashid Ali al-Gailani, seorang penentang Inggris. Bahkan netralnya Irak terhadap hubungan Inggris-Jerman-Italia dibuktikan ketika Irak diam saja ketika Italia menyatakan perang pada Inggris dan Prancis. Inggris pun tak berdaya karena wakil Italia Gabrieli diijinkan tinggal di Baghdad dan melakukan propaganda Poros (Hiro, 1992: 26).

Pada tahun 1941 Inggris mengalami kekalahan besar karena serangan Jerman dan Italia. Irak di bawah pemerintahan Rashid pun menjadi pro-Poros. Inggris-Irak sempat memperbaiki hubungan melalui jalur diplomatik namun ketika proses itu berlangsung Irak menentang keras dan meletusklah perang pada tanggal 1 Mei 1939 (Hiro, 1992: 26).

Nasib baik tidak berpaling pada Irak ketika ingin meminta bantuan pada tentara Poros, sementara tentara Jerman yang sibuk di Yunani dan siap menghadapi invasi Rusia, tidak siap untuk menolong Irak. Akhirnya Inggris segera mengirimkan pasukan tambahan dari Palestina, yang diperkuat oleh resimen bermotor dari Transyordania. Pemberontakan berhasil ditumpas, dan Rashid Ali, yang menciptakan hubungan diplomatik dengan Rusia, lari ke Iran (Hiro, 1992: 26).

Pada tahun 1991, Kurdi Irak kembali melakukan pemberontakan baru melawan rezim represif Saddam Hussein. Alasan Kurdi kembali melakukan pemberontakan adalah karena Irak pada saat itu tengah mengalami ketidakstabilan politik setelah invasi mereka ke Kuwait digagalkan oleh pasukan PBB. Pada periode ini Kurdi gagal mendapatkan dukungan dari Amerika yang menolak masuk karena alasan tersandra oleh mandat PBB. Akhirnya Kurdi yang dipimpin oleh Partai PUK dan KDP membangun aliansi dengan tokoh-tokoh ideologis dan kaum religius akar rumput Kurdi. Pada periode ini Kurdi berhasil mengalahkan Baghdad dengan strategi *geriliya mount-city-mount*, dan kali ini Kurdi lebih rapi dalam melakukan pemberontakanya. Mereka tidak membiarkan kota yang mereka rebut tertinggal dalam keadaan "kosong", mereka menempatkan beberapa

petugas keamanan serta petugas administratif kota, sehingga setelah berhasil merebut wilayah tertentu, proses politik serta pelayanan masyarakat dapat kembali terlaksana. Pada periode ini sebelum Baghdad melakukan serangan balik dan memporak-porandakan Kurdi, PBB dengan sigap turun tangan dengan memberikan kebijakan 688 atau lebih dikenal dengan *No Fly Zone*. Kebijakan ini berhasil menjaga wilayah Kurdi Irak dari serangan pesawat Baghdad (Karsh, 1991: 24).

Etnis Kurdi menyambut baik solusi ini, karena dengan adanya solusi ini, para elit politik Kurdi dapat menjalankan pemerintahan otonomi mereka secara de facto karena para loyalis Saddam Hussein di Irak Utara secara otomatis keluar dari Irak Utara. Kurdi merespon kebijakan ini dengan mengadakan pemilu parlemen dan pemilu pemimpin parlemen. Pada pemilu tahun 1992, KDP menang tipis mengalahkan PUK, namun mereka sepakat membagi Kursi parlemen daerah otonomi secara adil (50: 50), pada pemilu pemimpin parlemen, terdapat dua calon pemimpin yang sudah tidak asing lagi bagi etnis Kurdi yaitu Massoud Barzani dan Jalal Talabani. Pemilu ini berjalan damai dan dimenangkan oleh Massoud Barzani. Tahun 1994 merupakan tahun kelam bagi etnis Kurdi di Irak. Setelah mendapatkan wilayah otonomi mereka berkat resolusi 688 yang diberikan PBB, Kurdi Irak yang masih belum "fasih" berpolitik harus menghadapi perang saudara terburuk dalam sejarah etnis Kurdi. Latar belakang terjadinya perang saudara Kurdi Irak adalah permasalahan ekonomi. Setelah mendapatkan embargo dari Baghdad, mereka juga dihadapkan dengan embargo PBB terhadap Irak. Sehingga Kurdi yang baru saja menjalankan fungsi politiknya harus mengalami double hit embargo, yang berarti membahayakan devisa mereka (Hassanpour, 1992: 62).

Sesungguhnya dalam mengatasi masalah pendapatan ekonomi, kedua Kurdi (KDP dan PUK) telah sepakat untuk melakukan perdagangan lintas negara dengan cara penyelundupan ke negara lain. Namun sistem pembagian kekuasaan berdasarkan basis partai dan pembagian pendapatan ekonomi berdasarkan azaz klientisme, menciptakan ketidakseimbangan pembangunan diantara wilayah Kurdi tersebut. Wilayah KDP yang lebih dekat dengan Turki sangat menguntungkan mereka karena Turki pada saat itu dianggap sebagai negara kaya yang intens melakukan perdagangan lintas negara dengan Kurdi, sedangakan PUK yang berbatasan dengan Iran harus gigit jari karena Iran tidak terlalu banyak melakukan aktifitas perdagangan (Hassanpour, 1992: 62).

Pada tahun 2003, para pemimpin Kurdi Irak mengambil keputusan penting dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika dalam rangka menggulingkan Saddam Hussein. Kurdi mengambil kesempatan tersebut dengan harapan Amerika dapat menggulingkan Saddam Hussein, sehingga demokrasi dapat masuk ke Irak. Amerika dan Kurdi membangun aliansi dalam rangka melakukan serangan ke Baghdad. Namun, peran Kurdi tidak terlalu kuat karena Amerika tidak memberikan kekuasaan militer besar kepada Kurdi dengan alasan menghindari konflik etnis di masa depan. Sehingga Kurdi diberikan peran sebagai penjaga pos perbatasan dan pasukan pembersihan wilayah. Setelah Saddam Hussein tumbang, Amerika secara tidak langsung "menghadiahi" Kurdi Irak dengan otonomi khusus konstitutional. Wilayah Kurdi Irak dinyatakan sebagai wilayah otonomi khusus yang diakui oleh konstitusi dengan berbagai kekuasaan istimewa (memiliki pasukan sendiri, kebijakan luar negeri tanpa batas dan otoritas kewarganegaraan) (Hassanpour, 1992: 62).

D. PENUTUP

Irak merupakan negara yang paling berpengaruh di mata politik pendudukan asing. Salah satu yang mempengaruhinya ialah kekuatan aktor politik yang ditaktor yaitu Saddam Husein.

Ada banyak kebijakan sepihak yang dilakukan Saddam Husein untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pikirannya ialah "mengulang kembali kejayaan masa lalu" dimana Irak merupakan bekas peradaban besar Mesopotamia, bahkan Kuwait sebagai negara tetangga pernah dijadikan salah satu provinsi dibawah kekuasaan Irak.

Bro!! Kalau mau dapat dukungan kuatkan idelogimu, karena dunia memandang itu penting!
Kang Mas, aku rasa gitu saja tidak cukup, perlu singkirkan musuh-musuh dalam selimut!
Bincang Al-Bakar & Sadam Hussein
Pertama aku singkirkan musuh internal & kumpulan kekuat potensi negara tetangga, baru aku bisa menjadi penguasa tanah Arab
HEHE-HEHE
Aku harap saudaraku punya cita-cita yang sama dalam membangun bangsa yang memegang tradisi bukan disintegrasi
Pembelajaran hari ini! Pemimpin harus memiliki jiwa pemimpin, sadar akan kesejahteraan masyarakat tegas terhadap hukum, dan menjunjung tinggi nasionalisme

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Carilah strategi politik negara yang berkonflik antara Irak, Jerman, dan Inggris

Bandingkan negara mana yang memilki strategi politik yang kuat

PENGUMPULAN HASIL

Pernyataan argumen

KEGIATAN REFLEKSI

Berikan pilihan dan alasanmu kecerdasan atau kepintaran…

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI

														1			
									2								
						3											
										4							
								5									
			6														
7																	
												8					
	9																
								10									
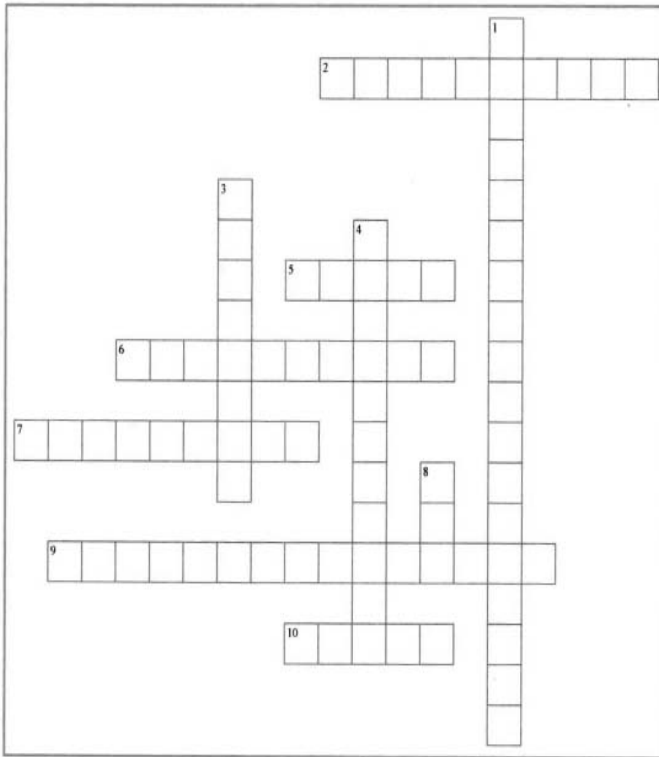
Across

2. Pemimpin Irak pada tahun 1921
5. Partai Sadam Husein
6. Perdana Menteri yang memimpin Irak tahun 1939
7. Suku ini merupakan pendatang baru yang melarikan diri ke Irak dari Turki atau Iran pada masa Perang Dunia I.
9. Presiden Irak tahun 1968
10. Kelompok yang minoritas yang menduduki Irak

Down

1. Pemimpin Irak setelah Nuri as-Said
3. Wakil Italia yang diijinkan tinggal di Baghdad dan melakukan propaganda Poros
4. Ketua Partai Baath yang disingkirkan Sadam Husein
8. Agen AS tujuan propaganda Sadam Husein

Tugas Terstruktur:

Dijaman sekarang ada banyak pemimpin seperti Saddam Husein, apa yang dapat kita pelajari dari karakter khas Saddam Husein?

BAB X

PERANG TELUK I

10.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai perang Iran-Irak (Perang Teluk I) 1980, penyebab Perang Irak-Iran, proses dan Akhir dari Perang Teluk I.

10.2 Relevansi

Setiap pribadi dapat berjuang untuk peramaian dunia

10.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis konflik Perang Teluk 1 dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Glosarium

Skandal Iran-Contra *adalah* skandal Amerika Serikat di dunia intenasional yang cukup besar dan melibatkan orang-orang penting di dalam pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada saat itu. Selain wilayah yang terlibat, juga membentuk poros kekacauan tersendiri yakni meliputi Nikaragua (Contra)-Iran-Panama-Amerika Serikat-Israel dan negara negara sekutu AS yang lain. ketika kasusnya sampai ke Publik lewat sebutan populer The October Surprise (kejutan Oktober) karena bagian utama skandal ini terjadi pada bulan Oktober 1980.

A. Latar Belakang Perang Iran-Irak (Perang Teluk I) 1980

Keadaan Teluk Parsi ditandai oleh sejumlah ketegangan yang berbeda-beda dan untuk sebagian tumpang tindih (*overlaping*). Mula-mula Iran berusaha menadapatkan kedudukan dominasi di kawasan untuk mengamankan jalur-jalur pengangkutan minyak yang vital. Menurut Iran jalur-jalur itu diancam olrh negara-negara dan kekuatan-kekuatan yang memusuhinya, kemungkinan besar dibawah koordinasi Uni Soviet. Kecurigaan Iran mengenai "pengepungan" Uni Soviet itu diperkuat oleh persetujuan-persetujuan persahabatan Uni Soviet dengan Irak dan India, bantuan Uni Soviet bagi kaum pemberontak di Dhofar dan meningkatnya kekuatan angkatan laut Uni Soviet di Samudra Hindia. Lawan utama hegemoni Iran di kawasan adalah Irak. Antara kedua negara itu terdapat beberapa sebab sengeketa seperti hak-hak atas jalan air Shat Al-Arab, bantuan Iran bagi kaum pemberontak Kurdi dan bantuan Irak bagi kaum pemberontakan Arab di Kuhzestan, dan garis demarkasih di lepas pantai. Selain itu Iran menginginkan peranan yang lebih besar dalam politik dikawasan dan berusaha mengimbangi kekuatan militer Iran (Hiro, 1991: 60).

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Irak dan Irak yang memunculkan adanya perang antara kedua negara tersebut yaitu:

1. Sengketa Atas Shatt Al-Arab Dan Khuzestan

Shatt Al-Arab adalah sungai sepanjang 200 km yang terbentuk dari pertemuan sungai Efrat dan tigris di kota Al-Qumah, Irak selatan, di mana bagian akhir dari sungai yang mengarah ke Teluk Persia tersebut terletak di perbatasan Irak dan Iran. Sungai tersebut utamanya penting bagi Irak karena merupakan jalan keluar utama negara tersebut ke arah laut (Khadduri, 1988: 59).

Karena letaknya yang berada di perbatasan dan posisi strategisnya yang mengarah ke Teluk Persia, sungai tersebut menjadi bahan sengketa Irak dan Iran. Sebelum terjadinya perang antara kedua negara tersebut, sejak tahun 1975 sungai tersebut menjadi milik kedua negara dimana batasnya adalah pada titik terendah sungai berdasarkan Persetujuan Algeir (*Algier Accord*) (Khadduri, 1988: 59).

Wilayah lain yang menjadi sengketa kedua negara adalah provinsi Khuzestan yang kaya minyak. Wilayah tersebut selama ini menjadi wilayah

Iran, namun sejak tahun 1969 Irak mengklaim bahwa khuzestan berada di tanah Irak dan wilayah tersebut diserahkan ke Irak ketika Irak dijajah oleh Inggris. Lebih lanjut, stasiun TV milik Irak bahkan memasukan Khuzestan sebagai wilayah Irak dan menyerukan warga Arab di sana untuk memberontak melawan Iran(Khadduri, 1988: 59).

2. Munculnya Revolusi Islam Di Iran

Pada tahun 1979 merupakan tahun terpenting dan sejarah Iran modern hingga menjadi seperti Iran sekarang. Di tahun itu terjadi revolusi pemerintahan di mana rezim kerajaan Pahlevi yang dianggap sebagai rezim boneka AS tumbang dan digantikan oleh sistem republik Islam. Pasca revolusi tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan nasionalis Arab dan Muslim Sunni bahwa revolusi tersebut akan menyebar ke negara-negara Arab di sekitarnya. Kekhawatiran tersbesar terutama datang dari Irak yang wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran dan memiliki penganut Syiah berjumlah besar di wilayahnya. Ayyatulah Khomeini, pemimpin revolusi Islam di Iran, memang memiliki impian untuk menyebarkan pengaruh revolusinya ke negara-negara Arab lainnya (AArjomand, 1988: 34).

Pertengahan tahun 1980, Khomeini menyebut bahwa pemerintahan sekuler Irak adalah pemerintahan ”Boneka Setan ” dan masyarakat Muslim di Irak sebaiknya bersatu untuk mewujudkan revolusi Islam seperti di Iran. Pernyataan Khomeini tersebut sekaligus sebagai respon dari pernyataan Saddam pasca revolusi Islam Iran yang menyatakan bahwa bangsa Persia (Iran) tidak akan berhasil membalas dendam kepada bangsa Arab sejak pertempuran Al-Qadisiyyah, pertempuran pada abad ke-7 yang dimenagkan oleh bangsa Arab sekaligus menumbangkan Kerajaan Persia Kuno (Bakhash, 1986: 47).

Irak di bawah kendali Saddam Hussein dan Partai Baath memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di wilayah Arab di bawah bendera Pan- Arabisme sejak meninggalnya Presiden Mesir, Gamal A. Nasser. Revolusi Islam yang terjadi di Iran tersebut dianggap sebagai penghalang karena bertentangan dengan prinsip nasionalisme sekuler Arab. Selain untuk mencegah menyebarnya revolusi Islam, Irak juga berusaha mengambil keuntungan dengan kondisi internal Iran yang tidak stabil pasca revolusi Islam untuk merebut wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa dengan Irak dan menambah sumber minyak Irak (Baram, 1991: 78).

3. Percobaan Pembunuhan Terhadap Pejabat Irak

Pertengahan tahun 1980, terjadi percobaan pembunuhan kepada Deputi Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz. Irak kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibt atas percobaan pembunuhan tersebut dan mendeportasi warga Syiah berdarah Iran keluar dari Irak. Pemimpin Irak, Saddam Hussein menyalahkan Iran sambil menyebut ada agen Iran yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa itu selanjutnya semakin memanaskan hubungan kedua negara hingga akhirnya pada bulan september 1980 Irak melancarkan serangannya ke Iran (Karsh, Rautsi, 1991: 96).

Berikut merupakan klasifikasi faktor penyebab berdasarkan kronologis secara spesifik:

1. Penyebab Khusus

Berikut merupakan penyebab khusus perang Iran-Irak (Bakhash, 1986: 47):

a. Adanya serangan granat pada tanggal 1 april 1980 terhandap wakil perdana menteri Irak Tariq Aziz yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi subvesi terhandap Iran.
b. Adanya pengusiran ribuan keturunan Iran oleh Saddam, serta melancarkan serangan yang sengit terhandap pribadi Khomeini dan membatalkan perjanjiaan Aljazair.
c. Kedua negara saling menempatkan pasukan masing masing di daerah perbatasan dalam jumlah yang cukup besar.
d. Terjadinya perang pers dan media massa antar kedua belah negara.
e. Pada 17 september 1980, presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian Aljazair tahun 1975 karena pada waktu itu Saddam Hussein merasa bahwa perjanjian Aljazair, tidak adil untuk Irak, pada saat pembuataan perjanjiaan kedua belah negara ada dua faktor yang menyebabkan invasi yang dilalukan Saddam ke Iran. Yang pertama , adanya kekhawatiran dikalagan penguasa negara Arab terhandap kemungkinaan menularnya revolusi Khoehenni ke negara negara Arab.Kedua, ambisi Saddam Hussein untuk bisa tampil sebagai pemimpin Arab (Karsh, Rautsi, 1991: 96).

2. Penyebab Umum

Selain penyebab khusus adapula penyebab umum yang memicu berkobarnya perang Irak-Iran (AArjomand, 1988: 34):

a. Kedua negara tidak mau mengakui keunggulan masing-masing
b. Masalah minoritas etnis, pada zaman Shah Iran mendukung perjuangan otonomi suku kurdi di Irak sedangkan Iran mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan.
c. Perbedaan orientasi politik luar negeri, dalam hal ini Irak adalah Pro-Uni Soviet dan Iran adalah Pro-Barat.
d. Irak berusaha untuk merebut kembali beberapa daerah Arab yang telah diklaim oleh Iran (Shatt Al- Arab dan tiga pulau kecil di selat hormus menurut perjanjian Aljazair 1975).

Ketegangan Irak-Iran itu mereda berkat Perjanjian Aljazair tahun 1975. Berdasarkan penjanjian itu maka Iran akan menghentikan dukungan yang diberikan kepada pemberontakan suku Kurdi dan Perbatasan Irak-Iran di Shatt Al-Arab yang digeser dari tepi ke tengah perairan. Irak sebenarnya kurang setuju dengan penetapan perbatasan itu, tetapi tidak dapat menolaknya karena pada waktu itu Iran merupakan kekuatan dominan di kawasan dan Irak menghadapi pemberontakan-pemberontakan suku Kurdi yang didukung oleh Teheran (Khadduri, 1988: 59).

B. Proses dan Akhir dari Perang Teluk I

1. Proses Perang Irak-Iran

a. Penyerbuan Oleh Irak (1980-1982)

Ada dua objek Irak dalam serangannya ke Iran yaitu menguasai wilayah-wilayah strategis serta kaya minyak di Iran dan mencegah tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut. Dalam seranganya Irak mengiginkan kemenangan cepat atas Iran dengan memanfaatkan situasi internal Iran yang masih belum stabil pasca revolusi Islam. Irak juga berharap bahwa masyarakat di Iran akan menyalahkan pemerintahan baru Iran dan kemudian sebagian dari mereka terutama dari golongan Arab Sunni akan melawan Irak. Tanggal 22 september 1980, jet-jet tempur Irak menyerang sepuluh pangkalan udara milik

Iran dengan tujuan menghancurkan pesawat tempur di darat, taktik yang dipelajari dari kemenangan Israel atas Arab dalam perang enam hari. Serangan dari pasukan udara Irak berhasil mengahancurkan gudang amunisi dan jalur transportasi darat, namun sebagian besar pesawat Iran tetap utuh karena terlindung dalam hanggar yang terproteksi khusus. Kegagalan Irak menghancurkan pesawat-pesawat tempur Iran dalam serangan kejutan tersebut memberi peluang bagi Iran untuk melancarkan serangan udara balasan ke Irak (Khadduri, 1988: 59).

Sehari kemudian Irak melakukan serangan darat ke wilayah Iran dari tiga front sekaligus. Inti dari serangan tersebut adalah untuk menguasai Khuzestan dan Shatt Al- Arab dimana empat dari enam devisi pasukan Irak dalam penyerbuan dikirim untuk menguasai wilayah tersebut. Sisanya dipecah menjadi dua untuk menguasai front utara (Qasr-e Shirin) dan front tengah (Mehran) untuk menguasai serangan balik yang mungkin dilakukan oleh Iran. Hasilnya, usai serangan mendadak itu Irak berhasil menguasai wilayah Iran seluas 1000 km persegi (Khadduri, 1988: 59).

Bulan november 1980, pasukan Irak melancarkan serangan ke 2 kota penting yang strategis di Iran selatan, Shabadan dan Khorramshahr. Dalam penyerbuannya itu, pasukan Irak mendapatkan perlawanan sengit dari pasaukan Pasadan (Garda Revolusi) Iran. Kedua kota trsebut akhirnya berhasil dikuasai Irak pada tanggal 10 november 1980. Tercatat belasan ribu pasukan dari kedua kubuh terbunuh dalam pertempuran di kota tersebut. Keberhasilan Iran menguasai kedua kota tersebut sekaligus menjadi keberhasilan terakhir irak memukul wilayah Mayor dan Iran (Hiro, 1991: 60).

b. Titik Balik Dan Mundurnya Irak (1982)

Pasukan Irak dalam serangan kilatnya berhasil memanfaatkan momentum lemahnya milik koordinasi pasukan Iran dan problem alutsista milik Iran sehingga para pengamat yakin bahwa perang akan segera berakhir dengan kemenangan Irak dalam waktu beberapa minggu. Irak berhasil menguasai wilayah stretegis Iran dalam serangan itu. Namun, Iran tidak menyerah begitu saja dalam perkembangannya berhasil memukul balik Irak. Masalah bagi Iran

dalam perang adalah dari segi alutsista atau persenjataan, mereka kalah superior dibanding Irak yang saat itu memang merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di asia barat selain Israel. Untuk mengantisipsinya sejak perang meletus Iran merekrut ratusan ribu milisi sukarela yang disebut Basij (Tentara Rakyat). Basij tidak memiliki pengalaman militer dan persenjataan yang memadai, namun mereka memiliki keyakinan yang sangat tinggi akan ideologi religiusnya dan tidak segan-segan melakukan berani mati seperti menerobos ladang ranjau atau area dihujani tembakan artileri musuh saat diperintahkan (Bakhash, 1986: 47).

Titik balik bagi Iran terjadi pada bulan maret 1982 dalam operasi militernya di bawa kode sandi " Operasi Kemenangan yang Tak Dapat Disangkal" (*Opration Undeniable victory*). Dalam operasi militer itu, pasukan gabungan Pasadan-Basij milik Iran berhasil menembus garis depan pasukan Irak yang sebelumnya dianggap tidak bisa ditembus dan memecah pasukan Irak di Utara dan Selatan Khuzestan sehingga pasukan Irak terpaksa mundur.Bulan Mei 1982 Iran berhasil merebut kembali wilayah Khorramshahr. Dalam pertempuran diwilayah tersebut Irak kehilangan 7000 tentara, sementara Iran 10.000 sehingga menjadikan pertempuran itu sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dalam inisiatif serangan balik Iran. Sejak kemenangan tersebut, iran berganti menjadi pihak yang menekan Irak dan pada bulan juni berhasil mendapatkan kembali seluruh wilayahnya yang sebelumnya dikuasai oleh Irak (AArjomand, 1988: 34).

c. Penyerbuan Oleh Iran

Bulan juli 1982, Iran melancarkan serangannya ke kota Basra, Irak dibawah kode sandi "Operasi Ramadhan". Dalam serangan tersebut, puluhan ribu anggota Basij dan pasadan mengorbankan diri mereka dengan berlari melewati lading ranjau untuk memberikan jalan bagi tank-tank dibelakangnya dimana selain menghadapi bahaya ranjau, mereka juga dihujani tembakan artileri pasukan Irak. Irak berhasil mencegah Iran merengsek lebih jauh berkat ketangguhan persenjataannya di garis pertahanan, namun Irak juga kehilangan sejumlah kecil wilayah karena dikuasai Iran. Keberhasilan Iran memukul balik Irak dan berbalik menjadi negara penyerbu membawa

kekhawatiran tersendiri bagi AS yang memutuskan membantu Irak sejak tahun 1982. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyatakan bahwa AS akan berusaha dengan cara apapun untuk mencegah Irak kalah. Bantuan AS beserta negara-negara sekutunya ke Irak yang diketahui mencakup bantuan teknologi,alutsista dan intelijen. Dukungan untuk Irak juga dari Uni Soviet dan Liga Arab. Di lain pihak, Iran sendiri selama perang hanya mendapat dukungan secara terbuka dari Suriah dan Libya (Bakhash, 1986: 47).

Karena keberpihakan terang-terangan AS ke Irak maka cukup menegejutkan ketika AS diketahui juga membantu Iran dengan jalan menjual persenjataan ke Iran dengan diam-diam (dikenal sebagai Skandal Iran-Contra). Henry Kissinger, salah satu tokoh penting gedung putih, menyatakan bahwa AS merasa baik Irak dan Iran sama-sama tidak boleh kalah untuk mencegah dominasi dari pihak pemenang di kawasan tesebut. Israel juga dikabarkan menjual persenjataan ke Iran secara diam-diam kendati kedua negara tidak lagi menjalin hubungan diplomatik pasca revolusi Islam di Iran, namun Iran sendiri hingga sekarang selalu membantah kabar tersebut(Bakhash, 1986: 47).

d. Perang Tanker (1984-1988)

Tahun 1984, Irak yang baru mendapat bantuan pesawat tempur Super Entetard terbaru prancis melakukan operasi militer di laut mulai dari muara Shatt Al-Arab hingga pelabuhan Iran di Bushehr. Target dari operasi militer tersebut adalah semua kapal bukan berbendera Irak di wilayah operasi militer, baik itu kapal berbendera Iran maupun kapal netral yang dari atau menuju Tehran. Tujuannya adalah untuk memblokade ekspor minyak Iran dan mempengaruhi ekonominya sehingga Iran mau berunding dengan Irak. Kebijakan militer Irak tersebut lalu mengawali babak baru daam perang yang dikenal sebagai " perang tanker (Bakhash, 1986: 47).

Jika diteluuri, sebenarnya perang tanker sudah dimulai sejak tahun 1981 di mana pasukan laut Irak saat itu menargetkan titik-titik terpenting milik Iran di laut seperti pelabuhan dan kilang minyak. Dalam oposisi militernya di laut tersebut, Irak lebih banyak memakai angkatan udaranya untuk melakukan serangan. "perang tanker fase

I" tersebut berlangsung selama 2 tahun setelah baik Irak maupun Iran kekurangan armada kapal untuk meneruskan operasi militer di laut sekaligu mengawali babak baru " perang tanker fase II " (Karsh, Rautsi, 1991: 96)

Perang tanker fase II dimulai ketika Irak menyerang kapal berbendera Yunani di sebelah selatan kepulauan Khark pada Maret 1984. Iran lalu membalasnya dengan menyerang kapal-kapal berbendera Kuwait di dekat Bahrain dan Arab Saudi di perairan Saudi sendiri. Serangan tersebut sekaligus menjadi peringatan dari Iran bahwa jika Irak tetap nekat melanjutkan perang tanker, taka da kapal milik negara Teluk yan akan selamat. Suatu ancaman yang dampaknya tidak ringan karena berpotensi melumpuhkan aktivitas pengangkutan minyak mentah di kawasan tersebut (Bakhash, 1986: 47).

Upaya Irak untuk memblokade jalur transportasi minyak Iran gagal melumpuhkan ekonomi Iran karena ketika Irak memblokade kawasan Teluk, Iran hanya memindahkan pelabuhannya ke kepulauan Larak di dekat Selat Hormuz sehingga aktivitas ekspor minyaknya relatif tidak tergangggu. Di lain pihak, justru Irak yang perekonomiannya terancam setelah Suriah sekutu Iran saat itu memblokade pipa minyak Irak ke Mediterania sejak tahun 1982. Sebagai antisipasinya, Irak pun mengalihkan aktivitas ekspor minyaknya lewat dan jalur pipa minyak baru dibangun melewati Laut Merah serta Turki (Karsh, Rautsi, 1991: 96).

e. Campur Tangan Amerika Serikat (1987-1988)

Situasi perang tanker yang semakin parah karena ikut menargetkan kapal-kapal tanker dari negara-negara yang netral membuat Kuwait meminta bantuan pihak internasional pada tahun 1986. Uni Soviet adalah negara pertama yang merespon dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk mengawal kapal tanker Kuwait. Kebijakan Uni Soviet lalu diikuti oleh AS pada tahun 1987 yang sebenarnya sudah didekati Kuwait lebih dulu(Bakhash, 1986: 47).

Ikut campurnya AS dalam perang Irak-Iran sebenarnya disebabkan karena kapal perangnya, USS stark, tertembak oleh pesawat tempur Irak sehingga 13 awak kapalnya meninggal. Irak

meminta maaf kepada AS sambil mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Tetapi AS malah menyalahkan Iran dengan alasan Iranlah yang menyebabkan peperangan semakin berkobar dan kemudian diikuti dengan tindakan AS untuk mengirim armada laut untuk mengawal kapal-kapal tanker Kuwait yang mengibarkan bendera AS(Subaryana, 1987: 30).

Tujuan utama AS dalam penerjunan armada lautnya di sekitar teluk adalah untuk mengisolasi Iran dan menjaga agar kapal-kapal bebas berlayar di sana. AS baru mlancarkan serangan langsung ke Iran dengan mengancurkan kilang minyak Iran di lading minyak Rostam setelah pasukan Iran menenggelamkan kapal tanker Kuwait berbendera AS, Sea Isle City. Setahun kmudian, tepatnya bulan april 1988, AS kembali menyerang kilang minyak dan kapal-kapal perang Iran setelah perangnya, USS Samuel B. Roberts, tenggelam akibat ranjau laut Iran(Subaryana, 1987: 30).

Tanggal 3 Juli 1988, kappa perang AS, USS Vincennes, menembak jatuh pesawat sipil Iran sehingga seluruh penumpang dan awak pesawatnya tewas. AS berdalih kalau pasukannya salah mengira bahwa pesawat sipil tersebut adalah pesawat temour Iran karena tidak mengidentifikasikan dirinya ke kapal perang sebagai pesawat sipil. Namun, klaim AS tersebut dibantah oleh Iran dan sumber independen lainnya seperti bandara Dubai yang menyatakan kalau pesawat tersebut sudah mengidentifikasikan dirinya ke kapal AS sebagai pesawat siipil melalui radio (AArjomand, 1988: 34).

2. Akhir Dari Perang Irak-Iran

Perang Iran-irak berakhir setelah kedua negara besedia menerima resolusi DK PBB no 598 yang isinya tentang gencatan senjata, dan secara resmi mengakhiri perang yang sudah terjadi selama delapan tahun pada tanggal 20 agustus 1988 keduanya kemudian merealiasikan gencatan senjata dengan saling tuka-menukar tawanan perang dan kemudian melanjutkan hubungan diplomatik. Dengan berakhirnya perang Iran-Irak membawa kerugia besar bagi kedua belah pihak dari segi material, ekonomi, politik. Dari segi material bagi masing-masing negara diperkiraan mencapai U$ 500 juta. Sebagai akibatnya pembangunan ekonomi jadi terhambat, produksi minyak menurun sangat drastis dan hal ini jelas mempengaruhi

perekonomian dunia, khusunya industri- industri di dunia Barat dan Jepang. Disamping itu Mesir yang sejak persetujuan damai dengan Israel dikucilkan oleh negara Arab terutama Saudi Arabia, mulai didekati kembali. Kerugian lebih besar harus ditanggung Irak karena selama perang Irak memnag aktif mencari pinjaman untuk menambah alutsista (Subaryana, 1987: 30).

Selain itu kondisi dan kemampuan Irak setelah perang teluk pun jauh di bawah keadaan sebelum Perang Teluk. Lading minyak dari kedua negara mengalami kerusakan, untuk Irak didaerah Kirkuk, Basra dan Fao, sedangkan untuk Iran mengalami kerusakan di pulau Kharg dan Abadan. Dalam perang Iran-Irak jumlah korban tewas mencapai 200.000 jiwa lebih, sedangkan korban tewas Iran mencapai 1 juta lebih. Iran lebih banyak memakan korban jiwa karena militer Iran banyak mengorbankan tentaranya untuk berhadapan langsung dengan senjata musuh. Jumlah tersebut belum disebut termasuk korban luka parah dan penyakit "Syndrom Perang Teluk". Setelah perang selesai, tidak terjadi perubahan yang besar terhadap pasca perang. Wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa statusnya kembali seperti sebelum perang dan abates kedua negara juga tidak berubah contohnya wiayah perairan Shat Al-Arab tetap dibagi menjadi milik kedua negara. Pasca perang kedua negara melakukan perbaikan hubungan bilateral (AArjomand, 1988: 34).

C. Dampak dari Perang Teluk 1

1. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan:
   a. Dalam Bidang Ekonomi
      1) Perekonomian Iran mengalami Kehancuran Serta terkena blockade ekonomi dan sanksi dari PBB
      2) Kerugian besar bagi kedua belah pihak, dari segi material jumlah kerugian material bagi masing-masing negara diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS
      3) Jumlah kerugian lebih besar harus ditanggung Irak yang selama perang memang aktif mencari pinjaman uang untuk menambah persenjataan
      4) Pembangunan ekonomi dikedua negara menjadi terhambat dan ekspor minyak kedua negara terganggu
      5) Produksi minyak yang menurun drastis mempengaruhi perekonomian dunia, khusunya bagi industri-industri di dunia Barat dan Jepang

6) Ladang minyak dari kedua negara mengalami kerusakan, untuk Irak di daerah Kirkuk, Basra dan Fao, sedangkan untuk Iran mengalami kerusakan di pulau Kharg dan Abadan.

b. Dalam Bidang Sosial

1) Jumlah korban jiwa yang tewas dari Irak mungkin mencapai 200.000 jiwa lebih, sementara Iran mencapai 1 juta jiwa sebagai akibat dari taktik militer Iran yang banyak mengorbankan tentaranya untuk berhadapan langsung dengan senjata musuh. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang meninggal kemudian akibat luka parah dan penyakit, termasuk akibat penggunaaan senjata Irak yang berdampak jangka panjang.
2) Perpecahan di negara Arab menimbulkan rasa tidak nyaman dan suasana kehidupan sehari-hari yang tegang dan tercekang yang disebabkan adanya peperangan.
3) Irak yang menuduh Iran terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Deputi Perdana Menteri Irak sehingga langsung mendeportasi ribuan warga syiah berdarah Iran keluar dari Irak.

c. Dalam Bidang Politik

1) Amerika Serikat semakin kuat pengaruhnya di Asia barat
2) Adanya sikap anti USA dari pihak Irak (Amerika Serikat)
3) Proses jalanya pemerintahan di kedua negara menjadi kurang efisien dan terhambat karena adanya perang ini

d. Dalam Bidang Kemiliteran

1) Banyak korban peperangan ini tidak hanya dari non sipil namun juga dari kemiliteran dari kedua negara yang banyak tewas dan luka-luka serta cacat fisik dalam peperangan ini
2) Banyak persenjataan dan lat-alat kemiliteran yang digunakan dalam peperangan ini rusak berat atau bahkan tidak dapat digunakan lagi

2. Dampak Positif yang ditimbulkan
   1) Selain kerugian materi dan korban jiwa tidak ada perubahan berarti pasca perang. Wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa statusnya kembali seperti sebelum perang dan batas kedua negara tidak banyak berubah. Wilayah perairan Shatt Al-Arab contohnya tetap dibagi menjadi milik kedua negara dan batasnya adalah titik terdalam pada perairan.
   2) Teknologi persenjataan yang canggih diantara kedua negara yang meningkat pesat sehingga berpengaruh positif bagi peningkatan persenjataan kemiliteran masing-masing

D. PENUTUP

Latar belakang Perang Iran-Irak (Perang Teluk I) 1980 oleh berbagai hal dalam hal ini menyangkut hubungan bilateral kedua negara salah satunya mengenai batas wilayah yang sangat strategis dan kepentingan politik yang telah dipaparkan di atas.

Solusi atas konflik ialah Perjanjian Aljazair tahun 1975. Berdasarkan penjanjian itu maka Iran akan menghentikan dukungan yang diberikan kepada pemberontakan suku Kurdi dan Perbatasan Irak-Iran di Shatt Al-Arab yang digeser dari tepi ke tengah perairan. Irak sebenarnya kurang setuju dengan penetapan perbatasan itu, tetapi tidak dapat menolaknya karena pada waktu itu Iran merupakan kekuatan dominan di kawasan dan Irak menghadapi pemberontakan-pemberontakan suku Kurdi yang didukung oleh Teheran (Khadduri, 1988: 59).

Negara kita punya potensi namun ada saja tantangannya pertama dari Barat, sekarang harus melawan negara tetangga (Irak), tidak bisakah kita pertahankan negara ini
Kita sudah kehilangan kekuatan dari Inggris, bahkan liga Arab tidak berpihak karena kita berbeda ideologi. satu-satunya jalan ialah minta bantuan kepada AS
Perang ini akan berakhir sia-sia dan akan merugikan kedua belah pihak coba bayangkan apa untungnya...
belajar dari Perang Irak-Iran, sekali lagi kita h arus pikir panjang sebelum semua rusak, dan negara kita tinggal sejara

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Mengkaji peristiwa Perang Teluk I yang sejenis dengan peristiwa di Indonesia, dikaji berdasarkan periode dan sebab akibatnya

PENGUMPULAN HASIL

Portofolio dikumpulkan di Exelsa.

KEGIATAN REFLEKSI

Jiwa kepemimpinan seperti apa yang ingin anda kembangkan dalam kehidupan sehari-hari?

____
____
____
____
____
____
____
____

EVALUASI
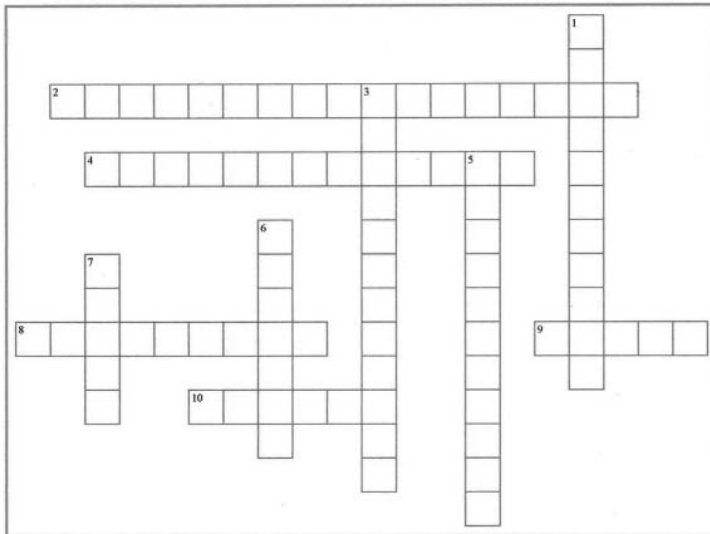
Across

2. Pemimpin Revolusi Iran
4. Pasukan Pasadan Iran
8. Deputi Perdana Menteri Irak yang akan dibunuh pihak Iran
9. Tentara Rakyat Iran
10. Bangsa Iran Kuno

Down

1. Sebutan Khomeini untuk pemerintahan sekuler Irak
3. Salah satu kota strategis di Iran selatan
5. Kawasanyang diperebutkan Saddam Husein dan Khomeini
6. Perjanjian untuk meredakan Ketegangan Irak-Iran tahun 1975
7. Suku-suku minoritas di Irak yang dianggap sebagai pendukung kekuatan Iran

Tugas terstruktur:

Buatlah status di media sosial dengan #stopradikalismedemikekuasaan

BAB XI

PERANG TELUK II

11.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai Latar Belakang Perang Teluk II, invasi Irak ke Kwait dan Campur Tangan Asing, invasi Irak ke Kwait dan campur tangan Asing, perang dan implikasinya bagi Kawasan Asia Barat

11.2 Relevansi

Setiap pribadi dapat berjuang untuk perdamaian dunia

11.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis Perang Teluk II serta mampu menghargai arti penting perdamaian.

Glosarium

1. Pasukan multinasional adalah pasukan pemelihara perdamaian bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik dan menolong para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan perjanjian perdamaian yang mungkin telah mereka tandatangani. Bantuan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan untuk proses pemilihan umum, memperkuat penegakan hukum, dan pembangunan sosial-ekonomi. Karena itu, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (sering disebut Topi Baja Biru sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan) dapat mencakup tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya
2. GCC merupakan Enam anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), diantaranya Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

A. Latar Belakang Perang Teluk II

Irak dibawah pemerintahan Saddam Husein langsung bereaksi saat Kuwait dan Uni Emirat Arab melakukan penjualan minyak di salah satu wilayah Irak yang merugikan negaranya sebesar 2,4 milyar US dollar. Sebelumnya Irak juga menaruh kekecewaan pada negara-negara tetangganya saat permintaan pemberian pinjaman untuk Irak pasca perang Irak-Iran ditolak oleh negara-negara Arab sehingga Irak merasa negara-negara tersebut tengah melakukan perang ekonomi (Mussalam, 1996: 82).

Konferensi pun digelar di Jeddah antara Irak dengan Kuwait untuk membicarakan masalah minyak tersebut namun berakhir buntu. Kegagalan Konferensi tersebut menjadi titik dimulainya tindakan tegas Irak untuk membela kedaulatan wilayahnya dengan melakukan penyerbuan ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Beberapa faktor dari Perang Teluk II ialah sebagai berikut(Mussalam, 1996: 82):

1. Ekonomi.

Akibat perang Iran-Irak, Bagdad menderita kerugian yang sangat besar sekitar 450 milyar dolar AS dan terjerat utang-utang luar negeri sekitar 80 milyar dolar AS. Padahal pendapatan tertinggi yang didapat Bagdad diperkirakan hanya 12 milyar dolar AS per tahun. Artinya, untuk membangun kembali negaranya, Saddam membutuhkan waktu setidaknya 40 tahun. Bagi Saddam, penyerbuan ke Kuwait memang jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi negaranya(Khadduri , 1997: 36).

Saddam Hussein kemudian menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak diladang Cumailah yang dipersengketakan antara Irak dan Kuwait senilai 2,4 miliar dolar AS dan bahwa Kuwait dan Uni Emirates Arab telah menohok dengan membanjiri minyak dunia sehingga menimbulkan kerugian di pihak Irak senilai 14 miliar dolar AS. Akibat pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan Kuwait dan Uni Emirates Arab, harga minyak sempat anjlok sampai sekitar 15 dolar AS perbarel. Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditi utama sangat terpukul dengan anjloknya harga minyak di pasaran Internasional. Apalagi pendapatan dari sektor minyak sangat dibutuhkan Irak untuk merekonstruksi kembali kerusakan akibat perang dengan Iran selama Perang Teluk I(Alberto , 1998: 27).

Kekecewaan Saddam terhadap *negara GCC* yang telah dilindunginya dari ancaman revolusi Islam Iran. Pada saat perang Teluk 1, posisi Saddam

dan GCC ibarat "tukang pukul dan para cukongnya". Namun pada saat Irak babak belur akibat perang selama 8 tahun dengan Iran, negara GCC, khususnya Kuwait dan Uni Emirate Arab, justru berupaya "menusuk dari belakang" dengan cara melanggar kuota produksi OPEC yang mengakibatkan anjloknya harga minyak di pasaran Internasional, yang tentunya akan memperparah kondisi ekonomi Bagdad. Akibat pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan Kuwait dan Uni Emirates Arab, harga minyak sempat anjlok sampai sekitar 15 dolar AS perbarel. Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditi utama sangat terpukul dengan anjloknya harga minyak di pasaran Internasional. Apalagi pendapatan dari sektor minyak sangat dibutuhkan Irak untuk merekonstruksi kembali kerusakan akibat perang dengan Iran selama Perang Teluk(Mussalam, 1996: 82).

2. Faktor Historis-Politis

Faktor Historis-Politis. Secara histories, Kuwait adalah wilayah Irak (dulu Mesopotamia) sehingga sampai 1990 Irak secara konstitusional tidak mengakui Negara Kuwait. Ketika Kuwait memproklamasikan diri tahun 1961, Irak tidak mengikutinya. Dengan demikian, posisi Kuwait tetap menjadi wilayah kekuasaan Irak atau adanya ketidakjelasan perbatasan antara negara Kuwait dan Irak sehingga seringkali Irak mengklaim bahwa itu adalah daerahnya(Khadduri , 1997: 36).

Pecahnya Perang Teluk juga mengisyaratkan betapa lemahnya peranan PBB dalam mengatasi masalah internasional. Hal ini tidak hanya terlihat jelas dari ketidak-efektivan sanksi ekonomi dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi juga terlihat dari ketidak-mampuan PBB mengatasi tekanan-tekanan yang dilakukan negara-negara besar, khususnya AS. Artinya, ppecahnya Perang Teluk II kembali membuktikan bahwa PBB pada hakikatnya memang lebih banyak melayani kepentingan negara-negara besar ketimbang memperlihatkan nasib bangsa-bangsa yang lemah(Mussalam, 1996: 82).

B. Invasi Irak ke Kuwait dan Campur Tangan Asing

Jalur diplomasi antara Irak dengan Kuwait maupun Arab Saudi mengalami kegagalan sehingga Irak menggelar pasukannya di Perbatasan Irak-Kuwait. Pada tanggal 2 Agustus 1990 pukul 04.30 waktu setempat, sekitar 300.000 tentara Irak dengan dukungan tank, dan alat-alat militer

lainnya menyerbu Kuwait. Keberhasilan ini karena pengalaman tempur pasukan Irak selama Perang Teluk I dan perimbangan kekuatan yang mencolok antara Irak dengan Kuwait(Khadduri , 1997: 36).

Saddam Husein menegaskan bahwa Kuwait yang diduduki sejak 2 Agustus 1990 merupakan propinsi ke-19 dari negara Irak. Status ini tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Bahkan Irak tidak akan mundur satu inci pun dari wilayahnya. Saddam Husein kemudian mengangkat Ali Hassan Al-Majid sebagai Gubernur Kuwait yang selanjutnya mengumpulkan sukarelawan untuk bertempur melawan Kuwait(Khadduri , 1997: 36).

Pada 16 Januari 1991 waktu Baghdad, operasi pembebasan Kuwait yang diberi nama "*Operation Desert Storm*" (Operasi Badai Gurun) dimulai, dengan dilancarkan serangan udara oleh pesawat-pesawat tempur F-15 dan pesawat gabungan pasukan Multinasional. Serangan tersebut juga didukung oleh tembakan rudal Tomahawk dari kapal-kapal Multinasional di Teluk. Pada serangan pertama pasukan multinasional mengerahkan serangannya pada sasaran-sasarannya sebuah pabrik yang diperkirakan memproduksi gas syaraf dan gas mostar yang terletak di sekitar 40 km barat daya Kota Samara. Pabrik ini merupakan pabrik kimia terbesar di Irak(Khadduri , 1997: 36).

Pada serangan pertama, Irak tidak melakukan pembalasan. Baru pada 18 Januari 1991, Irak melepaskan 8 rudal *Scud* ke Israel dan Arab Saudi. Serangan balasan Irak ke Israel dimaksudkan untuk memperluas Perang Teluk 2 dengan melibatkan Israel sehingga diharapkan koalisi Pasukan Multinasional pimpinan AS akan pecah dan negara-negara Arab akan membantu Irak. Namun karena lobi AS terhadap Israel, maka Israel tidak membalas serangan Irak(Mussalam, 1996: 82).

Pada 19 Januari 1991, pasukan multinasional kembali melakukan serangan udara terhadap Kota Baghdad. Serangan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan peluncur-peluncur peluru kendali *Scud* milik Irak. Serangan rudal Scud ke Tel Aviv dan Dhran menewaskan 4orang sipil dan melukai beberapa warga Israel. Pada waktu yang sama, pasukan multinasional juga berhasil melakukan serangan udara sebanyak 10.000 serangan udara(Alberto , 1998: 27).

Selama Perang Teluk II, pihak pasukan multinasional pimpinan AS lebih banyak mengandalkan serangan udara daripada darat. Hal ini didasarkan pada pengalaman pahit AS selama Perang Vietnam. Serangan udara juga dimaksudkan agar mampu menghancurkan industri vital Irak serta ekonomi

militer yang menghubungkan Irak dengan Kuwait. Dengan demikian, diharapkan pasukan Irak akan keluar dari bunker-bunker perlindungan dan mental pasukan Irak akan merosot sehingga akan menyerah dan tertekan. Dengan hancurnya infrastruktur Irak juga diharapkan akan menimbulkan pemberontakan dalam negeri Irak(Alberto , 1998: 27).

Pada 29 januari 1991, tanpa diduga sebelumnya, tank-tank Irak berhasil memasuki Kota Khafji di Arab Saudi dan mendudukinya selama dua hari. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan multinasional semakin gencar dalam membalas serangan dari pasukan Irak. Pada 13 Februari 1991, pasukan multinasional pimpinan AS melancarkan ultimatum terhadap Irak, yaitu jika pasukan Irak tidak segera ditarik mundur dari Kuwait, maka perang darat akan pecah. Sebaliknya justru Irak menyikapi ultimatum tersebut dengan menyatakan bahwa pasukannya siap berperang. Pada 24 Februari 1991, perang darat pecah. Pada hari berikutnya, pasukan multinasonal berhasil melawan 20.000 tentara Irak serta menghancurkan ratusan tank. Pada 27 Februari, panglima tentara pasukan multinasional, Jenderal Norman Schwarzkopf mengatakan paling tidak 29 revisi Irak dan lebih dari 300.000 tentara Irak berhasil dilumpuhkan. Pada 28 Februari pukul 05.00 GMT, George Bush memerintahkan penghentian serangan yang menandai berakhirnya Perang Teluk II(Khadduri , 1997: 36).

C. Perang dan Implikasinya bagi Kawasan Asia Barat

1. Memanasnya Suhu Politik Asia barat

Invasi Irak ke Kuwait telah menyebabkan suhu politik di Asia barat semakin meningkat. Memanasnya suhu politik dapat dilihat dengan adannya pembantaian 22 warga Palestina oleh Israel di Yerussalem Timur pada 8 Oktober 1990. Tragedi Yerusalem sangat berkaitan erat dengan situasi di kawasan Teluk Parsi. Dalam Perang Teluk II, Saddam Hussein berhasil tampil sebagai motor kubu radikal melawan kubu moderat, yaitu rezim-rezim yang berkuasa di Mesir, Arab Saudi dan Negara-negara monarki teluk lainnya. Bangsa Palestina yang selama ini merasa kecewa terhadap tingkah laku politik rezim-rezim tersebut seakan menemukan sosok idola pada diri Saddam Husein. Apabila dalam Perang Teluk II selanjutnya yang dilihat Palestina bahwa yang dihadapi Irak tidak hanya Kuwait tetapi pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat yang selalu menganakemaskan Israel, musuh Palestina(Mussalam, 1996: 82).

Dukungan rakyat Palestina terhadap Saddam Hussein tidak terlepas dari sejumlah faktor, yaitu: (1) sekitar 170.000 orang Palestina tinggal di Irak (2) kegagalan proses perdamaian melalui jalur diplomasi (3) perlakuan tidak simpatik bekas penguasa Kuwait (4) desakan opini publik Palestina di daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk mendukung Saddam. Pada waktu Perang Teluk II, Saddam juga memanfaatkan momentum yaitu menuntut penarikan mundur tentara Israel dari Palestina sebagai prasyarat mundurnya tentara Irak dari Kuwait. Semangat gerakan intifadhah warga Palestina di daerah pendudukan yang sebelum pecah Krisis Teluk II tampak melemah, kembali bergelora. Perang Teluk II merupakan momentum yang tepat bagi rakyat Palestina untuk kembali bangkit dan berjuang melawan Israel(Mussalam, 1996: 82).

Pada 12 Oktober 1990, juga terjadi pembunuhan terhadap pemimpin milisimanorit, Jenderal Michel Aoun di Libanon. Di Mesir, Ketua Parlemen Mesir Rifa'at Mahghoubdan dan tiga pengawalnya ditembak mati oleh orang-orang tak dikenal. Pemerintah Mesir menduga bahwa pembunuhan misterius tersebut didalangi oleh unsur-unsur pendukung Saddam Husein, yaitu bisa terdiri dari para agen Saddam atau para ekstremis Palestina. Jika sangkaan tersebut terbukti, maka terbunuhnya Mahghoub bisa dianggap sebagai salah satu "getah pahit" yang harus dirasakan Mesir akibat Perang Teluk II. Dampak Perang Teluk II bagi Mesir juga terasa dibidang ekonomi. Perang Teluk II telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran karena terusirnya ratusan ribu tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait. Pemerintah Mesir menuduh rezim Saddam Hussein telah merampok lebih dari USS 12 miliar harta benda tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait. Kembalinya lebih sejuta tenaga kerja kerja Mesir dari Irak dan Kuwait tidak hanya berdampak kurangnya anggaran pendapatan Pemerintah Mesir, tetapi juga menimbulkan masalah sosial ekonominya yang lebih serius, terutama yang berkaitan dengan sektor lapangan kerja, perumahan dan pendidikan. Perang Teluk II juga mengakibatkan merosotnya pendapatan Mesir dari sektor pariwisata. Sebelum terjadinya Perang Teluk II, sektor pariwisata telah menyumbangkan sekitar 10% dari total pendapatan luar negeri. Akibat Perang Teluk II, pendapatan dari sektor pariwisata menurun USS 400 juta sampai USS 1 miliar karena banyak turis yang membatalkan rencana kunjungan ke Mesir(Alnasrawi, 1994: 47).

2. Irak Merugi Secara Ekonomi, Dikucilkan Dari Dunia Internasional dan Krisis Dalam Negeri

Perang Teluk II membawa dampak yang luar biasa bagi Irak di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan Negara yang paling parah dan menderita di sektor ekonomi akibat Perang Teluk II. Secara kasar, kerugian Irak di bidang ekonomi akibat Perang Teluk II ditaksir sekitar 500 triliun. Disamping itu Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 miliar dolar AS. Meskipun demikian Kuwait juga harus menerima kenyataan bahwa 300 dari 500 sumur minyaknya banyak yang hancur akibat aksi bumi hangus yang dilakukan pasukan Irak(Alnasrawi, 1994: 47).

Perang Teluk II juga mengakibatkkan Saddam Hussein dan Negara Irak semakin terpojok dan terisolasi dari dunia Internasional Sanksi Ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh blockade militer Amerika Serikat dan sekutunya sangat menyulitkan posisi Saddam Husein dalam pergaulan Intenasional. Dalam bidang olahragapun, Irak tidak berhak turut serta didalamnya. Irak disingkirkan dari Pesta Olahraga Asia atau Asian Games tahun 1990 di Beijing dan dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) (Alberto , 1998: 27).

Bahkan pada 30 Nopember 1990, Dewan Keamanan PBB atas desakan Amerika Serikat dan sekutunya mengesahkan Resolusi No.678 yang memberikan legitimasi bagi penggunaan kekuatan militer untuk menggempur pasukan Irak. Akibat Perang Teluk II, Irak dikucilkan dari hampir semua sektor kehidupan Internasional, baik politik,ekonomi, militer maupun sosial budaya. Selain dikucilkan dalam pergaulan Internasional, kondisi dalam negeri Irak juga cukup memperihatinkan, terutama dalam bidang politik. Akibat Perang Teluk II, Saddam Husein harus menghadapi berbagai kelompok politik yang berusaha menggulingkan kekuasaannya. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Negara-negara Barat semakin mencengkram Irak dengan menguasai Iran bagian Selatan dengan dalih menjaga *balance of power* di kawasan tersebut dan melindungi kaum Syiah yang selama ini ditindas oleh Saddam Husein. Larangan bagi Irak untuk terbang di Irak Selatan yang notabenya masih menjadi bagian dari wilayah Irak merupakan tamparan yang menyakitkan bagi kedaulatan Negara Irak(Cordesman, 1999: 52).

3. Normalisasi Hubungan Antara Iran dengan Irak

Perang Teluk II selain sebagai bencana ternyata juga berdampak positif bagi perbaikan hubungan antar Irak dengan Iran yang bersitegang selama delapan tahun selama Perang Teluk I. Salah satu faktor menarik yang mendorong usaha normalisasi adalah kekecewaan Saddam terhadap Negara-negara Arab yang selama Perang Teluk I sebagiann besar mendukungnya kemudian justru secara mengejutkan balik menyerangnya dalam Perang Teluk II. Dalam posisi yang semakin terjepit, maka tidak ada jalan lain bagi Irak untuk mendekati bekas musuhnya dalam Perang Teluk I. Sikap tersebut dimabil oleh Irak setelah melihat bahwa Iran berusaha bersikap netral dalam Perang Teluk II. Meskipun Iran mengencam invasi Irak ke Kuwait, tetapi disisi lain Iran juga sangat menentang kehadiran pasukan multinasional dan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah Perang Teluk II(Hiro, 1992: 34).

Pada Agustus 1990, Saddam Husein membuat kejutan ketika memutuskan untuk menerima seluruh syarat yang diajukan oleh Iran demi tercapainya perdamaian antara Irak dan Iran. Di antara syarat tersebut adalah diberlakukannya kembali Perjanjian Aljiers tahun 1975 yang pernah dibatalkan secara sepihak oleh Saddam serta ditaatinya seluruh pasal Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 598 tahun 1998. Pada awal September 1990, Menteri Luar Negeri Irak Tariq Azis berkunjung ke Iran. Pada pertengahan November 1990, Menlu Iran 'Ali 'Akbar Velaty sebagai balasan kunjungan Tariq Azis ke Irak. Inilah saling kunjung pertama antara pejabat tinggi kedua negara sejak revolusi Islam Iran tahun 1979. Kunjungan Tariq Azis ke Iran Velayati ke Irak menandai era baru dalam hubungan kedua negara yang selama delapan tahun terlibat perang(Alnasrawi, 1994: 47).

Berbeda dengan upaya normalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat yang masih mendapat tantangan keras dari kaum mullah radikal, normalisasi hubungan Irak-Iran justru mendapat dukungan penuh dari hampir seluruh elite politik Iran. "*New Day for Iran-Irak, Old Threat from US*", merupakan salah satu judul tajuk rencana harian Kayhan Internasional yang mencerminkan aspirasi kaum mullah garis keras. Bahkan pada 10 September 1990, Ayatullah Shadeq Khalkhali, anggota majelis Syura Islami dan para tokoh garis keras secara terbuka mendesak pembentukan aliansi militer Irak-Iran guna menghadapi Israel, Amerika Serikat dan Arab Saudi(Alberto , 1998: 27).

Implikasinya bahwa apa yang diperkirakan bahwa, bagaimanapun bentuk penyelesaiannya krisis Teluk II justru akan merugikan kepentingan global perjuangan bangsa Arab, kini mulai terbukti. Perang Teluk II hampir dapat dipastikan akan berakhir dengan kehancuran dipihak Irak, yang sebenarnya mampu tampil sebagai "pembela" perjuangan bangsa palestina melawan Israel. Dengan hancurnya kekuatan militer Irak, Israel dapat semakin menepuk dada. Sebaliknya, nasib perjuangan bangsa palestina semakin sulit dan tidak pasti(Alnasrawi, 1994: 47).

Saddam memang telah membuktikan ancamannya dengan menyerang Israel seraya berobsesi mengubah peta peperangan dari Irak, AS dan para Sekutunya menjadi peperangan besar antara seluruh Negara Arab melawan negara Israel dan AS, jika Israel berhasil diseret untuk terlibat dalam Perang Teluk II. Pecahnya perang teluk II akan membuat mayoritas negara Arab "*moderat*" semakin berada di bawah payung AS. Perang ini membuat mereka, dari segi ekonomi, politik, militer, semakin bergantung pada Barat, khususnya AS(Cordesman, 1999: 52).

Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak terjadinya perang Teluk 2 yaitu:

Bagi pihak irak dampak yang dialami diantaranya:

a. Irak membayar ganti rugi kepada kuwait
b. Irak harus mengizinkan tim inspeksi nuklir PBB memeriksa nuklir Irak
c. Irak kena embargo ekonomi.
d. Timbulnya semangat anti-Amerika, karena adanya kebencian terhadap negara Amerika Serikat
e. Negara dan perekonomian Irak rusak berat karena gempuran tentara multinasional dan blokade ekonomi serta embargo yang diterapkan PBB
f. Konflik teluk mempercepat proses perdamaian Iran – Irak yang sebelumnya berjalan tersendat-sendat, karena sebelumnya Baghdad bersikeras mempertahankan pendiriannya.
g. Konflik teluk telah membuka kembali perhatian dunia tentang perlunya penyelesaian segera seluruh masalah Asia barat.

Bagi Pihak Kuwait dampak yang dialami diantaranya ladang-ladang minyak Kuwait rusak berat karena dibakar oleh Irak. Sedangkan bagi pihak negara ke tiga diantaranya:

a. Perpecahan negara-negara Arab
b. Amerika Serikat berhasil memperoleh pangkalan militer di Dahran (Arab Saudi) untuk melindungi Israel sebagai sekutu terpentingnya di Asia barat.
c. Peranan Amerika Serikat semakin kuat di Asia barat
d. Kekuatan Israel semakin tidak ada tandingannya.

Selain itu beberapa upaya penyelesaiannya telah dilakukan diantaranya:

1. Penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait

Pada 25 Februari 1991 radio Baghdad menyiarkan penarikan mundur pasukan Irak tersebut dan pada 29 Februari 1991 pasukan Irak baru benar-benar meninggalkan Kuwait. Saddam Husein sendiri telah menyatakan penarikan pasukannya akan dilakukan secara bertahap. Namun penarikan pasukan-pasukan itu terhambat oleh serangan-serangan pasukan sekutu. Presiden Amerika saat itu, George Bush, mengatakan perang tidak akan berhenti meski Irak telah menarik mundur pasukannya dengan klaim bahwa militer Irak merupakan ancaman bagi Negara-negara Asia barat lainnya juga bagi kepentingan AS. Perang Teluk II ini berakhir pada 28 Februari 1991(Hiro, 1992: 34).

2. Intervesi Amerika serikat

Pada awalnya Irak mengira Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam peperangan ini. Ternyata Amerika Serikat datang atas mandat dari Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat memimpin pasukan koalisi pada tahun 1991 yang dinamai operasi Badai Gurun (Desert Strom) untuk memaksa Irak mundur dari daerah Kuwait. (Hubungan Irak-AS sendiri pada masa kepemimpinan Saddam Husein tidak dapat dikatakan baik, Saddam Husein tidak pernah Penyerangan Kuwait oleh Irak dibawah kepemimpinan Presiden Saddam Husein pada tanggal 2 Agustus 1990 dianggap melanggar hak asasi manusia dalam perdamaian dunia. Tidak bisa disangkal penyerangan ini mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai negara, tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat, sebagai "gudang senjatanya HAM", Amerika Serikat turut terlibat dalam perang yang disebut Perang Teluk II ini(Hiro, 1992: 34).

D. PENUTUP

Beberapa serangan yang gencar dilakukan Irak kepada negara tetangga ialah perlawanan yang ekstrim dilakukan. Namun sudah dua kali konflik eksternal berpengaruh pada negara-negara persatuan Arab. Dalam hal minyak tingkat intensitas konflik sangat tinggi dibandingkan lainnya, karena tidak hanya berdampak pada negara kawasan namun juga hubungan luar negeri.

Irak belum bisa membuka pikiran bahwa ada banyak dampak positif dengan memiliki minyak, namun lebih memilih jalan untuk memperluas kekuasaan melebihi batas wilayah tanpa melihat posisinya sebagai salah satu ladang yangs trategis bagi negara asing diantaranya Iran dan Kuwait.

Hal inilah yang memicu pertentangan luar biasa bagi negara Arab sebagai negara yang mampu memanfaatkan potensi dan perusahaan asing khususnya AS yang mampu melancarkan gerakan demokrasi dengan pasukan multinasionalnya ke penjuru negara-negara Arab yang berkonflik.Lantas hal itu memicu perang dengan skala yang besar yaitu perang kepentingan melawan negara adidaya.

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Mengkaji peristiwa Perang Teluk II dan dampaknya bagi dunia

PENGUMPULAN HASIL

Portofolio dikumpulkan di Exelsa.

EVALUASI
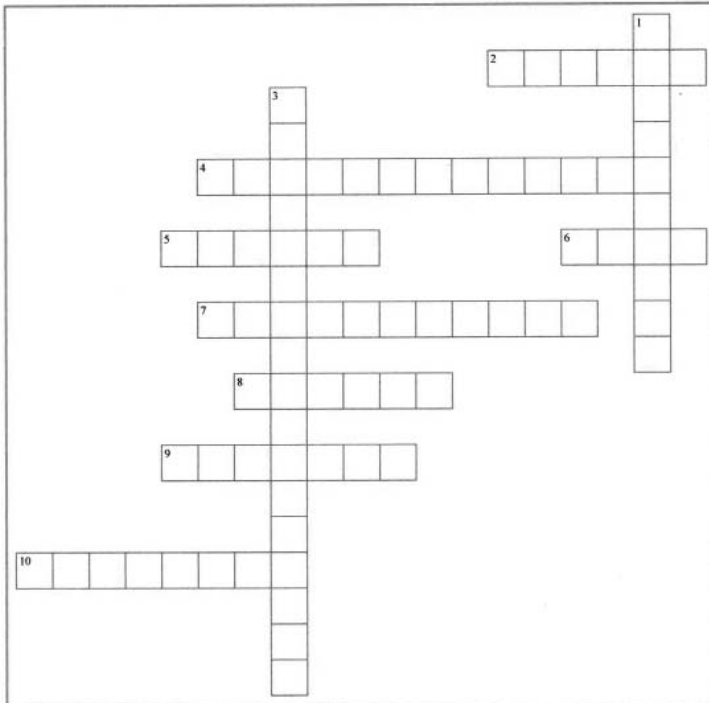
Across

2. Kota yang menjadi tempat konferensi pertama Irak dan Kuwait, meski mengalami kegagalan.
4. Dugaan Irak atas tindakan Kuwait dan Uni Emirat Arab
5. Perang Teluk 2 merupakan perang Irak melawan ...
6. 8 rudal yang dilepaskan Iraq ke Israel dan Arab Saudi.
7. Operasi Badai Gurun
8. Kota yang berhasil diduduki tank-tank Irak di Arab Saudi
9. Salah satu tujuan serangan rudal Scud Iran pada 19 Januari 1991
10. Serangan tembakan rudal dari kapal-kapal Multinasional di Teluk

Down

1. Operasi pembebasan Kuwait 16 Januari 1991
3. Panglima tentara pasukan multinasional AS tahun 1991

Tugas terstruktur:
Buatlah meme dengan menggunakan aplikasi di gaget tentang stop pelanggaran HAM dalam bentuk apapun dari tingkat keluarga, masyarakat maupun negara!
Teknik pengumpulan, format berupa .jpg diunggah pada exelsa.

BAB XII

KRISIS/ PERANG TELUK III

12.1 Deskripsi Materi

Pemahaman mengenai latar belakang Perang Teluk III, pecahnya Perang Teluk III, runtuhnya Kekuasaan Saddam Hussain

12.2 Relevansi

Setiap pribadi dapat berjuang untuk peramaian dunia

12.3 Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis Perang Teluk III serta mampu menghargai arti penting perdamaian.

Glosarium

1. Operation Desert Storm (Operasi Badai Gurun) adalah serangan serangan udara masif oleh pasukan multinasional atas Bagdad dan beberapa wilayah Irak lainnya
2. Moderat adalah menghindarkan pengungkapan atau perilaku yang ekstrim.Moderat politik adalah seseorang dalam kategori tengah spektrum politik kiri-kanan

A. Latar Belakang Perang Teluk III

Saddam Hussein telah melakukan banyak pertentangan di mata negara Arab dan Barat yang berhubungan langsung dengan negara mandatnya. Amerika Serikat telah banyak berkontribusi untuk membantu berbagai resolusi perdamaian negara Kuwait dan berusaha memecahkan krisis minyak yang sebelumnya dialami oleh negara Iran. Apabila dikaji secara mendalam, AS telah memainkan perannya semenjak perang teluk I berlangsung (Hopwood, 1993: 78).

Dari sudut pandang internal negara, Perang Teluk III salah satunya dilatarbelkangi oleh konspirasi dan ambisi dari George H.W.Bush yang ingin mendapatkan simpati dari warga Amerika Serikat untuk mencalonkan dirinya ke pemilihan presiden (Makiya, 1998: 56).

Adanya tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia dan nuklir dengan bukti foto-foto satelit. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak dan hasilnya mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun, Amerika Serikat tetap pada rencananya walaupun banyak negara yang menentangnya. Akhirnya tanpa mandat dari PBB di bantu Inggris dan Australia maka Amerika Serikat mulai melakukan penyerangan ke wilayah Irak dan selanjutnya Irak bertahan dengan membalas serangan tersebut dan terjadilah peperangan antara keduanya (Hopwood, 1993: 78).

Terkadang politik disalahgunakan untuk saling memenangkan hak suara agar salah satu pemimpin merasa dirinya yang paling benar, begitu juga dengan Amerika Serikat menuduh Irak menyimpan senjata pembunuh massal yang belum tentu kebenarannya dan membuat paradigma ke seluruh sekutunya serta dunia bahwa Irak adalah negara yang berbahaya, bahkan keinginan untuk membunuh Saddam Hussein yang diklaim sebagai sukseksor dari Irak selama ia memerintah (Hopwood, 1993: 78).

B. Pecahnya Perang Teluk III

Pada pidato kenegaraan presiden AS George W Bush di depan kongres pada tanggal 29 Januari 2002 yang menyebutkan Irak, Iran, Korea Utara sebagai bagian dari 'Poros Kejahatan' semakin meningkatkan kekhawatiran akan dimulainya serangan militer AS ke Irak tersebut. Lawatan Wapres AS Dick Cheney kesembilan Negara Timur-Tengah pertengahan Maret 2002,

disinyalir untuk mendapatkan dukungan penuh negara-negara dikawasan tersebut serta menggulingkan Saddam. Dengan dalih negara Irak tersebut mempunyai senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan masyarakat dunia, AS sangat berkeinginan menyerang negeri 1001 malam tersebut. Tapi barangkali hanya Israel dan Kuwait yang siap mendukung penuh upaya AS menggulingkan Saddam. Arab Saudi meskipun tidak menyukai Saddam tidak akan mengizinkan pangkalan udara dan daratnya digunakan untuk menyerang Irak. Sikap tersebut dipegang teguh pemerintah Riyadh sejak berakhirnya Perang Teluk II tahun 1991. Seperti Negara Arab lainnya kecuali Kuwait, Arab Saudi konsisten mempertahankan kesatuan teritorial negeri Irak (Makiya, 1998: 56).

Lain halnya dengan Negara Kuwait, Negara ini sangat membenci Saddam dan masih menyimpan dendam dengan Saddam karena Saddam pernah menjadikan Negara Kuwait ini sebagai bagian dari provinsi Irak pada Perang Teluk II. Walaupun demikian Kuwait yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Arab Saudi yang menjadi ujung tombak melawan Irak pada masa perang Teluk II tahun 1991 ikut menentang rencana serangan AS ke Irak. Turki pun masih ragu ikut ambil bagian dalam aksi serangan militer terhadap Irak. Iming-iming bantuan 16 miliar dollar dari Washington ternyata tidak memudarkan keraguan pemerintah Ankara untuk membentuk satu kekuatan. Negara lainnya seperti Iran dan Suriah justru lebih menginginkan *status quo* di Irak, Uni Eropa pun belum melihat adanya alasan memadai bagi AS untuk menyerang Irak. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi peringatan keras pada Amerika serikat jika menyerang Irak. Meski demikian, mereka sepakat Irak harus mengizinkan kembalinya tim PBB untuk memeriksa senjata pemusnah massal. Alasan Irak menolak tim PBB itu karena khawatir ada penyusupan CIA dalam tim tersebut seperti pada tahun 1998 (Smolansky , 1991: 87).

Faktor minyak selalu menjadi isu sentral dan selalu dilihat sebagai salah satu pemicu utama terjadinya seluruh konflik di kawasan Timur-Tengah, dan tidak terkecuali dalam konflik Amerika Serikat-Irak. Hal ini disebabkan karena kawasan Timur-Tengah merupakan kawasan penghasil minyak bumi terbesar didunia. Dan hampir seluruh produksi minyak dunia didapatkan dari kawasan ini. Hampir seluruh pejabat Irak secara terang-terangan menuduh Negara AS ingin menguasai sumur-sumur minyak Irak yang merupakan terbesar kedua setelah Arab Saudi. Negara AS

sendiri juga mulai memberi perhatian pada minyak di Timur-Tengah sejak 50 tahun yang lalu yakni ketika kongres AS saat itu menggelar sidang khusus untuk mengeluarkan keputusan tentang jumlah minyak yang harus diimpor AS setiap bulannya. Perhatian pemerintah AS pada minyak di Timur-Tengah semakin besar setelah aksi boikot minyak Arab menyusul perang Arab-Israel tahun 1973. Salah satu presiden AS Jimmy Carter pernah menetapkan kebijakan yang mengharuskan AS mengamankan dengan segala cara suplai minyak. Bila muncul ancaman, maka AS harus menggunakan segala cara termasuk kekuatan militer untuk menjamin terus mengalirnya suplai minyak. Pada perang Irak-Iran, kapal-kapal perang AS turun tangan mengawal kapal-kapal tanker minyak dari teluk Arab melalui selat sempit Hormuz menuju negara-negara barat, menyusul Iran saat itu mengancam akan menyerang dengan rudal semua kapal tanker yang lewat selat Hormuz (Makiya, 1998: 56).

Diluar kawasan Arab Teluk, AS juga meningkatkan kehadiran militernya sesuai dengan tuntutan strategi baru dalam menghadapi tantangan abad 21, globalisasi, perang bintang dan menjaga kesepakatan internasional. Bertekad mengurangi ketergantungan pada minyak Timur-Tengah yang sarat konflik itu, beberapa tahun terakhir ini, AS berhasil meningkatkan hubungan dagangnya dengan Negara-negara produksi minyak diluar Negara Arab Teluk untuk mencari pemasok minyak baru, seperti Rusia, Afrika barat, dan negara kawasan Laut Kaspia. Namun hal itu masih diragukan, AS mengimpor minyak dari Rusia dan Negara kawasan laut Kaspia bisa dianggap lebih aman dari kawasan Timur-Tengah. Rusia tentu menerapkan kebijakan politik yang mengutamakan kepentingannya.Dalam banyak kasus, Rusia dan AS tidak sinkron dalam kebijakan politik luar negeri nya. Misalnya, Rusia pasti tidak setuju dengan kebijakan AS tentang poros kejahatan yang memasukkan Irak, Iran, dan Korea Utara. Tiga Negara yang masuk poros kejahatan versi AS itu dikenal memiliki hubungan sangat baik dengan Moskow. Rusia dan Iran misalnya, menjalin hubungan kerja sama soal pembuatan reaktor nuklir. Rusia juga mendapat proyek senilai puluhan milliard di Irak.Selain itu, Rusia masih dalam transisi pada pembangunan ekonominya.Karena itu moskow masih sangat butuh Negara semacam Irak dan Iran sebagai mitra bagi pembangunan ekonomi Rusia (Smolansky , 1991: 87).

Dipihak lain, minyak selalu menggelisahkan Baghdad karena hanya komoditas itu sebagai satu-satunya kekuatan yang dimiliki Irak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan juga menjadi kekuatan tawar-menawar di dunia internasional. Jika terjadi krisis pada sector minyak, tidak ada komoditas lain yang menjadi andalan Baghdad (Smolansky , 1991: 87).

Selain kebutuhan besar akan minyak, perihal senjata kimia dan biologi Irak senantiasa mendapat perhatian besar AS dan Negara barat lain, bahkan lebih besar dari isu senjata nuklir Irak. Masalah senjata kimia dan biologi itu selalu menjadi bahan polemic baik sebelum maupun sesudah berhentinya aktivitas tim inspeksi senjata pemusnah massal PBB di Irak pada Desember 1998. pengembangan dan produksi senjata kimia dan biologi telah mendapat perhatian pimpinan Irak sejak awal tahun 1970-an. Perhatian yang besar tersebut merupakan bagian dari bangkitnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Irak saat itu. Selain itu, program senjata kimia dan biologi Irak itu sebagai bagian pula dari persaingan militer dan perlombaan senjata dengan Iran, serta berkaitan juga dengan isu konflik Arab-Israel. Meletusnya perang Irak-Iran tahun 1980-1988 mengantarkan Saddam untuk lebih memberikan perhatian pada program senjata kimia dan biologi, dimana Baghdad kala itu berambisi memiliki kemampuan militer nonkonvensional untuk menutupi kekurangan kekuatan manusia Irak dibanding Iran (Makiya, 1998: 56).

Disamping itu, Irak merasa harus memilih senjata kimia dan biologi sebagai unsur kekuatan pengimbang strategis dikawasan Teluk dan Timur-Tengah yang bersebelahan ini, menyusul hancurnya reactor nuklir Irak dekat Baghdad setelah digempur pesawat tempur Israel pada tahun 1981 (Smolansky , 1991: 87).

Oleh karena itu, program senjata kimia dan biologi Irak mengalami kemajuan pesat sejak awal tahun 1980-an. Saddam memberi semua kemudahan keuangan, ilmu pengetahuan, tekhnis dan sumber daya manusia untuk program senjata kimia dan biologi yang membantu tercapainya kemajuan dibidang pembangunan infrastruktur untuk program tersebut. Irak juga berhasil mencapai menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat di dunia Arab, Eropa Barat, dan Timur untuk proses pengalihan tekhnologi senjata kimia dan biologi. Invasi Sekutu ke Irak tahun 2003 dengan kode “Operasi Pembebasan Irak” merupakan serangan sekutu dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mencari dan menghancurkan Irak yang dituduh mempunyai senjata pemusnah massal. Invansi

ini secara resmi dimulai tanggal 19 maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat dalam penyerangan ini adalah untuk melucuti senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekan rakyat Irak dari kekuasaan otoriter Saddam (Makiya, 1998: 56).

Persiapan awal perang ini telah dimulai ketika 100.000 tentara Amerika serikat dikumpulkan di Kuwait. Amerika Serikat sengaja menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan Koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak.Invansi Irak tahun 2003 inilah yang jadi pembuka perang Irak. Ketika Irak sudah jatuh ketangan Koalisi, masih terus terjadi peperangan yang digelorakan pemberontak melawan tentara koalisi Amerika Serikat hingga 2011 (Smolansky , 1991: 87).

Invansi ke Irak oleh Amerika Serikat dan koalisinya ini karena tuduhan yang sifatnya tidak benar. Sebab, setelah perang selesai, tidak terbukti adanya tuduhan tersebut dan justru pihak Amerika Serikat dan koalisinya lah yang menginginkan politik minyak disana.Dengan menuduh Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal yang apabila tidak dicegah dapat mengancam kehidupan seluruh umat dibumi ini, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Irak. Selain tuduhan tersebut, Amerika Serikat juga menuduh Irak telah melanggar resosuli PBB, kebijakan yang menindas rakyak irak, dan percobaan pembunuhan terhadap george H.W.Bush (Makiya, 1998: 56).

Seperti sejarah tahun 2003 silam sekutu ikut campur tangan urusan politik Irak, yaitu atas kediktatoran Saddam Husein. Pada peristiwa peristiwa tersebut, juga tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan dari warga sipil. Bahkan, sejumlah jurnalis internasional tewas dan hilang. Dengan kata lain, invansi Amerika Serikat dan koalisinya ini bertujuan ingin menumbangakan kekuasaan Saddam Husein dan menyeretnya ke mahkamah internasional. Akhirnya melalui pertempuran yang sengit, rezim Saddam berhasil digulingkan (Smolansky , 1991: 87).

Warga irak pun menyambut tumbangnya kekuasaan otoriter Sadaam dengan suka cita. Akan tetapi, usai tumbanganya sang diktaktor di Irak, ternyata masih juga banyak terjadi perang saudara antar kelompok yang saling berebut kekuatan dan kekuasaan untuk memegang pemerintahan. Dimana-mana terjadi teror dan bom bunuh diri. (Hopwood, 1993: 78).

Akibat serangan invasi Amerika Serikat dan koalisinya ke Irak ini, dilaporkan lebih dari 14.000 warga irak hilang.Peristiwa ini menjadi perhatian dan tontonan masyarakat dunia pada tahun tersebut sebagai perang besar dan banyak memakan korban jiwa (Makiya, 1998: 56).

C. Runtuhnya Kekuasaan Saddam Hussaen

Irak telah dapat di kuasai AS sepenuhnya, dan Saddam pun telah dihukum mati oleh mahkamah internasional.Tapi keadaan di Irak sendiri tidak lebih baik dari saat Saddam berkuasa, bahkan lebih buruk. Irak seperti kembali ke keadaan 50 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. AS sendiri mendapat protes dari masyarakat internasional karena dianggap tidak bertanggung jawab atas keadaan di Irak saat ini (Hopwood, 1993: 78).

Saddam memegang kekuasaan penuh terhadap konflik antara pemerintah dan angkatan senjata dengan membentuk pasukan keamanan yang menindas dan mengukuhkan wibawanya terhadap aparat pemerintahan. Sebagai presiden, Saddam menciptakan pemerintahan yang *otoriter* (kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin tanpa melihat derajat kebebasan individu). Dalam mempertahankan kekuasaannya melalui perang Iran-Irak (1980-1988) dan Perang Teluk tahun 1991 menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia. Ia menindas gerakan yang dianggapnya mengancam khususnya gerakan yang muncul dari kelompok etnis atau keagamaan yang memperjuangkan kemerdekaan atau pemerintahan otonom. Saddam adalah seorang diktaktor irak dan salah satu pemimpin Dunia yang paling keras terutama pada Amerika Serikat dan Israel (Smolansky , 1991: 87).

Saddam Hussein ingin menjadi penguasa tak hanya penguasa Irak tapi juga penguasa Arab. Saddam rela menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan ambisinya termasuk dengan cara *represif* (menekan,menahan dan menindas). Selama masa pemerintahannya ia sering kali melakukan *manuver* (gerakan yang cepat dari pasukan kemiliteran) yang cukup ekstrem. Ia menganggap bawahannya sebagai alat untuk melangsungkan ambisinya (Karsh,Rautsi, 1991: 90).

Pasca invasi Amerika Serikat ke Irak mengalami berbagai macam perubahan baik dalam perubahan sosial ekonomi dan politik. Perubahan sosial yang muncul setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein adalah terjadinya perubahan sosial yang drastis sehingga mempertajam ke arah perang saudara

diantara rakyat itu sendiri yakni antara pendukung Saddam Hussein dan yang kontra terhadapnya, antara kelompok Syiah dan Sunni maupun suku kurdi yang merasa berhak dalam campur tangan pemerintahan Irak. Kondisi ekonomi Irak pasca Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah minyak menjadi masalah utama yang kemudian AS mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak dengan berusaha memasukkan perusahaan swasta miliknya di Irak dalam program *rekonstruksi* (menata atau pengembalian seperti semula) infrastruktur minyak di Irak (Makiya, 1998: 56).

Dibidang politik secara umum, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Irak yang telah berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat yakni menggulingkan rezim Saddam Hussein yang diklaim otoriter terharap rakyatnya oleh Amerika Serikat (Smolansky , 1991: 87).

Ketika keberhasilan Amerika Serikat menggulingkan Saddam Husein maka terjadi kekosongan pemerintahan yang berujung pada perebutan kekuasaan serta Amerika serikat yang menginginkan pendirian demokrasi di kawasan Irak, akan tetapi penduduk Irak tidak menyetujui akan hal itu mereka menganggap apa yang diterapkan oleh Amerika Serikat berujung pada pemanfaatan negara Irak sehingga penduduk Irak merasa bahwa sistem pemerintahan Irak sebagai pemerintahan boneka Amerika Serikat dan rakyat juga ragu terhadap kualitasnya. Dalam kestabilan politik ditandai dengan tingginya intensitas kekerasan dan konflik yang terus terjadi karena penguasa gagal untuk menjalankan kekuasaan yang disebabkan oleh rakyat yang tidak mau mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa. (Hopwood, 1993: 78).

D. Dampak Perang Teluk III Bagi Irak

Perang teluk dinyatakan berakhir pada 1 Mei 2003 dengan menyatakan pihak Amerika yang menjadi pemenang dalam peperangan tersebut. berakhirnya perang tersebut tentunya membawa pengaruh bagi tatanan kehidupan di Irak (Smolansky , 1991: 87). Antara lain:

1. Bidang Sosial

Dampak perang teluk bagi Irak ialah jatuhnya banyak korban. Tidak hanya tentara militer Irak namun warga sipil Irak juga sering menjadi korban. Semenjak jatuhnya Sadam Husein pun memicu perang saudara di Irak. Dari

segi keagamaan, kelompok Syiah umumnya kontra dengan kepemimpinan Saddam Husein sedangkan Sunni justru pro terhadap Saddam Husein. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu perseteruan yang menyulut konflik horisontal dan sampai saat ini perseteruan Sunni dan Syiah sulit diselesaikan (Yuliningrum, 2009: 80).

2. Bidang Ekonomi

Dampak perang ini tentunya mempengaruhi ekonomi di Irak. Keadaan sosial politik Irak yang kacau secara langsung mempengaruhi kondisi Irak. Aset – aset negara dijarah habis – habisan ketika kondisinya sedang buruk. Ekspor utama dari Irak ada pada minyaknya , karena diserang oleh Amerika membuat produksi minyak di Irak menurun sebab lumpuhnya perekonomian Irak (Yuliningrum, 2009: 80).

3. Bidang Politik

Setelah terjadi Invasi oleh Amerika Serikat, Amerika lalu membuat pembentukan pemerintah sementara " Dewan Lima". Tugasnya ialah sebagai pengurus sementara dan merakit komposisi pemerintahan. Dewan Lima terdiri dari Abdul Hasyim al- Hakim mewakili Syiah, Jalal Tarbani dan Massaodud Bazrani mewakili Kurdi, Ahmad Chalabi ketua *Iraqi National Congress (INC)* serta Adnan Pachachi sebagai penganut Islam Sunni. Dalam Dewan Lima ini sering terjadi perseteruan karena dianggap orang – orang tersebut merupakan rancangan Amerika Serikat. Setelah mengalami pergolakan yang panjang di dalam Dewan Lima akhirnya Irak mengadakan pemilu pada Januari 2005, pemilihan umum ini diselenggarakan untuk membuat rancangan undang – undang baru dan mengangkat pemerintah sementara. Pemilihan ini dipimpin oleh presiden pertama yang dipilih secara demokratis yaitu Jalal Tabalani. Sedangkan Oktober 2005 diadakan pemungutan suara untuk mendukung UUD baru lewat referendum meski harus diwarnai dengan ancaman, aksi teror, ketakutan dan perpecahan dari kelompok tertentu (Yuliningrum, 2009: 80).

E. PENUTUP

Perlawanan sebelumnya yang telah dilancarkan oleh Irak berdampak pada perang besar yang sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Dalam hal ini AS sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia II memilih untuk

bertindak dengan jalan politik, karena selain dengan gencatan senjata jalan itulah menjadi hal utama yang dilakukan George H.W.Bush untuk membatasi kekuasaan Saddam Husein.

Tentunya ada negara Islam yang mendukung kedua belah pihak. Iran dan negara-negara Arab mendukung Irak melawan AS karena menyadari politik yang dilakukan semata-mata untuk keuntungan sepihak, sedangkan kuwait dan Israel mendukung AS karena menyadari bahwa ada usaha ke arah perdamaian dan persatuan kembali wilayah yang berdampak konflik.

Sebuah serangan besar dengan sebutan "Operasi Pembebasan Irak" dilancarkan PBB untuk mengatasi konflik Irak hingga menggulingkan kekuasaan Saddam Husein. Dampaknya semua kelompok etnis saling memperebutkan daerah kekuasaan yang sebelumnya telah dikuasai Saddam.

Hei Pak Bush, mengapa anda selalu ikut campur urusan negara kami! Takut ya kalau ada saingannya?

Pak Husein, sekali-kali mikir panjang yang rugi tidak cuma kami tapi warga dunia. Masa mau perang terus?!

Wah dengar-dengar AS mau membumi hanguskan Irak Kira-kira perang Irak berakhir tidak yaa...

Kita beruntung punya Pancasila jadi ideologi yang baik di dunia kita serap sehingga kita fokuskan untuk membangun bangsa menjauhkan disintegrasi dan gerakan separatis, radikalisme,serta menjalin persatuan, NKRI harga mati...

KEGIATAN MENGGALI PENGALAMAN

DISKUSI KELOMPOK

Mengkaji peristiwa Perang Teluk I II dan mengkaji strategi politik kekuasaan negara yang maju serta tidak menguntungkan sepihak

PENGUMPULAN HASIL

Portofolio dikumpulkan di Exelsa.

KEGIATAN REFLEKSI

Jika pada akhirnya negara dihadapkan pada suatu pilihan berperang atau diplomasi sebutkan alasanmu memilihnya dengan berbagi fakta sejarah yang ada!

____

____

____

____

____

____

____

EVALUASI
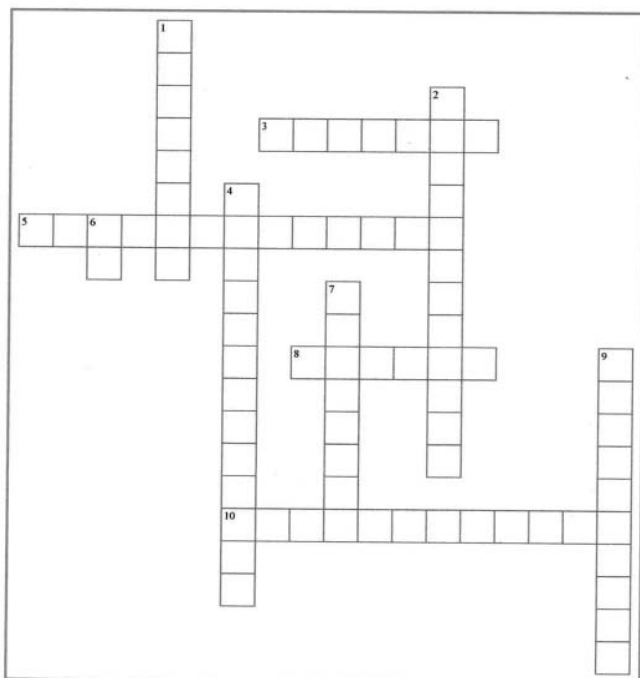
Across

3. gerakan yang cepat dari pasukan kemiliteran
5. Presiden Rusia yang melarang keras AS menyerang Irak
8. Selat strategis di teluk Arab sebagai jalur kapal tanker negara Barat ke Arab
10. Dalang Perang Teluk III dari AS

Down

1. Cara pemimpin menekan,menahan dan menindas untuk mendapatkan ambsi kekuasaan
2. menata atau pengembalian seperti semula
4. Senjata yang digunakan Irak untuk lawannya
6. LawanIrakdalam Perang Teluk III
7. Kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin tanpa melihat derajat kebebasan individu
9. Wapres AS 2002

Tugas terstruktur:

Buatlah Quate mengenai aksi damai akibat perang kepentingan negara di dunia, maupun kehidupan bernegara Indonesia dengan menggunakan aplikasi canva dengan format .jpg. Hasil diunggah pada laman Exelsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Najiyullah. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya(diterjemahkan oleh).* Jakarta: Al-Ishlahy Press.

A. Arjomand, Said Amir. 1988. *The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran*. New York: Oxford University Press,

A. Arjomand, Shaul. 1986. *The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution.* New York: Basic Books.

Abrahamian, Ervan. 1982. *Iran Between Two Revolution*. Princeton, N,J: Princepton University Press.

Alam, Asadollah. 1992. *The Shah and I: The Confidential Diary of Iran's Royal Court. 1969-1977.* New York: St. Martin's Press.

Alberto Bin et al., eds. 1998. *Desert Storm: A Forgotten War.* Westport, Conn: Praeger

Al-nadaw, Abu al-Hasan alhasani. 1978. *Western Civilixation, Islam and Moslems*. India: Locknow Publishing House.

Alnasrawi, Abbas. 1994. *The Economy of Irak: Oil, Wars Destrution of Development and Prospect, 1950-2010.* Westport, Conn: Greenwood Press.

Al-Qordhawi, Y. 1997. '*Islam dan Sekularisme', diterjemahkan oleh : Amirullah Kandu, Lc., CV. Pustaka Setia.*

al-Suwaidi, Jamal S.,ed. 1995. *The Yemeni War 0f 1994: Causes and Consequences*. London: Saqi.

Amal, Taufik Adnan. 2016. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*.Mizan, Bandung.

Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Amzah.

Amuzegar, Jahangir. 1991. *The Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis' Triumps and Tragedy.* Albany: State Universty of New York Press.

Andono, Aksan. 1956. *Krisis di Asia barat (Mesir): Kumpulan Diskusi-Diskusi.* Yogyakarta: UGM Press.

Anwar, A Syaifi'I. *Kemalisme dan Islam sebua Kaledoskop dalam 'Ulum Al-Qur'an'*. No.3,vol.1.1989.

Azra, Azyumardi. 2016. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi.* Jakarta: Kencana.

Baram, Amatzia. 1991. *Culture, History and Ideology in the Formation of Bathist Irak, 1968-89.* London: Macmillan.

Bar-On, Ordechai. 1994. *The FGates of GAZA: Israel's Road to Suez and Back 1955-1957*. New York: St. Martin's Press.

Basri,Syafiq. 1987. *Iran Pasca Revolusi*. Jakarta: Sinar Harapan.

Ben-Gurion, David. 1963. *Israel: Years of Challenge.* New York: Columbia University Press.

Bixby, Asgar. 1993. *Asia barat di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Boris Rumer,ed. 2000. *Central Asia and the New Global Economy.* Armonk, N.Y: Sharpe.

Brenner, Michael dan Shelley Frisch. *Zionism: A Brief History*, (New Jersey: Markus Wiener Publishers, 2003)Fraser, T.G. The Middle East: 1914–1979 (New York: St. Martin's Press, 1980)

Brockelman, Carl. 1974. *History of the Islamic People*. London: Routledge and Kegan.t.t.

Brumberg, Daniel. 2001. *Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran.* Chicago: University of Chicago Press.

Burrowes, Robert D. 1987. *The Yemen Arab Republic: The Politics of Development, 1962-1986*. Boulder, Colo: Westview Press.

Carapico, Sheila. 1998. *Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia*. New York: Cambridge University Press.

Cizre,Umit.2008.*Seculer and Islamic Politic In Turkey*.New York: Routledge.

Cohen, Avner. 1998. *Israel and the Bomb*. New York: Columbia University Press.

Cordesman, Anthony H. 1999. *Irak and the War of Sanctions: Conventional Threats and Weapons of Mass Destruction.* Westport, Conn: Praeger.

Deden Anjar Herdiansyah, Tesis *Konspirasi Freemansory dalam kerajaan Turki Ustmani pada masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909)*

Dictionary of the Israeli-Palestinian Conflict Vol. 2 K-Z, (Detroit: Macmillan Reference USA, 2005), dan Jeremy Black, Introduction to Global Military History, (London: Routledge, 2005)

Dowty, Alan. 2001. *The Jewish State: A Century Later*. Updated ed. Berkeley: University of California Press.

Elliot, Matthew. 1996. *Independent Irak: The Monarchy and British Influence, 1941-58.* London: Tauris

Emy Azziaty Rozali, Azmul Fahimi Kamaruzaman. 2011.*First World War, Balfour Declaration and Their Impact on Palestine*. dalam seri Internasional Journal West Asian Studies.3(2). 21-24

Eugene L Rogan and Avi Shlaim, eds. 2001. *The War for Palestine: Rewriting the History of 1948.* Cambridge, England: Cambridge University Press.

Eweis, M Yehia. 1955. *Egypt Between Two Revolution.* Cairo: Imprimerie Misr S.A.E.

Fawcett, Louise L'Estrange. 1991. *Iran and the Cold War; The Azerbaijan Crisis of 1946.* Cambridge, England: Cambridge University Press.

Gasiorowski, Mark J. 1991. *U.S Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran.* Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

Gelvin, James L. 1998. *Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire.* Berkeley: University of California Press.

Ghanem, As'ad. *The Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948-2000; A Political Study*. Albany: State University of New York Press, 2001.

Goode, James F. 1997. *The United States and Iran: In the Shadow of Musaddiq*. New York: St. Martin's Press.

Halliday, Fred. 1989. *Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967-1987*. Cambridge: Cambridge University Press

Hassanpour, Amir. 1992. *Nationalism and Language in Kurdistan, 1918-1985*. San Francisco: Mellen Research University Press.

Herzog, Chaim. 1982. *The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East*. New York: Random House.

Hiro, Dilip. 1991. *The Longest War: The Iran-Irak Military Conflict*. New York: Routledge.

Hiro, Dilip. 1992. *Desert Shield to Desert Storm: The Second Gulf War*. New York: Routledge.

Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs,* terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi.

Hoesin, Oemar Amin. 1953. *Gelora Politik Negara-negara Arab.* Jakarta: Tintamas.

Hooglund, Eric J. 1982. *Land and Revolution in Iran, 1960-1980.* Austin: University of Texas Press.

Hopwood, Derek, et al,eds. 1993. *Irak: Power and Society.* Reading, England: Ithaca.

Hourani, AAlbert H. 1946. *Syria and Lebanon, a Political Essay*. London: Oxford University Press.

Israel, Gershoni, dan Jankowski, James P. 1986. *Egypt, Islam and The Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930.* Oxford: Oxford University Press

J.H Bamberg. *The History of the British Petroleum Company*. Vol 2: The Anglo-Iranian Years, 1928-1954.

John L. Esposito dan John O Voll. 1999. *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan.

Ka'bah,Lihat Rifyal. 1994. *Islam dan Serangan Pemikiran: Sebuah Gejala al-Ghazwul Fikri.* Jakarta: Granada Nadia.

Karaspahi, Sena.2009. *Muslim in Modern Turkey.* London: IB Tauris.

Karel A. Steenbrink. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19. Jakarta: Bulan Bintang.

Karim, Abdul M. 2007.*Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Karsh, Efraim and Inari Rautsi. 1991. *Saddam Husein. A Political Biography.* New York: Free Press.

Katouzian, Homa. 1981. *The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979.* New York: New York University Press.

Khadduri, Majid. 1988. *The Gulf War: The Origins and Implications of the Irak-Iran Conflict.* New York: Oxford University Press.

Khadduri, Majid and Edmund Ghareeb. 1997. *War in the Gulf, 1990-91: The Irak-Kuwait Conflict and Its Implications.* New York: Oxford University Press.

Khoury, Philip. 1987. *Syria and Lebanon under the French Madate*. New York: Oxford University Press.

Kuniholm, Bruce R. *“The Geopolitics of the Caspian Basin.”* Middle East Journal 54 (2000): 541-571.

Lapidus. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam, Jilid II.* Jakarta: Rajawali Pers.

Lenczowski, George. 1992. *Asia barat di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Lenczowski, George. *The Middle East in World Affairs.*

Lenczowsky, George. *Asia barat di Tengah Kancah Dunia*, terjemahan

Lubis, Amany, et. al., 2005. *sejarah Peradaban Islam, Jakarta.* Jakarta: UIN

Mahdi, Kamil A. 2000. *State and Agriculture in Irak: Modern Development, Stagnation and the Impact of Oil.*

Makiya, Kanan. 1998. *Republic of Fear: The Politics of Modern Irak.* 2d ed. Berkeley: University of California Press.

Makovsky, Michael, Blaise Misztal, dan Jonathan Ruhe. Januari 2011. *Tragility and Extremism in Yemen, A Case Study of The Stabilizing Fragile States Project*. Bipartisan Policy Center,

Medding, Petter Y. 1990. *The Founding of Israeli Democracy, 1948-1967.* New York: Oxford University Press.

Milani, Mohsen. 1994. *The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic*. 2d ed. Boulder, Colo: Westview.

Misri A. Muchsin. 2015 Palestina dan Israel: *Sejarah Konflik dan Masa Depan*. Vol.XXXlX. No.2. UIN- Ar-Raniry.Hal 404

Moghadam, Fatemeh E. 1996. *From Land Reform to Revolution: The Political Economy of Agricultural Development in Iran, 1962-1979.* London: Tauris.

Moin, Baqer. 2000. *Khomeini: Life of the Ayatollah*. New York: St. Martin’s Press.

Morris, Benny. 1988. *The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Mostafa Elm. 1922. *Oil, Power, and Principle: Iran’s Oil Nationalization and Its Aftermath*. Syracuse, N.Y.: Syracuse Univeristy Press.

Mufrodi, Ali. 2010. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Surabaya: Anika Bahagia.

Mughini,Syafiq A.1997. *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki.* Jakarta: Logos.

Mussalam, Mussalam Ali. 1996. *The Iraki Invasion of Kuwait: Saddam Husein, His State and International Power Politics.* London: British Academic Press.

Najmabadi, Afsaneh. 1987. *Land Reform and Social Change in Iran.* Salt Lake City: University of Utah Press.

Nasir, Tamara. 1981. *Perang Iran – Perang Irak.*Jakarta: Sinar Harapan.

Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I dan 2.* Jakarta: UI Press.

Nasution, Harun. 1982. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nuseibeh, Hazem Zaki. 1969. *Gagasan-Gagasan Nasionalisme Arab, Terjemahan Sumantri Mertodipuro.* Jakarta: Yayasan Dana Buku Indonesia.

Ochsenwald, William. 2013. *The Middle East: A History*. Ohio State University.

Ochsenwald,William. 2013. *The Middle East: A History*. Ohio State University.

Oren, Michael B. 1992. *Origins of the Second Arab- Israel WAR: Egypt, Israel and the Great Power*. 1952-56. London: Frank.

Padi. 2005. *Konflik Arab-Israel: Upaya-upaya, Peluang dan Kendala Perdamaian. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah. Vol 19 No.1 April 2005*

Pahlavi, Mohammad Reza. 1980. *Answer to History.* New York: Stein and Day.

Peterson, J.E. 1982. Yemen: *The Search for a Modern State.* Baltimore, Md: John Hopkins University Press.

Pewarta Soerabaia. *"Krisis Politik Mesir",* (Edisi Kamis 3 Juli 1952), Surabaya: N.V. Pewarta-Soerabaia, hlm. 1. (bagian 1)

Prezet, Don. *The Middle East Today.* New York: Praeger.t.t.,cet.IV.

Quandt, William B. 2001. *Peace Process; American Diplomacy and the Arab- Israeli Conflict Since 1967.* Rev. ed. Berkeley; University of California Press.

Rahman, Mustafa Abd. 2002. *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

Ramzani, Rouhollah K. 1986. *Revolutionary Iran: Challenge and Response in the Middle East*. Baltimoure: Johns Hopkins University Press.

Ridho, Abu, *Palestina Nasibmu Kini*, Jakarta, Sidik, 1996.

Rifyal Ka'bah. 1994. *Islam dan Serangan Pemikiran: Sebuah Gejala al-Ghazwul Fikri.* Jakarta: Granada Nadia.

Robinson, Glenn E. 1997. *Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution*. Bloomington: Indiana University Press.

Sani, Abdul. 1998. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shlaim, Avi. 1990. *The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists and Palestine, 1921-1951.* New York: Columbia University Press.

Sihbudi , Riza, Hamdan Basyar. 1994. *Konflik dan Diplomasi di Asia barat,* Jakarta: Pustaka Grafindo

Sihbudi, M. Riza. 1991. *Islam, dunia Arab, Iran: Bara Asia barat. Bandung: Mizan*

Sihbudi, Riza dkk. 1995. *Profil Negara-negara Asia barat*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sihbudi, Riza, dkk. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Asia barat.* Bandung: PT Eresco.

Sihbudi, Riza. 1993. *Bara Asia barat*. Bandung: Penerbit Mizan.

Smith, Pamela Ann. 1984. *Palestine and the Palestinians, 1876-1983*. London: Croom Helm.

Smolansky, Oles M and Bettie M Smolansky.1991. *The USSR and Irak: The Soviet Quest for Influence.* Durham, N.C: Duke University Press

Syadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara, AJaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press.

Tamara, Nasir, Agnes Samsuri. 1981. *Perang Iran-Perang Irak*. Jakarta: Sinar Harapan

Taylor, Alan R. 1990. *Pergeseran-Pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*, Jakarta: AmarPress

Thayib, Anshari dan Anas Sadaruwan, Anwar Sadat. 1981. *Di Tengah Teror dan Damai.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

WAMY. 1993. *Aliran-aliran Modern dalam Islam,terj.Machnun Husain.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Watt, W Montgomery. 1990. *Kejayaan Islam Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya

Wenner, Manfred. 1991. *The Yemen Arab Republic: Development and Change in an Ancient Land.* Boulder, Colo: Westview

Yatim, Badri. 1993. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Yuliningrum. 2009. Keputusan Amerika Serikat Melibatkan Halliburton dan Black Water Security Consulting Pada Proses Rekontruksi Irak Pasca Invansi. Amerika Serikat ke Irak. Skripsi Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Jember.

Zurcher,Erik J.2003. *Sejarah Modern Turki*.Terjemahan oleh Karsidi Diningrat R.Jakarta: Gramedia Pustaka.

BIODATA PENULIS

Brigida Intan Printina, M.Pd., lahir di Madiun pada 1 Februari 1991 ialah salah satu pengajar di program studi Pendidikan Sejarah FKIP USD. Setelah menyelesaikan studi sarjana di prodi pendidikan sejarah FKIP USD tahun 2012, ia menyelesaikan studi pasca sarjana pendidikan sejarah UNS tahun 2014. Studi pasca sarjanan dijalankan bersamaan dengan menjadi pengajar PKN di SMP Santa Maria Assumpta Klaten tahun 2012 dan pengajar sejarah SMA Regina Pacis Surakarta tahun 2013. Pada tahun 2015 menjadi pengajar di program studi Pendidikan Sejarah FKIP USD.

Selama menjalani status dosen muda telah melakukan kajian khususnya mengenai media pengajaran dengan menjadi editor pada salah satu kumpulan karya komik "Pemuda Penguat Pancasila Penggerak Inspirasi Bangsa" dengan rekomendasi Emalia Irigiliati Sukarni (Putri Pahlawan Nasional Sukarni). Selain itu juga menjadi editor pada salah satu buku referensi pada mata kuliah Sejarah Pendidikan dengan judul "Membumikan Moral dan Cita Benih Bangsa" atas rekomendasi Prof. Dr-Ing. Wardiman Djojonegoro (Mantan Menteri Pendidikan tahun 1993-1998).

Terkait karya-karya mengenai Sejarah Asia Barat ada beberapa kajian yang dipublikasikan diantaranya publikasi ilmiah dengan judul "Analisa Potensi Geografis Timur Tengah Menjadi Kekuatan Teritori Melalui Komik Digital Berlandaskan Paradigma Pedagogi Reflektif" pada jurnal Agastya (FKIP PGRI Madiun) dan "Pemanfaatan Media Komik Digital Melalui Unsur PPR (Paradigma Pedagogi Reflektif) Pada Matakuliah Sejarah Asia Barat Modern" pada jurnal Pendidikan Sejarah (Universitas Negeri Jakarta). Publikasi di media massa Bernas dengan tiga buah karya; 1) Transformasi Kemalis untuk Nasionalisme, 2) Berneagara Ala Ibnu Saud, 3) Anwar Sadat Sang Reformis Perdamaian, dan yang terakhir publikasi di Solo Pos dengan "Lika-Liku Konflik Saudi-Iran".

Sejarah Asia Barat Modern

Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III

PENULIS
BRIGIDA INTAN PRINTINA

Perdamaian di rumah kunci perdamaian negara, perdamaian negara kunci perdamaian dunia... (Mustafa Kemal Attaturkh).

Sebuah transformasi menuju nasionalisme tidak terlepas dari konflik dan perjuangan, bahkan sebagian besar negara-negara di Asia Barat masih merasakan bara konflik yang tak terbendung. Buku ini mempertemukan berbagai perjuangan dan kepentingan politik yang diawali dengan berbagai analisis Barat terhadap konflik yang berkecamuk di Asia Barat pada masa modern.

Nasionalisme di setiap negara di Asia Barat juga tidak lepas dari berbagai kepentingan, bahkan menghambat suatu reformasi para pelopor nasionalisme. Maka di awal telah diperkenalkan berbagai pandangan bentuk-bentuk penyebab dan dampak konflik.

Perjuangan ke arah nasionalisme menjadi sebuah keutamaan bagi para pelopor untuk melepaskan belenggu legitimasi yang dibawa oleh Barat pasca kedatangan Napoleon Bonaparte. Meski tidak serta merta transformasi pemerintahan disebabkan olehnya, namun ada banyak perubahan drastis yang berdampak besar di setiap negara berkembang di Asia Barat.

Dari itu semua sebagai suatu harapan besar, buku ini mampu menjadi referensi dan pegangan yang dapat memperkuat komitmen mahasiswa untuk tetap menggenggam nasionalisme bangsa meski diterpa pragmatism, kapitalisme, dan industrialisasi yang bisa saja melunturkan jati diri bangsa.
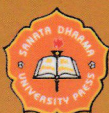
SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS
Jl. Affandi, (Gejayan) Mrican, Yogyakarta 55281
Phone: (0274)513301; Ext.51513
Web: *sdupress.usd.ac.id*; E-mail: *publisher@usd.ac.id*

appti

ISBN 978-602-5607-93-6
9 786025 607936
Pendidikan Sejarah